

**IMPLEMENTASI JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP
SEBAGAI KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH
INDONESIA DAN INTERNATIONAL
PARTNERS GROUP**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional



Ibnu Hamdun

NIM: I72219041

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
September, 2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ibnu Hamdun
NIM : I72219041
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Implementasi Just Energy Transition Partnership
sebagai Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan
International Partners Group

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthoriq

Surabaya, 10 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



IBNU HAMDUN
NIM. I72219041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Hamdun
NIM : I72219041
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul *Implementasi Just Energy Transition Partnership sebagai Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 13 September 2023

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar., MA., Ph.D
NIP. 196901051993032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Oleh Ibnu Hamdun dengan Judul: *"Implementasi Just Energy Transition Partnership sebagai Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group"* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 22 September 2023

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



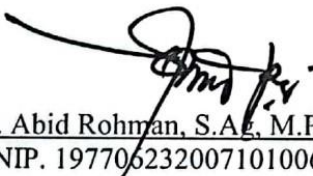
Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar, MA, Ph.D
NIP. 196901051993032001

Penguji II



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Dr. Abid Rohman, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197706232007101006

Penguji IV



Dr. Zudan Rosyidi, SS. MA
NIP. 198103232009121004

Surabaya, 22 September 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag.
NIP. 197106272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ibnu Hamdun
NIM : I72219041
Fakultas/Jurusan : Hubungan Internasional/ Fisip
E-mail address : ibnoehamdun15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Just Energy Transition Partnership Sebagai Kemitraan Antara Pemerintah
Indonesia dan International Partners Group

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Oktober 2023

Penulis



(Ibnu Hamdun)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Hamdun, Ibnu, “Implement the Just Energy Transition Partnership as a partnership between the Government of Indonesia and the International Partners Group, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023

Energy transition efforts have become a commitment of countries in the world as a way to reduce the amount of global emissions, including in Indonesia. However, in its implementation, Indonesia has obstacles, especially in the financing sector and other technical support. On the other hand, there are international dynamics that urge developed countries to immediately release climate finance to developing countries. Furthermore, using the concept of global partnership, this thesis will discuss how Indonesia implements the JETP as a result of a partnership between the Government of Indonesia and the IPG. This research uses a descriptive qualitative method, with data collection methods in the form of interviews and documentation while the data analysis uses the Miles, Huberman & Saljana method. The research findings show that Indonesia and IPG have implemented the JETP partnership through various efforts, including in 3 months carrying out political dialogue, forming the JETP secretariat and assisting Indonesia in funding and technical arrangements. Within 6 months, a CIPP document has been prepared which includes an investment plan and implementation of the energy transition, drafting the 2030 electricity roadmap and identifying plans to decommission coal-fired power plants.

ABSTRAK

Hamdun, Ibnu, “Implementasi Just Energy Transition Partnership Sebagai Kemitraan antara Indonesia dan International Partners Group. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Upaya transisi energi telah menjadi komitmen Negara-negara di dunia sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah emisi global termasuk di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya Indonesia memiliki hambatan terutama di sektor pembiayaan dan dukungan teknis lainnya. Disisi lain, terjadi dinamika internasional yang mendesak negara-negara maju untuk segera mengeluarkan pendanaan iklim kepada negara berkembang. Lebih lanjut dengan menggunakan konsep kemitraan global skripsi ini akan membahas bagaimana Indonesia mengimplementasikan JETP sebagai suatu hasil kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan IPG. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis datanya menggunakan metode Miles, Huberman & Saljana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan IPG telah mengimplementasikan kemitraan JETP melalui berbagai upaya diantaranya yaitu dalam 3 bulan telah melaksanakan dialog politik, pembentukan sekretariat JETP dan membantu Indonesia dalam penataan pendanaan dan teknis. Adapun dalam 6 bulan telah disusun dokumen CIPP yang didalamnya memuat rencana investasi dan pelaksanaan transisi energi, menyusun pera jalan ketenagalistrikan 2030 dan mengidentifikasi rencana penonaktifan PLTU Batubara.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto.....	iv
Pernyataan Pertanggung Jawaban Penulisan Skripsi....	Error! Bookmark not defined.
Persembahan	v
Abstract.....	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xvii
Daftar Tabel.....	xviii
Daftar Singkatan	xix
Glossarium	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	12

C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	30
A. Landasan Konseptual	30
1. Implementasi	30
2. Just Energy Transition Partnership (JETP)	32
3. Kemitraan	40
4. Pemerintah Indonesia	47
5. International Partner Group (IPG)	48
B. Argumentasi Utama	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Level Analisis dan Subyek Penelitian	52
D. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik sampling	55
1. Situasi Sosial	55
2. Sampel	56
3. Teknik Sampling	56

E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisa Data	59
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
A. JETP sebagai Kemitraan antara Indonesia dan IPG	65
1. Latar Belakang Kemitraan JETP di Indonesia	65
2. Proses Penandatanganan Mekanisme JETP di Indonesia	69
3. Manfaat Mekanisme JETP	69
a. Bagi Pemerintah Indonesia	78
b. Bagi Negara Mitra IPG	80
B. Implementasi JETP sebagai kemitraan Indonesia dan IPG	82
1. Implementasi dalam 3 bulan.....	83
a. Dialog Politik Terbuka	83
b. Pembentukan Sekretariat JETP	90
c. Membantu Indonesia dengan penataan dukungan keuangan dan teknis	99
2. Implementasi dalam 6 Bulan	102
a. Penyusunan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP)	102
b. Mengembangkan proses peninjauan dua tahunan	108

c. Menyusun Peta Jalan Sektor Ketenagalistrikan 2030	111
d. Mengidentifikasi Rencana Penonaktifan PLTU Batu Bara	112
C. Hambatan Selama Pelaksanaan Kerjasama JETP	114
1. Pendanaan untuk JETP dari negara mitra IPG yang belum keluar	115
2. Sulitnya memobilisasi resource dalam waktu yang sangat singkat ..	117
3. Keterlambatan Penyusunan CIPP JETP	118
D. Tantangan Implementasi JETP di Masa Depan	118
1. Keterbukaan Informasi terkait Pendanaan JETP	119
2. Ketergantungan terhadap batubara	120
3. Mempersiapkan SDM yang berkompeten.....	121
4. Memastikan Aspek Keadilan bagi Masyarakat terdampak	122
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	cxxxi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	cxli
1. Dokumen Join Statement JETP	cxli
2. Transkrip Wawancara Narasumber 1.....	cxlvii
3. Transkrip Wawancara Narasumber 2 (Sekretariat JETP).....	clxiii
4. Dokumentasi Wawancara	clxx

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tingkat Pengeluaran Emisi Karbon Indonesia Tahun 1990-2020	7
Gambar 2. 2 Struktur Negara-negara IPG.....	50
Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif: Miles, Huberman & Saljana.....	62
Gambar 4. 1 Alur Kerja JETP Sumber: Kementerian ESDM 2023.....	78
Gambar 4. 2 Diskusi Publik Sekretariat JETP	84
Gambar 4. 3 Peresmian Sekretariat JETP	91
Gambar 4. 4 Bagan Rancangan Struktur Organisasi Sekretariat JETP.....	94

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Fakta tentang JETP di berbagai Negara	33
Tabel 4. 1 Rencana aksi kemitraan JETP dalam 3 bulan	78
Tabel 4. 2 Rencana Aksi Kemitraan JETP dalam 6 Bulan	79

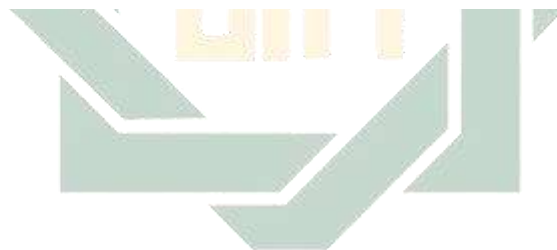


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank
BaU	: Business as Usual
CIPP	: Comprehensive Investment and Policy Plan
COP	: Conference of the Parties
EBT	: Energi Baru Terbarukan
EBTKE	: Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
ETM	: Energy Transition Mechanism
ETMM	: Energy Transition Ministerial Meeting
ETWG	: Energi Transition Working Group
FGD	: Forum Group Discussion
GERILYA	Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya
GFANZ	: Glasgow Finance Alliance for Net Zero
GRK	: Gas Rumah Kaca
IEA	: International Energy Agency
IESR	: Institut for Essential Service Reform
ILO	: International Labor Organization
IPG	: International Partners Groups
JETP	: Just Energy Transition Partnership
MtCO ₂ e	: Million Ton of Carbon Dioxide equivalent
MW	: Mega Watt

NDC	: Nationally Determined Contribution
NZE	: Net Zero Emission
PERPRES	: Peraturan Presiden
PGII	: Partnership for Global Infrastructure and Investment
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SATGAS	: Satuan Tugas
UNDP	: United Nations Development Programme
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

GLOSSARIUM

COP (Conference of The Parties)	: Badan pembuat keputusan tertinggi dari UNFCCC. Masing-masing Negara Pihak Konvensi diwakili di COP dan berlangsung setiap tahun. COP diciptakan dengan tujuan membangun para pihak untuk mengatasi perubahan iklim.
Dekarbonisasi	: Upaya untuk membatasi jumlah emisi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil menuju sumber-sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
ETWG (Energi Transition Working Group)	: Agenda diskusi yang terdapat dalam KTT G-20, yang berfokus kepada pembahasan transisi energi, dimana melibatkan negara-negara G20 dan lembaga internasional.
GFANZ (Glasgow Finance Alliance for Net Zero)	: Aliansi lembaga keuangan global terkemuka yang berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi ekonomi.
IPG (International Partners Group)	: Kelompok negara-negara maju yang berfokus kepada isu perubahan iklim, kelompok tersebut merupakan inisiator lahirnya kemitraan JETP untuk negara berkembang
JETP (Just Energy Transition Partnership)	: Mekanisme pendanaan transisi energi yang diinisiasi oleh negara-negara maju, untuk membantu negara berkembang dalam mendekarbonisasi sektor energinya.

- NZE (Net zero emissions) : Kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
- PGII (Partnership for Global Infrastructure and Investment) : Kemitraan bersama negara-negara G7 untuk memajukan investasi publik dan swasta dalam infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, tangguh dan berkualitas. Melalui kemitraan ini G7 akan memobilisasi pendanaan hingga USD 600 miliar pada tahun 2027 dengan tujuan untuk mempersempit kesenjangan investasi di negara-negara mitra.
- UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) : Perjanjian lingkungan internasional untuk mendukung respon global terhadap ancaman perubahan iklim. Bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campuran tangan manusia dengan sistem iklim.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah emisi karbon global yang berdampak kepada perubahan iklim semakin mengkhawatirkan negara-negara di dunia. Hal tersebut menuntut perlunya melakukan upaya dekarbonisasi emisi dengan segera. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh International Energy Agency (IEA) emisi CO² global pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 36,3 miliar ton dan kembali tumbuh sebesar 0,9% atau 321 juta ton pada tahun 2022, mencapai ketinggian baru lebih dari 36,8 miliar ton.³ Jumlah emisi yang sangat besar tersebut jika tidak segera diantisipasi dapat mengakibatkan pemanasan global dan degradasi lingkungan, sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Oleh karena itu negara-negara dunia sepakat untuk menjadikan lingkungan bebas karbon sekaligus mengurangi tren peningkatan emisi karbon.⁴ Penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu alternatif terbaik untuk meminimalisir emisi dan pemanasan global. Energi terbarukan yang

³ IEA, "Global CO2 emissions rose less than initially feared in 2022 as clean energy growth offset much of the impact of greater coal and oil use - News," diakses 22 June, 2023, <https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rose-less-than-initially-feared-in-2022-as-clean-energy-growth-offset-much-of-the-impact-of-greater-coal-and-oil-use>.

⁴ Puspanjali Behera, Anasuya Haldar, and Narayan Sethi, "Achieving Carbon Neutrality Target in the Emerging Economies: Role of Renewable Energy and Green Technology," *Gondwana Research* 121 (September 1, 2023): 16–32, <https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.03.028>.

bersumber dari alam akan mengurangi ketergantungan dunia pada energi fosil yang menyumbang emisi yang besar.

Pengembangan energi terbarukan yang memiliki emisi rendah dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan dapat membantu memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti ketahanan energi dan menurunkan dampak lingkungan.⁵ Situasi global pasca pandemi Covid-19 yang diperparah dengan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia menjadikan banyak negara mengamankan pasokan energi nya dengan memanfaatkan energi terbarukan. Tidak hanya itu energi terbarukan juga dipandang akan dapat memberikan manfaat kesehatan dan pertumbuhan bagi ekonomi hijau.

Untuk mengurangi emisi karbon global, negara-negara maju turut bertanggung jawab besar dalam membantu negara-negara berkembang, terutama dari segi pendanaan. Hal tersebut dikarenakan negara-negara maju mayoritas adalah negara Industri, yang mana mereka menyumbang emisi global terbesar. Berbeda halnya dengan negara maju yang memiliki kemampuan untuk melakukan upaya dekarbonisasi, mayoritas negara berkembang sangat bergantung kepada bantuan pendanaan internasional. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) negara maju memiliki kewajiban untuk mendukung negara

⁵ Panayiotis Tzeremes, Eyup Dogan, and Nooshin Karimi Alavijeh, "Analyzing the Nexus between Energy Transition, Environment and ICT: A Step towards COP26 Targets," *Journal of Environmental Management* 326 (January 15, 2023): 116598, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116598>.

berkembang dalam mengatasi konsekuensi perubahan iklim dengan menyediakan sumberdaya keuangan yang memadai.⁶ Pendanaan iklim dari negara-negara maju berperan penting dalam upaya mendukung negara berkembang dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.⁷

Pada saat pelaksanaan Conference of the Parties (COP) UNFCCC ke 26 pada tanggal 31 Oktober- 13 November 2021, di Glasgow Inggris, desakan kepada negara-negara maju untuk segera memobilisasi pendanaan iklim di negara berkembang sesuai dengan Paris Agreement melahirkan komitmen The Glasgow Climate Pact. Pada komitmen tersebut ditegaskan perlu nya negara-negara maju untuk segera memobilisasi pendanaan iklim sebesar 100 USD setiap tahun nya, seperti yang dijanjikan dalam Paris Agreement yang ditujukan untuk mendukung proses dekarbonisasi di negara-negara berkembang. Pendanaan tersebut sudah menjadi komitmen jangka panjang bahkan melalui Copenhagen Accord pada Desember 2009. Namun pendanaan dari negara maju belum mencapai US\$ 100 miliar hingga tahun 2020, seperti yang telah dijanjikan.⁸ Untuk itu kemudian pendanaan

⁶ Djoko Santoso Abi Suroso et al., "Revisiting the Role of International Climate Finance (ICF) towards Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) Target: A Case Study of the Indonesian Energy Sector," *Environmental Science & Policy* 131 (May 1, 2022): 188–95, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.022>.

⁷ Florian Weiler, Carola Klöck, and Matthew Dornan, "Vulnerability, Good Governance, or Donor Interests? The Allocation of Aid for Climate Change Adaptation," *World Development* 104 (April 1, 2018): 2, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.001>.

⁸ Djoko Santoso Abi Suroso et al., "Revisiting the Role of International Climate Finance (ICF) towards Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) Target: A Case Study of the Indonesian Energy Sector," *Environmental Science and Policy* 131 (2022): 188.

iklim untuk negara-negara berkembang kembali ditegaskan melalui Pasal 43 The Glasgow Pact yang berbunyi: ⁹

Emphasizes the need to mobilize climate finance from all sources to reach the level needed to achieve the goals of the Paris Agreement, including significantly increasing support for developing country Parties, beyond USD 100 billion per year;

Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan komitmen pendanaan dari terselenggara konferensi tersebut diluncurkanlah mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk pertama kali nya, dengan Afrika Selatan sebagai negara penerimanya. Mekanisme tersebut memungkinkan Negara-negara maju yang tergabung dalam International Partner Group (IPG) untuk memobilisasi paket pendanaan kepada Afrika selatan senilai US\$ 8,5 miliar untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan lebih cepat di negaranya.¹⁰ Mekanisme tersebut merupakan pendekatan inovatif untuk mengumpulkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya keuangan untuk mendukung tujuan iklim ambisius negara-negara mitra dan mempercepat transisi energi khususnya di negara berkembang.¹¹ Saat ini implementasi mekanisme pendanaan ini telah dijalankan di beberapa negara diantaranya Indonesia, Vietnam, India dan

⁹ "Glasgow Climate Pact," n.d.

¹⁰ Maria Putri, "Just Energy Transition Partnership (JETP) Afrika Selatan - irid.or.id," April 13, 2023, <https://irid.or.id/publication/just-energy-transition-partnership-jetp-afrika-selatan/>.

¹¹ "U.S. Departments of the Treasury and State, and South African President Cyril Ramaphosa Announce Endorsement of the South Africa Just Energy Transition Partnership Investment Plan," U.S. Department of the Treasury, June 9, 2023, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1085>.

Sinegal. Adapun dalam pelaksanaannya besarnya pendanaan dan implementasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Indonesia menyepakati mekanisme JETP sebagai upaya dalam mempercepat proses dekarbonisasinya pada pelaksanaan Forum KTT G-20 di Bali, Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022. Pada pelaksanaan forum tersebut negara-negara mitra IPG yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Denmark, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Inggris dan Irlandia, menyepakati terbentuknya mekanisme pendanaan JETP untuk Indonesia.¹² Selain beberapa negara yang ikut berkontribusi dalam pendanaan ini, Uni Eropa sebagai salah satu Organisasi Internasional di kawasan Eropa, turut menyumbang pendanaan ini. Saat ini, Implementasi JETP di Indonesia dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Besaran investasi yang dijanjikan kepada Indonesia melalui mekanisme tersebut sebesar 20 Miliar US\$ atau senilai Rp. 317 triliun, dalam jangka waktu 3 – 5 tahun kedepan. Dari total pendanaan 20 Miliar US\$ tersebut, 10 Miliar US\$ akan dimobilisasi oleh anggota IPG dan 10 Miliar USD sisanya akan dimobilisasi oleh para anggota Kelompok GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero).¹³ GFANZ sendiri merupakan aliansi lembaga keuangan global yang berkomitmen untuk mempercepat

¹² "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik," PT PLN (Persero), accessed August 2, 2023, <https://web.pln.co.id/pln-jetp/jetp-home>.

¹³ UE Commission, Joint Statement by the Government of the Republic of Indonesia and International Partners Group members on the Indonesia Just Energy Transition Plan, diakses pada tanggal 25 September 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6892

dekarbonisasi ekonomi, yang dimana merupakan proses penurunan emisi yang dihasilkan oleh aktivitas produksi dan konsumsi dalam perekonomian. Diantara kelompok GFANZ yang berkontribusi dalam mekanisme pendanaan ini meliputi Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered. Penelitian ini hanya akan berfokus kepada Implementasi JETP antara Indonesia dan IPG.

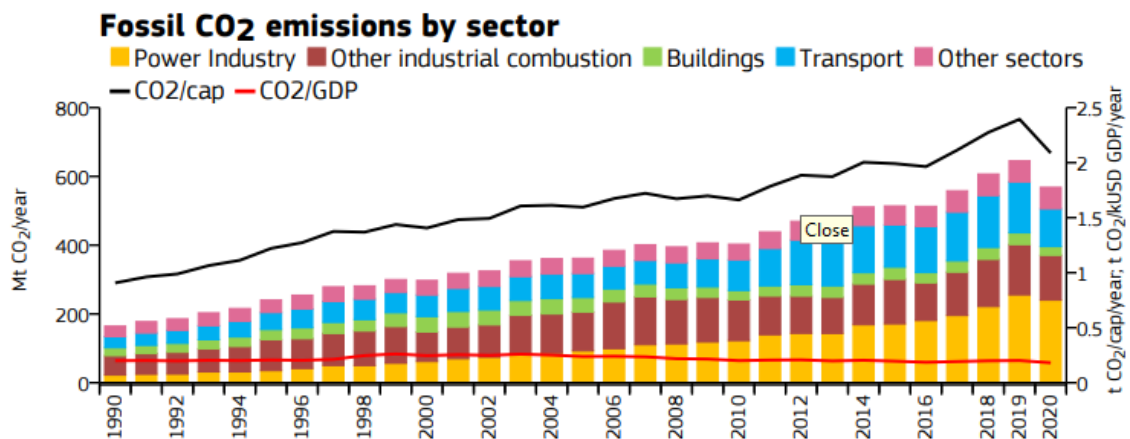
Dengan disepakatinya mekanisme JETP, Indonesia sepakat untuk menghentikan sebagian pengembangan Pembangkit listrik batubara baru dan pencapaian target ambisius lainnya. Termasuk dalam kesepakatan ini yaitu puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030, menjadikannya nol bersih pada tahun 2050 dan mencapai 34 persen pengembangan energi terbarukan untuk pembangkit listrik pada tahun 2030.¹⁴

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah emisi yang cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh *carbon brief* pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke lima negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia sejak 1850 yakni 102,562 GtCO₂ atau 4 persen dari total emisi secara global.¹⁵ Sedangkan jika melihat pada dokumen GHG Emission for all world countries, 2021 Report Jumlah emisi Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2020 terus mengalami kenaikan. Pada

¹⁴ Kevin Rudd et al., "Getting Indonesia to Net Zero: Foreword," *Getting Indonesia to Net Zero* (Asia Society, 2023), 10, <https://www.jstor.org/stable/resrep48545.5>.

¹⁵ Simon Evans, "Analysis: Which countries are historically responsible for climate change?," *Carbon Brief*, October 5, 2021, <https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/>.

tahun 2019 menjadi puncak emisi tertinggi di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini



Gambar 1. 1
Tingkat Pengeluaran Emisi Karbon Indonesia Tahun 1990-2020

Sumber: GHG Emission for All World Countries, 2021 Report” (Italy: Join Research Centre, 2021).

Dari gambar diatas, terlihat bahwa tingkat pengeluaran emisi karbon di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan puncak emisi tersebut terjadi pada tahun 2019. Jumlah emisi tersebut didominasi oleh sektor industri pembangkit listrik. Hal tersebut terjadi karena mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil terutama batubara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pengguna pembangkit listrik berbahan bakar batu bara terbesar ke 7 di dunia dan 91,5% bauran energi primer nasional masih mengandalkan bahan bakar fosil. Indonesia juga merupakan negara pengekspor batubara terbesar di

dunia berdasarkan volume dengan cadangan batubara yang melimpah.¹⁶ Kebutuhan untuk pemenuhan pasokan energi nasional dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan lingkungan menjadi pertimbangan perlu dilakukannya percepatan Transisi energi.

Pelaksanaan JETP di Indonesia selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan jumlah emisi nya. Pada September 2022, melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC), Indonesia meningkatkan komitmen penurunan emisi menjadi 31,89% secara sukarela dan 43,20% dengan bantuan Internasional.¹⁷ Sedangkan dari sektor pemanfaatan energi terbarukan Indonesia juga meningkatkan target nya bauran energi nya menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.¹⁸

Tidak hanya peningkatan target NDC, Pemerintah juga menerbitkan regulasi untuk mendorong percepatan transisi energi di Indonesia. Regulasi tersebut terlihat dengan keluarnya Perpres No.112 yang mengatur tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

¹⁶ Annisa Sekaringtias, Brunilde Verrier, and Jennifer Cronin, "Untangling the Socio-Political Knots: A Systems View on Indonesia's Inclusive Energy Transitions," *Energy Research & Social Science* 95 (January 1, 2023): 102911, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102911>.

¹⁷ Yose Rizal Damuri et al., "Arah Kebijakan & Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia: Sektor Ekonomi Strategis Perdagangan, Industri, Dan Investasi" (Centre for Strategic and International Studies, 2023), <https://www.jstor.org/stable/resrep48562>.

¹⁸ "Pemerintah Terus Mendorong Percepatan Transisi Energi di Dalam Negeri Guna Mencapai Target Net Zero Emission pada 2060 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," accessed July 3, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4996/pemerintah-terus-mendorong-percepatan-transisi-energi-di-dalam-negeri-guna-mencapai-target-net-zero-emission-pada-2060>.

Melalui perpres tersebut Indonesia menegaskan komitmennya dalam melakukan dekarbonisasi melalui serangkaian upaya di antaranya adalah Penghentian PLTU dan pengembangan energi baru terbarukan.

Besarnya pendanaan untuk melakukan upaya dekarbonisasi di Indonesia dan ketergantungan kepada sumber daya fosil, menjadikan Indonesia membutuhkan pendanaan dari negara-negara lain termasuk melalui mekanisme JETP. Dalam masalah pendanaan transisi energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US\$281 Miliar atau Rp4,002 triliun hingga 2023 untuk mendukung NDC yang telah ditetapkan secara nasional.¹⁹ Pendanaan besar tersebut mustahil, tanpa keterlibatan negara-negara lain. Investasi dari negara-negara maju menjadi sebuah solusi yang cukup efektif dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan segi pendanaan. Mekanisme JETP menjadi solusi efektif atas kendala pendanaan yang menghambat upaya dekarbonisasi.

Kemitraan Indonesia dan IPG dalam sektor energi dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumber-sumber energi baru terbarukan yang cukup banyak, namun belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya energi yang berasal dari Angin/bayu yang mempunyai potensi sebesar 155 GW, panas bumi sebesar 24 GW, hidro sebesar 95 GW, energi surya sebesar 3.295 GW dan bioenergi

¹⁹ "Dana Transisi Energi Masih Minim | Media Indonesia," EpaperMI, March 31, 2023, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/dana-transisi-energi-masih-minim>.

57 GW, laut 60 GW.²⁰ Kemitraan tersebut akan membantu Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan tersebut, baik karena terkendala pendanaan maupun keterbatasan pengetahuan.

Selain dari segi potensi energi terbarukan yang besar, Indonesia merupakan rumah bagi hutan tropis ketiga, serta lahan gambut tropis dan hutan bakau terbesar di dunia, yang mana merupakan sumberdaya alam yang menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Dengan potensi besar ini Indonesia dapat membantu dalam upaya dekarbonisasi global.²¹ Tidak hanya itu kemampuan hutan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dari udara, menyimpannya sebagai biomassa pohon dan memasukannya kedalam tanah berkontribusi pada perbaikan lingkungan negara secara keseluruhan.²²

Mekanisme JETP didirikan sebagai kemitraan Jangka panjang untuk membantu Indonesia dalam mengejar transisi energi yang cepat dan ambisius yang mendukung lintasan dan menjaga pemanasan di angka 1,5°C. Termasuk dalam hal ini strategi pengurangan emisi sektor listrik yang ambisius berdasarkan perluasan energi terbarukan dan penurunan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara.²³ Penelitian ini akan lebih difokuskan

²⁰ Gigih Udi Utomo, "Energy Transition Financing Through JETP & ETM" (3rd Japan RE Investment Indonesia 2023, New Otani Hotel Tokyo, March 3, 2023).

²¹ Asia Society Policy Institute, "Introduction," Getting Indonesia to Net Zero (Asia Society, 2023), 20, <https://www.jstor.org/stable/resrep48545.9>.

²² Asif Raihan et al., "The Role of Renewable Energy Use, Technological Innovation, and Forest Cover toward Green Development: Evidence from Indonesia," *Innovation and Green Development* 2, no. 1 (March 2023): 9, <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100035>.

²³ "Just Energy Transition Partnership established to aid Indonesia in achieving its decarbonisation goals," Allen & Gledhill, accessed June 7, 2023,

pada Implementasi JETP sebagai kemitraan antara Indonesia dan IPG melalui mekanisme ini dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang implementasi kerjasamanya.

Implementasi JETP mengakui pentingnya prinsip transisi yang berkeadilan bagi pekerja dan masyarakat yang terdampak pensiun dini PLTU. Batasan penggunaan batu bara domestik diproyeksikan akan mengurangi jumlah emisi yang dikeluarkan secara nasional, namun akan berdampak nyata kepada masyarakat yang bergantung kepada sektor tenaga batu bara diantaranya kehilangan pekerjaan utama. Oleh karena nya program peta jalan transisi yang adil mencakup penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan, jaminan sosial bagi kelompok rentan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program peningkatan dan pelatihan. Transisi energi juga harus dilakukan secara gradual (bertahap) dengan mempertimbangkan aspek sosial, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana yang telah disepakati dalam pernyataan bersama dengan IPG, Dalam 3 bulan yang akan datang rencana implementasi kerjasama meliputi: dialog politik inklusif tentang percepatan dan transisi energi yang adil yang melibatkan aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil, sektor swasta, dll, Menyelesaikan pendanaan awal untuk proyek dan upaya JETP, Menyiapkan platform dan lembaga keuangan pembangunan

dan pemangku kepentingan utama, Sedangkan di 6 bulan berikutnya implementasi kerjasama meliputi mengembangkan peta jalan untuk kemampuan manufaktur terbarukan, mengembangkan rencana investasi dan kebijakan JETP, menyusun peta jalan untuk tahun 2030 di sektor `ketenagalistrikan, Mengidentifikasi rencana untuk melakukan percepatan pensiun dini atau menghindari pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara on grid dan off-grid baik sebelum dan sesudah 2030. Penelitian ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melihat bagaimana Implementasi JETP sebagai kemitraan antara Indonesia dan IPG dalam melakukan akselerasi dekarbonisasi di Indonesia. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas lebih jauh tentang Proses Dekarbonisasi di Indonesia, Implementasi JETP, kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan penelitian dari mulai disepakatinya Komitmen JETP di Bali akhir bulan november 2022 sampai dengan tahun 2023. Tepatnya 6 bulan dari komitmen tersebut, hal tersebut peneliti lakukan sebagaimana telah terlampir dalam pernyataan bersama, dimana menyebutkan jangka waktu 3 sampai 6 bulan dalam pelaksanaan kerjasama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai

Kemitraan Antara Pemerintah Indonesia dan IPG? Bagaimana pula hambatan dan tantangan Implementasi JETP di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti jelaskan, maka tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui Bagaimana Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) Sebagai Kemitraan Antara Pemerintah Indonesia dan IPG? Serta Bagaimana pula hambatan dan tantangan Implementasi JETP di masa yang akan datang?

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan baru bagi pembaca dan peneliti studi hubungan internasional mengenai Implementasi JETP sebagai salah satu bentuk kemitraan Indonesia dan IPG dalam upaya akselerasi dekarbonisasi di Indonesia. Pengetahuan baru ini dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan riset dan kajian mendalam yang terpublikasi melalui penulisan Jurnal ilmiah tentang Implementasi Kemitraan Indonesia IPG dalam akselerasi transisi energi melalui JETP. Penelitian ini dapat pula menjadi suatu bahan diskursus atau perdebatan di lingkungan

kampus bagi akademisi Hubungan Internasional terutama dalam ranah Mahasiswa yang akan melahirkan keilmuan baru bagi dunia akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara empirik mengenai pentingnya upaya dekarbonisasi di Indonesia sehingga banyak pihak yang akan beralih kepada energi yang lebih bersih.
- b. Melalui penelitian tentang Kemitraan dengan IPG diharapkan akan mendapatkan manfaat teknis bagaimana pelaksanaan kerjasama antar negara khususnya Indonesia dan dalam menghadapi permasalahan global yaitu dekarbonisasi, mengetahui kendala yang terjadi, sehingga kerjasama dapat ditingkatkan menjadi lebih efektif dalam upaya mempercepat proses transisi energi .
- c. Dengan Penelitian ini, masyarakat dengan sendirinya sadar untuk mengontrol konsumsi energi mereka sesuai dengan kebutuhan nya, sehingga penggunaan energi menjadi lebih hemat. Hal tersebut akan membantu dalam mencegah dampak perubahan iklim global.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan dalam mengetahui posisi penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Nhquang & Associates pada tahun 2023 yang berjudul “*JETP experience in South Africa and Indonesia, and lessons learnt for Vietnam*”.²⁴ Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang pengalaman pengimplementasian JETP di Afrika Selatan dan Indonesia serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah vietnam. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang kekurangan apa saja yang ditemukan dalam implementasi JETP di kedua negara. Misalnya di Afrika selatan masyarakat tidak mempunyai akses terhadap informasi pendanaan, tidak melibatkan partisipasi pekerja dalam penyusunan investasi dan dialog dilakukan sangat terlambat Sedangkan di Indonesia kekurangan nya adalah pembahasan tentang implementasi baru dilakukan setelah 3 bulan dari disepakati nya JETP dan masih minimnya dialog yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan rekomendasi kebijakan untuk vietnam diantaranya adalah pengelolaan akuntabilitas dan upaya koordinasi yang efektif dan transparan, Negosiasi langsung antara vietnam dan IPG merupakan bagian integral, berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama dengan Afrika Selatan dan Indonesia yang lebih dulu menerapkan JETP. Penelitian ini berbeda dengan peneliti setidaknya dalam ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini terlalu luas yaitu JETP di Afrika Selatan dan Indonesia sedangkan Peneliti hanya memfokuskan pada Indonesia. Data

²⁴ “JETP Experience in South Africa and Indonesia, and Lessons Learnt for Vietnam” (Nhquang & Association, March 2023).

yang disajikan dalam penelitian ini juga masih kurang lengkap jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian Kedua berjudul *Just Energy Transitions and Partnerships in Africa: A South African Case Study*.²⁵ Penelitian ini dilakukan oleh Emily Tyler and Lonwabo Mgoduso pada tahun 2022 yang diterbitkan melalui jurnal Meridian Economics. Melalui penelitian ini dijelaskan bahwa tantangan transisi energi di Afrika Selatan adalah bentuk pasar listrik dan krisis keuangan. Menjadikan Narasi tentang transisi percepatan energi sebagai peluang dari pada resiko dapat memberikan manfaat untuk mendapatkan dukungan lokal yang luas. Skema JETP harus menyadari mitigasi yang melampaui apa yang terjadi seandainya tidak ada dukungan finansial untuk membantu pemangku kepentingan terkait hambatan politik, finansial dan teknis. Kurangnya transparansi dan rencana kerja yang jelas dapat menyebabkan kegagalan JETP. Peningkatan sektor swasta juga memiliki peran sangat penting dalam menyukseskan transisi energi di Afrika Selatan. Penelitian ini walaupun sama-sama membahas tentang mekanisme JETP tetapi berbeda secara aktor negaranya. Penelitian ini meneliti penerapan JETP di Afrika sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap Implementasi JETP di Indonesia sebagai bentuk Kemitraan Indonesia dan IPG.

²⁵ Emily Tyler and Lonwabo Mgoduso, "Just Energy Transitions and Partnerships in Africa: A South African Case Study," n.d.

Penelitian yang Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lasse Toft Christensen dan Annisa Suharsono yang berjudul *Achieving a Just Energy Transition in Indonesia*".²⁶ Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal *International Institute for Sustainable Development* pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang langkah penting yang harus menjadi prioritas oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya mewujudkan transisi energi yang adil. Langkah tersebut yaitu dialog sosial yang melibatkan tiga aktor yaitu pemerintahan, pekerja dan pemberi pekerjaan, kedua diversifikasi ekonomi yang bukan hanya berlangsung selama masa pemulihan, dan ketiga aksi lebih awal yaitu upaya mitigasi risiko untuk masyarakat yang terdampak adanya transisi energi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam upaya transisi energi yang adil yaitu: Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam transisi yang adil dan melembagakan prinsip-prinsip lintas administrasi, mengakui seruan dari serikat pekerja Indonesia dan melembagakan dialog, mengurangi ketergantungan nya kepada batubara, serta keterlibatan BUMN dalam pemulihan transisi hijau di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis karena walaupun terdapat kesamaan topik penelitian namun berbeda secara konteksnya. Penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk memulai Transisi energi yang Adil namun penelitian yang saya lakukan

²⁶ Lasse Toft Christensen and Annisa Suharsono, "Achieving a Just Energy Transition in Indonesia," n.d.

adalah lebih bersifat teknis tentang Bagaimana pelaksana kerjasama Indonesia dan IPG nya.

Penelitian yang Keempat berjudul “*From Climate Financing to Just Energy Transition Financing*”. Penelitian ini dilakukan oleh Fikri Muhammad dan Petra Christi yang kemudian menjadi Policy Brief pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada negara G-20 terkait pemanfaatan dana JETP khususnya negara penerima, untuk melakukan upaya transisi energi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan JETP merupakan salah satu tantangan besar, dimana ketergantungan akan energi fosil sudah mengakar. Oleh karena nya, konsep pembiayaan harus difokuskan pada pengembangan mata pencaharian masyarakat melalui dialog sosial. Kemitraan transisi yang adil tidak bisa hanya berfokus kepada pembiayaan mitigasi iklim namun juga peningkatan SDM, diversifikasi ekonomi dll. Pemerintah termasuk pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mensinergikan upaya transisi energi. G20 sebagai forum multinasional juga harus memainkan peranan penting dalam membentuk dan mengarusutamakan transisi yang adil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena hanya memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara penerima pendanaan agar penerapan JETP sesuai dengan ketentuan nya yaitu menjamin keadilan bagi semua pihak. Sedangkan penulis membahas membahas Kemitraan yang dilakukan Indonesia dengan IPG terkait Implementasi pendanaan nya secara luas.

Penelitian Kelima dilakukan oleh *Climates Strategis* pada tahun 2021 yang berjudul *Incorporating Just Transition in Developing Country NDCs and Post Covid Responses: Indonesia.*²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemangku kepentingan merasa lebih terlibat dengan cara yang lebih terbuka dan Transparan terkait transisi energi yang ada. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Isu tentang transisi energi yang Adil masih menjadi hal yang baru bagi pemerintah Indonesia, dapat dilihat dengan pemahaman yang relatif sedikit di Kementerian-kementerian di Indonesia. Masalah transisi yang adil hanya menjadi pembahasan serius di Kementerian luar negeri dan sebagian di kementerian ketenagakerjaan RI. Melalui penelitian ini Dala Institute merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melakukan diskusi lebih lanjut antar lembaga pemerintahan dan kementrian agar memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Isu-isu transisi yang adil dan Implikasi nya bagi Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi tentang topik ini melalui program pelatihan pra kerja (Kartu Pra Kerja). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini membahas transisi energi sebelum disepakatinya Kerjasama Indonesia dan IPG melalui JETP sedangkan penulis membahas implementasi kerjasamanya. Penelitian ini juga hanya membahas dalam tataran teoritis sedangkan penulis dalam teknis nya.

²⁷ "Incorporating Just Transition Strategies in Developing Country NDCs and Post COVID Responses: Indonesia on JSTOR," accessed June 14, 2023, <https://www.jstor.org/stable/resrep35553>.

Penelitian Keenam dilakukan oleh Djoko Santoso Abi Suroso dkk., yang berjudul *“Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector”*. Penelitian ini diterbitkan melalui Jurnal Environmental Science and Policy pada tahun 2022. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan data primer berupa wawancara, Penelitian ini menjabarkan tentang sejauh mana International Climate Finance (ICF) dapat berkontribusi dalam pembiayaan iklim mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa dukungan Internasional yang ditujukan untuk pendanaan iklim di Indonesia berkembang dengan baik walaupun dengan berbagai keterbatasan. Selama kurun waktu tahun 2017-2019 Pendanaan tersebut didominasi oleh sektor perubahan iklim (58%), adaptasi perubahan iklim (9%) dan adaptasi perubahan iklim lintas sektor (33%). ICF di Indonesia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal seperti instrumen dan hibah. Dalam realitasnya Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan dukungan internasional untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan iklimnya namun harus mengembangkan skema lain yang lebih inovatif di luar pendanaan tersebut seperti Green Sukuk. Dalam penelitian ini memang memiliki kesamaan yaitu tentang masalah pendanaan perubahan iklim, namun berbeda secara mekanismenya. Jika penelitian ini menggunakan mekanisme ICF sebagai fokus bahasan sedangkan penulis menggunakan mekanisme JETP. Penelitian ini juga tidak membahas langkah teknis yang

dilakukan antar negara berbeda dengan penulis yang membahas langkah teknis Kemitraan antara Indonesia dan IPG melalui pendanaan tersebut.

Penelitian Ketujuh dilakukan oleh Jule Konneke, dkk; berjudul *“Financing Climate Partnership G7 Solidarity and Infrastructure Investment”*.²⁸ Penelitian ini diterbitkan dalam Journal EG3 pada tahun 2022. Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa negara yang berbeda akan membutuhkan bentuk kemitraan yang berbeda untuk memenuhi persyaratan dekarbonisasi dan ketahanan energi mereka. Pembangunan koalisi di negara-negara maju, diperlukan diluar kebutuhan untuk peningkatan pendanaan iklim publik. Melalui penelitian ini, peneliti juga memberikan rekomendasi berupa 3 pilar tindakan G7 untuk membuka fondasi keuangan mitra diantaranya: Reformasi dan rekapitulasi lembaga pembiayaan pembangunan, Membuka kunci keuangan swasta melalui upaya pengurangan resiko baru dan mengkatalisasi investasi yang lebih luas melalui kerjasama pada platform keuangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena fokus pembahasannya kepada investasi yang dikeluarkan oleh negara G-7 dalam isu lingkungan melalui kemitraan, dan bagaimana mengefektifkan pendanaannya sedangkan fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis adalah Implementasi JETP melalui Kemitraan yang dilakukan oleh Indonesia dan IPG.

²⁸ Jule Könneke et al., “Financing Climate Partnerships: G7 Solidarity and Infrastructure Investment” (EG3, 2022), <https://www.jstor.org/stable/resrep40234>.

Penelitian yang Kedelapan berjudul “*Arah Kebijakan & Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia: Sektor Ekonomi Strategis Perdagangan, Industri, dan Investasi* ”.²⁹ Penelitian ini dilakukan oleh Yose Rizal Damuri dkk; dan diterbitkan oleh Centre for Strategic and International Studies pada tahun 2023. Melalui penelitian ini dipaparkan tentang arah kebijakan Dekarbonisasi Ekonomi di Indonesia, yang merujuk pada kerangka kerja OECD dimana terdapat 3 instrumen kebijakan yang dapat diterapkan diantaranya; Merumuskan harga emisi, menerbitkan standar dan regulasi dan membuat kebijakan pendukung. Beberapa instrumen yang ada telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dapat dilihat dengan penentuan harga karbon dan Nilai ekonomi karbon untuk merumuskan harga emisi, Menerbitkan Standar Regulasi dilakukan dengan Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Standar Industri hijau, serta Kebijakan pendukung dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan tentang transisi energi melalui pemanfaatan energi dan pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena membahas tentang regulasi yang pemerintah Indonesia tetapkan untuk mendukung Dekarbonisasi Ekonomi, Sedangkan penulis membahas tentang Implementasi JETP sebagai salah satu bentuk Kemitraan dengan negara maju melalui IPG untuk mempercepat dekarbonisasi di Indonesia.

²⁹ Damuri et al., “Arah Kebijakan & Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia.”

Penelitian yang Kesembilan berjudul “*Transisi Energi: Kerjasama Indonesia dan IEA (International Energy Agency) Terhadap perkembangan Energi Terbarukan*”. Oleh Novita Auliya Kusnadi dkk., Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep Kerjasama Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dinamika kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan International Energy Agency (IEA) terhadap perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Melalui penelitian ini diketahui bahwasanya Indonesia telah menjalin kerjasama dengan IEA sejak tahun 2006 yang diwakili oleh Departemen ESDM, Kerjasama tersebut mengalami perkembangan dengan berjalan nya waktu, hingga di tahun 2020 Pandangan Indonesia mengenai IEA sudah masuk ke tahap mitra utama dalam prioritas kebijakan. Artinya keterlibatan IEA dalam penyusunan kebijakan energi di Indonesia sangat penting. Kerjasama Indonesia dan IEA telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia terhadap Energi terbarukan meliputi, target EBT sebesar 23% pada tahun 2025, kebijakan energi nasional, dan target pemanfaatan energi sebesar 50% pada tahun 2050. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti setidaknya dari segi aktor pelaksana kerjasama Internasional, Jika penelitian ini aktor pelaksana nya adalah Indonesia dan IEA sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kemitraan Indonesia dan IPG. Tidak adanya mekanisme kerjasama dalam penelitian

ini juga membedakan dengan penulis yang menggunakan mekanisme JETP dalam implementasi kemitraan nya.

Penelitian Kesepuluh Berjudul “*Bilateral Agreement of Indonesia – Japan for Low Carbon Growth Cooperation: An Analysis of the Effectiveness and the Compliance Level.*”³⁰ Penelitian yang dilakukan Oleh Hidayat Chusnul Chotimah, Puguh Toko Arisanto dan Tiffany Setyo Pratiwi ini diterbitkan oleh Nation State Journal of International Studies pada Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Konsep International Agreement (Perjanjian Internasional) digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi JCM antara Indonesia dan Jepang dengan menggunakan solusi efektivitas kerjasama internasional untuk mengkategorikan bentuk hukum yang sesuai apakah termasuk soft power atau hard power. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Indonesia dan Jepang membentuk kemitraan yang memiliki tingkat legalisasi mengacu pada Soft Law dengan pertimbangan agar terhindar dari hukum yang mengikat dan biaya yang tinggi. Implementasi dari kerjasama Indonesia – Jepang melalui mekanisme JCM menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi yang dapat dilihat melalui aspek paksaan, timbal balik, reputasi dan institusi domestik. Penelitian yang ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan

³⁰ Hidayat Chusnul Chotimah, Puguh Toko Arisanto, and Tiffany Setyo Pratiwi, “Bilateral Agreement of Indonesia - Japan for Low Carbon Growth Cooperation: An Analysis of the Effectiveness and the Compliance Level,” *Nation State Journal of International Studies* 3, no. 2 (December 31, 2020): 98–112, <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.228>.

rasionalisasi bahwa penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektifitas dan tingkat kepatuhan Indonesia dan Jepang terhadap Perjanjian bilateral yang telah disepakati bersama yaitu mekanisme JCM. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang Implementasi

Penelitian Kesebelas dilakukan oleh Grzegor Pesko dkk., yang berjudul *“Diversification and Cooperation Strategies in Decarbonizing World”*. Penelitian ini diterbitkan oleh Journal Climate Change Global Practice pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan melalui simulasi model ekonomi makro untuk melihat bagaimana strategi alternatif yang dapat dikejar oleh negara-negara yang bergantung kepada bahan bakar fosil untuk mendorong dan memungkinkan keikutsertaan mereka dalam transisi energi rendah karbon global. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa Pajak pembatasan Impor karbon tidak cukup efektif untuk mendorong adanya kerjasama komprehensif untuk mengurangi ketergantungan akan penggunaan energi fosil, namun sanksi perdagangan cukup efektif dan mendorong negara untuk bekerjasama. Lebih lanjut negara-negara berpenghasilan rendah yang mayoritas bergantung kepada energi fosil dengan cadangan yang belum di eksplorasi membutuhkan insentif tambahan dan pendukung untuk bekerjasama dan melakukan diversifikasi menjadi aset karbon. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidakselarasan antar berbagai negara yang bergantung kepada energi fosil dan antara pemilik bahan bakar yang berbeda. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti karena fokus pembahasannya adalah

bagaimana upaya dekarbonisasi global dilihat dari perspektif ekonomi makro, dimana salah satu strategi untuk mendorong upaya dekarbonisasi adalah dengan sanksi perdagangan. Sedangkan penulis fokus pada bahasan tentang Implementasi Kemitraan antara Indonesia dan IPC melalui JETP. Dari ruang lingkup penelitian ini juga terlalu global karena tidak ada negara yang dispesifikan sedangkan penelitian penulis fokus kepada Indonesia.

Penelitian berjudul *"Impact of energy infrastructure investments on renewable electricity generation in major Asian developing economies"*.³¹ Menjadi penelitian terakhir yang penulis dapatkan. Penelitian ini dilakukan oleh Yuegang Song, Umer Shahzad dan Sudarshan Reddy Paramati pada tahun 2022. Penelitian yang diterbitkan oleh Australian Economic Papers ini menjelaskan tentang dampak investasi infrastruktur energi pada pembangkit listrik terbarukan di negara-negara berkembang khususnya di Asia. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa investasi memainkan peranan penting dalam mempromosikan pembangkit listrik terbarukan. Investasi juga mendorong pembangkitan konsumsi energi berbasis energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, sehingga memiliki relevansi kebijakan yang penting bagi ekonomi Asia yang semakin pesat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis walaupun terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu sama membahas

³¹ Yuegang Song, Umer Shahzad, and Sudharshan Reddy Paramati, "Impact of Energy Infrastructure Investments on Renewable Electricity Generation in Major Asian Developing Economies," *Australian Economic Papers* 62, no. 1 (March 2023): 1–23, <https://doi.org/10.1111/1467-8454.12282>.

tentang sektor ekonomi namun penelitian penulis berbeda karena tidak membahas tentang keterkaitan investasi dengan energi terbarukan, namun berkaitan dengan penggunaan dana yang berasal dari Investasi negara maju untuk mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia. Dari segi lingkup pembahasan juga berbeda karena penelitian penulis hanya membahas Kerjasama dalam sektor transisi energi di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sebagai upaya mempermudah dalam memahami alur dan isi skripsi ini secara menyeluruh, maka disusun sistematika pembahasan yang meliputi:

Bab 1 yang merupakan bab pendahuluan, akan memaparkan tentang gambaran umum atau gambaran dasar dari penelitian ini. Diawali dengan latar belakang mengenai topik permasalahan penelitian. Selanjutnya terdapat fokus dan batasan dalam penelitian. Kemudian dijelaskan manfaat dan tujuan penelitian. Di bab ini juga dipaparkan tentang sistematika pembahasan sebagai acuan bagi peneliti dalam penulisan penelitian secara terstruktur. Selanjutnya pada Bab II yaitu landasan konseptual, akan memuat penjabaran konsep yang digunakan peneliti sebagai pedoman kerangka berpikir dalam menyusun penelitian secara sistematis dan komprehensif. Pada Bab II Penulis akan menjabarkan tentang definisi Implementasi, JETP, Kerjasama Internasional, dan IPG.

Kemudian Pada Bab III, akan menjelaskan tentang metode penelitian yang peneliti aplikasikan dalam proses pengerjaan penelitian dimana metode penelitian tersebut meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu, tingkat analisis, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahaan data.

Pada BAB IV, peneliti akan menjabarkan tentang penyajian data yang dianalisis sesuai dengan konsep dan teori yang peneliti gunakan dalam Bab III, dimana konsep tersebut nantinya akan peneliti gunakan sebagai instrumen dalam menginterpretasikan data yang peneliti dapatkan sehingga menghasilkan sebuah temuan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penyajian data dalam penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci tentang Bagaimana Implementasi JETP sebagai Kemitraan Indonesia dan IPG, Realisasi anggaran transisi energi, kepentingan masing-masing aktor Negara baik IPG maupun Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama. Untuk memudahkan dalam penyajian data, akan disajikan tabel, grafik, gambar dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini.

Sebagai penutup di Bab V diuraikan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan rangkaian proses dari penelitian serta hasil dari pertanyaan rumusan masalah yang tertera di bab awal. Di bab ini juga terdapat saran dari peneliti terhadap permasalahan yang telah diteliti yang ditujukan

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, serta evaluasi bagi peneliti yang hendak mengkaji penelitian serupa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA

A. Landasan Konseptual

1. Implementasi

Jika merujuk pada pengertian Cambridge dictionary, pengertian implementasi dirumuskan secara singkat, dimanana “*implementation*” (implementasi) berarti “*the act of starting to use a plan or system*” yang artinya tindakan mulai menggunakan rencana atau sistem. Sedangkan menurut KBBI, Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa, implementasi mengharuskan adanya suatu tindakan yang terencana atau tersistematisasi. Tanpa melalui rencana yang tersusun terlebih dahulu, suatu tindakan tidak akan diketahui target pelaksanaannya, hal tersebut juga menjadikan sulitnya untuk menentukan keberhasilan atas suatu tindakan.

Implementasi menurut Carl May, dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai dengan sengaja, dimana agen bermaksud untuk menjalankan praktik baru atau yang dimodifikasi, disetujui secara kelembagaan, dan dilakukan oleh mereka sendiri dan agen lain nya.³² Agen yang dimaksud dalam pengertian ini adalah manusia yang

³² Carl May, “Towards a General Theory of Implementation,” *Implementation Science* 8, no. 1 (February 13, 2013): 18, <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-18>.

menjalankan aktivitas implementasi. Pada saat proses implementasi sedang berlangsung, individu-individu manusia saling bertemu satu sama lain dan terlibat dalam proses realisasi dan mobilisasi sumberdaya material dan budaya serta terjadi proses persetujuan, kerjasama yang bermanfaat berdasarkan keahlian individu lain dalam bidang tertentu.³³

Dalam proses nya implementasi erat kaitan nya dengan penerapan suatu kebijakan. Van Meter dan Horn mendefinisikan pemaknaan implementasi kebijakan sebagai *“Police implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior decision”*.³⁴ Definisi tersebut menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan atau kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada sasaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya bertransformasi menjadi keputusan-keputusan operasional yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Implementasi kebijakan menjadi penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn sebagaimana dikutip oleh Haidar Akib, bahwa tugas

³³ *Ibid*

³⁴ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society* 6, no. 4 (February 1975): 447, <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang melibatkan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam penelitian ini Implementasi yang dimaksudkan peneliti merujuk pada pelaksanaan kesepakatan kerjasama antar negara dalam hal ini adalah JETP. Peneliti ingin melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan negara-negara mitra IPG dalam kaitan nya dengan proses dekarbonisasi di Indonesia.

2. Just Energy Transition Partnership (JETP)

JETP merupakan mekanisme kerjasama pembiayaan baru antara negara maju dan negara berkembang, dalam membantu negara berkembang yang bergantung kepada penggunaan energi fosil untuk melakukan transisi energi yang adil. Tujuannya adalah untuk mendukung jalur yang ditentukan sendiri saat negara beralih dari produksi dan konsumsi bahan bakar fosil di sektor listrik dengan cara mengatasi dampak sosial yang terlibat, misalnya dengan memastikan pelatihan dan penciptaan lapangan kerja alternatif bagi pekerja yang terkena dampak transisi dan mengembangkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat terdampak.

JETP pertama kali diumumkan selama Konferensi Perubahan Iklim PBB ke 26 di Glasgow, Inggris (COP26). Konferensi yang menyatukan Afrika selatan, Prancis, Jerman, Inggris Raya (UK), dan Amerika Serikat (AS) bersama dengan Uni Eropa (UE) tersebut berkomitmen memberikan bantuan pendanaan kepada Afrika Selatan dengan jumlah awal sebesar US\$ 8,5 Miliar untuk mendukung upaya dekarbonisasi nya. Pasca pengumuman tersebut banyak negara-negara maju yang ingin berkontribusi melalui mekanisme tersebut. Tidak hanya itu, dengan berjalan nya waktu hingga saat ini, JETP telah diterapkan di beberapa negara berkembang lain nya yaitu: Indonesia, Vietnam dan Sinegal. Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini, menunjukan bahwa besaran pendanaan dan serangkaian pelaksanaan JETP di beberapa negara berbeda, sesuai dengan target di masing-masing negara.

Tabel 2. 1 Fakta tentang JETP di berbagai Negara

Fakta Tentang JETP di beberapa Negara				
Negara Penerima	Tindakan yang direncanakan	Fokus dan Tujuan	Pembiayaan	Dampak yang diharapkan pada Emisi
Afrika Selatan	- Penghentian operasi pembangkit batu bara - Mempercepat investasi energi terbarukan - Mendanai pekerjaan alternatif di sektor batubara - Investasi di sektor ekonomi hijau	- Mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan - Mengembangkan peluang ekonomi baru seperti hidrogen dan kendaraan listrik	- Komitmen dana 8.5 Miliar US\$ - Dana yang dibutuhkan dari 2023 hingga 2027 sekitar 98 Miliar US\$	420 dan 350 MtCO ₂ -eq pada tahun 2030,

Vietnam	- Menonaktifkan pembangkit listrik tenaga batubara - Meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan penyimpanan - Memastikan lapangan bermain bagi pelaku pasar	- Mempercepat penyebaran energi terbarukan sebesar 47% pada tahun 2030 - Mengurangi pIpa proyek pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 30,2 GW	- Komitmen dana 15,5 Miliar US\$ - Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk transisi energi sebesar 60 miliar US\$ per tahun hingga 2050	Puncak emisi 170 MtCO ₂ - eq pada tahun 2030
Indonesia	- Pemanfaatan energi terbarukan dalam negeri - Mengembangkan rencana investasi - Pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara	- Puncak Emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 - Membatasi emisi sebesar 290 MT CO₂ pada tahun 2030 dan Nol Emisi pada tahun 2050 - Mempercepat pemanfaatan energi terbarukan setidaknya 34% pada tahun 2030	- Komitmen dana 20 Miliar US\$ - Dana yang dibutuhkan hingga 2060 sebesar 1 Triliun US\$	Sebesar 290 MT CO ₂ pada tahun 2030
Sinegal	- Menggunakan sumber daya gas alamnya sebagai upaya transisi energi rendah karbon	- Percepatan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 40% pada tahun 2030	- Komitmen Dana 2 Miliar US\$	Mengurangi emisi rumah kaca sebesar 5% dan 7% (tanpa syarat) dan 23% dan 29% (bersyarat pada dukungan eksternal) masing-masing pada tahun 2025 dan 2030.

Sumber: Diolah oleh peneliti melalui website Europa Commission, South Africa's Just Energy Transition Investment Plan, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Gov.UK, JETP plan in Indonesia

Disepakatinya JETP sebagai bentuk pendanaan iklim dilatarbelakangi oleh desakan kepada negara-negara maju untuk segera menepati janji nya memobilisasi pendanaan sebesar 100 Miliar US\$ per tahun nya sesuai dengan komitmen paris. Jumlah pendanaan tersebut bahkan sudah menjadi komitmen jangka panjang sebelum disepakatinya Paris Agreement melalui *Copenhagen Accord* pada Desember 2009. Namun Pendanaan dari negara maju belum mencapai US\$ 100 miliar seperti yang dijanjikan hingga tahun 2020.³⁵ Tidak ada nya kesepakatan diantara para negosiator terkait bagaimana mengukur komitmen secara tepat menjadikan pembayaran pendanaan tersebut tidak sesuai dengan janji yang disepakati. Sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan kepada negara-negara berkembang kemudian disusunlah Climate Finance Delivery Plan: Meeting the US\$100 Billion Goal, yang salah satu bentuk implementasi nya adalah mekanisme JETP.

Mekanisme JETP menggabungkan investasi yang berasal dari publik dan swasta untuk membantu pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang, khususnya untuk mengalihkan pembangkit energi

³⁵ Suroso et al., "Revisiting the Role of International Climate Finance (ICF) towards Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) Target: A Case Study of the Indonesian Energy Sector," 188.

dari bahan bakar fosil. Selain dalam bentuk investasi pendanaan JETP dapat berupa mekanisme pinjaman lunak, pinjaman berbasis pasar, hibah dan jaminan. Model JETP tidak hanya berupaya mendorong pelaksanaan transisi energi, namun juga berupaya mempromosikan ekonomi hijau dan menjawab kebutuhan ekonomi sosial masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.³⁶

Dalam pelaksanaannya JETP tidak hanya sekedar melakukan proses transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, namun juga harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang berfokus kepada masyarakat yang terdampak transisi. Menurut International Labor Organization terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi panduan bagi pemerintah dalam melakukan transisi yang adil di negaranya diantaranya:³⁷

1. Dialog sosial dan konsensus sosial yang kuat.

Penyusunan kebijakan yang akan diterapkan dalam upaya transisi harus didasarkan kepada dialog sosial dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, sehingga akan mudah diterima sebagai suatu kebijakan. Dialog sosial perlu dilakukan untuk menghindari konflik dan ketegangan sosial di masyarakat akibat transisi energi. Dengan adanya dialog sosial juga akan

³⁶ ASEAN Business News, "Indonesia's Just Energy Transition Partnership," January 2, 2023, <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-just-energy-transition-partnership/>.

³⁷ ILO, "Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All" (2015), 5.

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan transisi energi. Menghormati, memajukan dan mewujudkan prinsip dan hak dasar di dalam bekerja.

2. Mempertimbangkan inklusi gender yang kuat dalam kebijakan lingkungan. Keterlibatan dan partisipasi perempuan harus dilakukan dalam upaya menghindari bias gender. Proses transisi harus membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana yang didapatkan oleh pria.
3. Kebijakan yang koheren di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan/pelatihan dan ketenagakerjaan yang menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat, pekerja, investor dan konsumen untuk merangkul dan mendorong transisi menuju masyarakat yang ramah dan inklusif.
4. Perlu menyediakan kerangka kerja yang adil bagi semua pihak untuk mempromosikan penciptaan pekerjaan yang lebih layak. Proses transisi tidak dapat dipungkiri akan menggantikan beberapa pekerjaan dengan pekerjaan yang baru yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena nya perlu untuk mensosialisasikan dan menyiapkan lapangan kerja baru dengan keunggulan yang ada
5. Kebijakan perlu dirancang sesuai dengan kondisi yang spesifik negara, termasuk tahap perkembangan, sektor ekonomi serta jenis

dan ukuran perusahaan. Dan fakta bahwa tidak ada aturan yang cocok untuk semua.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang bahwa Indonesia menyepakati mekanisme JETP dalam forum KTT G-20 di Bali 16 november 2022 yang lalu. Melalui forum tersebut negara-negara maju yang tergabung dalam IPG berkomitmen untuk memobilisasi US\$ 20 Miliar untuk mempercepat dekarbonisasi di Indonesia. Dimana US\$ 10 Miliar akan dimobilisasi oleh IPG dan US\$ 10 Miliar sisanya akan dimobilisasi oleh GFANZ. Jadi dapat dikatakan bahwa mekanisme JETP ini berupa skema *blended finance*, dimana mengkombinasikan dana dari sektor pemerintahan melalui dana hibah dan dana dari privat seperti misalnya perbankan dan sebagainya untuk kemudian disatukan untuk pelaksanaan proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan mekanisme serupa seperti Afrika Selatan dan Vietnam pendanaan untuk Indonesia yang diberikan oleh negara-negara mitra (IPG) jauh lebih besar. Afrika selatan hanya mendapatkan US\$ 8,5 Miliar , Sedangkan vietnam mendapatkan US\$ 15,5 Miliar.

Dengan dukungan IPG tersebut Indonesia akan mengembangkan rencana investasi yang komprehensif untuk mencapai target dan kebijakan baru yang signifikan dalam mengurangi Gas Rumah Kaca dan mendukung masyarakat yang terkena dampak dengan:

1. Memuncaknya total emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 menggeser proyeksi puncak emisi kedepan
2. Membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 Megaton CO₂ pada tahun 2030, lebih rendah dari target sebelumnya yaitu 357 MTCO₂
3. Menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050, memajukan target emisi sektor ketenagalistrikan nol bersih Indonesia dalam sepuluh tahun
Mempercepat penerapan energi terbarukan sehingga pembangkit energi terbarukan mencapai setidaknya 34 persen dari total pembangkit listrik tahun 2030, yang kira-kira akan menggandakan total penerapan energi terbarukan selama dekade ini dibandingkan dengan rencana sebelumnya.

Efektifitas mekanisme JETP di Indonesia bergantung kepada bagaimana negara-negara maju menepati janji pendanaan nya. Karena selama ini jika melihat dari pengalaman sebelumnya, negara-negara maju belum mampu untuk merealisasikan janjinya di dalam upaya dekarbonisasi global. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam berjalannya dekarbonisasi mengingat sebagian proyek dekarbonisasi yang akan dijalankan pemerintah Indonesia, didasarkan kepada mekanisme pendanaan tersebut. Pemerintah Indonesia perlu secara konsisten menegosiasikan hal tersebut karena pendanaan merupakan permasalahan yang cukup sensitif.

3. Kemitraan

Menurut Fowler dalam Jonathan Makuwari, Pada dasarnya istilah kemitraan berarti aliansi strategis atau koalisi antara dua atau lebih entitas yang terlibat dalam suatu isu tertentu namun berbagi sumberdaya dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.³⁸ Kemitraan memiliki banyak varian, antara lain kemitraan usaha patungan, aliansi strategis, dan kemitraan komprehensif.

Kemitraan dapat dilakukan oleh beberapa Individu, negara maupun dalam tingkat yang lebih luas yaitu global karena adanya kebutuhan untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Jika dibandingkan mekanisme kerjasama lain nya misalnya aliansi kemitraan lebih bersifat kurang formal. Jika aliansi mensyaratkan adanya perjanjian yang mengikat anggotanya tidak demikian hal nya dengan Kemitraan. Suatu negara menjalin kemitraan dengan tujuan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari suatu lembaga atau negara lain. Ciri khas lain nya kemitraan relatif memiliki jangka waktu yang relatif pendek.³⁹

³⁸ Jonathan Makuwira, *NGOs and Post-Conflict Recovery* (Australian: ANU Press, 2006), 106, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbk89.11>.

³⁹ "Alliances vs. Partnerships," U.S. Department of Defense, accessed August 3, 2023, <https://www.defense.gov/News/Feature-Stories/story/Article/1684641/alliances-vs-partnerships/https%3A%2F%2Fwww.defense.gov%2FNews%2FFeature-Stories%2FStory%2FArticle%2F1684641%2Falliances-vs-partnerships%2F>.

Laporan Sekretaris Jenderal PBB yang berjudul Towards Global Partnership, seperti yang dikutip oleh Carmen Malena, mendefinisikan kemitraan sebagai:⁴⁰

“Partnerships are commonly defined as voluntary and collaborative relationships between various parties, both State and non-State, in which all participants agree to work together to achieve a common purpose or undertake a specific task and to share risks, responsibilities, resources, competencies and benefits.”

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa kemitraan umumnya didefinisikan sebagai hubungan sukarela dan hubungan kolaboratif antara berbagai pihak, baik Negara dan non-Negara, di mana semua peserta setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas tertentu dan untuk berbagi risiko, tanggung jawab, sumber daya, kompetensi, dan manfaat. Prinsip persetujuan dalam menjalankan komitmen bersama ditekankan dalam pengertian ini.

Stevenson dan Mitchel dalam Rosenbaum merangkum faktor-faktor yang sering dianggap sebagai penentu keberhasilan proses implementasi kemitraan berbasis masyarakat diantaranya:⁴¹

1. Konteks sosial yang mendukung pada tahap formatif (pembentukan)

Misalnya aliran dana harus dikoordinasikan untuk memberikan

⁴⁰ Louisa J.M. Jansen and Patrick P. Kalas, “Improving Governance of Tenure in Policy and Practice: A Conceptual Basis to Analyze Multi-Stakeholder Partnerships for Multi-Stakeholder Transformative Governance Illustrated with an Example from South Africa,” *Sustainability* 12, no. 23 (November 26, 2020): 9901, <https://doi.org/10.3390/su12239901>.

⁴¹ Dennis P. Rosenbaum and Amie M. Schuck, *Comprehensive Community Partnerships for Preventing Crime* (Oxford University Press, 2012), 7, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195398823.013.0012>.

insentif untuk melakukan upaya kolaborasi daripada kompetisi, riwayat pembagian kekuasaan kolaboratif;

2. Struktur awal yang dirancang dengan sengaja (lembaga-lembaga dengan kredibilitas dan sumberdaya; kepemimpinan dengan keterampilan proses dan visi, ukuran kelompok dan tingkat representasi organisasi yang sesuai dengan tugas,
3. Struktur formal dan kelompok kerja yang berfokus pada tugas untuk membantu efektivitas peranan instrumental dan mendorong partisipasi yang berkelanjutan,
4. Antisipasi pergantian keanggotaan dan kepemimpinan dalam keanggotaan
5. Proses untuk menghadapi perubahan eksternal, konflik perubahan eksternal, konflik dan persaingan.

Dalam penelitian ini Kemitraan yang menjadi fokus pembahasan adalah Kemitraan global antar beberapa negara. Kemitraan global melibatkan kolaborasi yang memiliki jangkauan *global*, bukan hanya terbatas di lingkup bilateral atau domestik. Kemitraan ini beroperasi dalam kerangka kerja sistem multilateral yang luas, menghubungkan berbagai aktor lintas yurisdiksi dalam merespon masalah-masalah yang berdimensi transnasional.⁴²

⁴² Liliana B. Andonova, *Governance Entrepreneurs: International Organizations and the Rise of Global Public-Private Partnerships*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2017), 8, <https://doi.org/10.1017/9781316694015>.

Kemitraan global merupakan inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan multilateral dalam beberapa hal penting. Kemitraan telah memperkenalkan *aktor-aktor* baru baik swasta maupun negara kedalam penyusunan dan implementasi tujuan tata kelola pemerintahan dalam sistem internasional yang telah dirancang oleh dan untuk negara-bangsa.⁴³ Kolaborasi antar aktor negara dan non negara dalam kemitraan memungkinkan berbagai anggota kemitraan menyumbangkan berbagai sumberdaya, pengetahuan atau klaim legitimasi, untuk mencapai tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama di dalam kemitraan.

Kemitraan global telah menjadi pusat diskusi di bidang kerjasama pembangunan, sejak terciptanya tujuan Millenium Development Goals (MDGS). Era MDGs berakhir pada tahun 2015 dan kemudian pencarian global pada tujuan sustainable development goals (SDGS) memuncak pada *roadmap baru* untuk pembangunan berkelanjutan pada 15 tahun yang akan datang. MDGs 8' dan SDG 17 secara khusus telah menyerukan kemitraan global untuk pembangunan, target-target yang berhubungan dengan kedua tujuan tersebut menekankan pentingnya kerjasama strategis dengan aktor-aktor non-negara untuk memberikan manfaat berupa pengembangan teknologi baru dan sumber pembiayaan bagi negara-negara mitra.⁴⁴

⁴³ Andonova, 7.

⁴⁴ Peter Seok Jin Han and 김태균, "Global Partnerships for Development and Risk Tendencies of Partners: A Theoretical Approach with the Gavi Case," *Asian International Studies Review* 19, no. 1 (June 2018): 2, <https://doi.org/10.16934/ISR.19.1.201806.1>.

Perkembangan kemitraan global tidak terlepas dari adanya kemajuan globalisasi. Kemajuan globalisasi turut menumbuhkan kesadaran bersama negara-bangsa untuk menangani permasalahan global diantaranya adalah kerusakan lingkungan, perang, konflik, etnis, kemiskinan dan krisis kesehatan serta masalah imigrasi dimana, berada diluar kemampuan pemerintahan negara manapun dalam menyelesaikan nya.⁴⁵ Semakin kompleksnya kondisi global, yang tidak dapat diatasi hanya dengan kehadiran entitas global semacam PBB, semakin menyadarkan negara-negara dunia perlu nya melakukan upaya kerjasama dengan mekanisme yang lebih besar dan lebih fleksibel. Kemitraan global menjadi pilihan *rasional* sebagai langkah negara-negara dunia turut berkontribusi dalam menangani isu global, khususnya di negara berkembang.

Platform kemitraan terdiri dari dua lapisan kesepakatan kolaboratif. Di Tingkat global, mitra publik dan swasta menentukan kesepakatan tentang serangkaian tujuan dan cara untuk mencapai nya. Di dalam platform tersebut kemudian disusun kerangka kerja, biasanya dalam bentuk dukungan institusional (informasi, jaringan, kontrak) dan seringkali berbentuk pendanaan untuk memungkinkan keterlibatan berbagai aktor pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui proyek

⁴⁵ Walter Leal Filho et al., eds., *Partnerships for the Goals*, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals (Cham: Springer International Publishing, 2021), 855–56, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4>.

kemitraan lapisan kedua, yang diimplementasikan di berbagai skala tata kelola dan yuridiksi.

Kemitraan multilateral terjadi lintas tingkatan, namun kemitraan nya ditangani oleh badan Internasional, seperti PBB atau Bank Dunia. Kemitraan ini bergaya top-down, karena difasilitasi oleh entitas internasional. Namun memiliki potensi dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemitraan bilateral hal tersebut dimungkinkan karena potensi sumberdaya pendanaan yang telah dikumpulkan bersama oleh beberapa negara berbeda.⁴⁶ Misalnya saja dalam hal ini adalah JETP, Negara-negara mitra IPG yang mayoritas adalah negara maju mengumpulkan pendanaan sesuai dengan kemampuan nya hingga terkumpul USD 20 Miliar untuk membantu percepatan dekarbonisasi di Indonesia.

Dalam menjelaskan praktik kerjasama antar negara penganut Teori Neoliberalisme memandang negara-negara akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan absolut untuk mencapai kesejahteraan nya melalui kerjasama. Negara-negara menginginkan kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama namun tanpa keberadaan lembaga yang lebih tinggi untuk menegakan kesepakatan mereka berbuat curang adalah mungkin dan menguntungkan.⁴⁷

⁴⁶ Priscilla McCelvey, "International Partnerships: What Global Development Needs," BORGEM, January 19, 2016, <https://www.borgenmagazine.com/international-partnerships/>.

⁴⁷ Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, 2nd ed. (London and New York: Routledge, 2008), 305.

Artinya, untuk mawadahi kepentingan nasional masing-masing negara yang heterogen dan untuk menghindari konflik antar negara dibutuhkan suatu entitas internasional, seperti misalnya PBB.

Kemitraan yang dilakukan oleh Indonesia dan IPG untuk mempercepat proses dekarbonisasi di Indonesia yang dijalankan melalui mekanisme JETP, merupakan penerapan dari konsep kemitraan global. Mekanisme tersebut, jika dilihat dengan menggunakan Perspektif Komunitas internasional, dapat dilihat sebagai metode baru kerjasama untuk meningkatkan tujuan iklim dan pembangunan yang ingin dicapai di seluruh dunia.⁴⁸ Kemitraan global dalam hal ini dapat menjadi pembuka untuk peningkatan teknologi energi bersih, seperti dekarbonisasi pada pembangkit listrik.

Melalui konsep kemitraan global dapat dilihat bahwasanya kerjasama dengan IPG dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia khususnya dalam sektor pendanaan iklim. Sebagaimana negara berkembang lain nya, Indonesia membutuhkan pendanaan yang cukup besar dalam upaya mencapai target Net zero emisinya. Dengan adanya mekanisme kemitraan ini akan membantu Indonesia dalam mempercepat dekarbonisasi nya, melalui serangkaian proyek, Salah satunya adalah penonaktifan PLTU, dan pemanfaatan energi terbarukan.

⁴⁸ Heiner Von Lüpke, Charlotte Aebischer, and Martha Bolanos, "International Partnerships for a Just Energy Transition: Findings from South Africa," *DIW Weekly Report*, 2023, 44, https://doi.org/10.18723/DIW_DWR:2023-5-1.

Kemitraan ini tidak hanya menguntungkan dari segi pendanaan Indonesia namun juga bagi negara-negara IPG. Hal tersebut dikarenakan jika kita dilihat struktur JETP bentuk pendanaan yang berupa hibah proposisinya kurang lebih 1,4 % sementara sisanya dalam bentuk loan atau berbagai macam skema keuangan lainnya. Ini menguntungkan bagi negara IPG mereka mendapatkan keuntungan dari JETP terutama melalui pinjaman dan lain sebagainya.⁴⁹ Jadi kemitraan ini dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dapat menjalankan dengan baik.

4. Pemerintah Indonesia

Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.⁵⁰ Pemerintah Indonesia adalah badan yang bertanggung jawab menjalankan tanggung jawab kenegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan dalam menjalankan tanggung jawabnya dibantu oleh para menteri. Hingga saat ini terdapat 34 Kementerian dalam pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan Indonesia dalam penelitian ini merujuk kepada Presiden sebagai kepala negara dan lembaga kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan mekanisme JETP. Kementerian-

⁴⁹ Robi Kurniawan, Implementasi JETP sebagai Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan IPG, July 5, 2023.

⁵⁰ Dr Drs ISMAIL NURDIN M.Si, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.), 9.

kementerian tersebut diantaranya adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Ekonomi Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN dalam hal ini termasuk PLN karena sebagai proyek yang akan dijalankan berdasarkan mekanisme JETP menjadi tanggung jawab PLN.

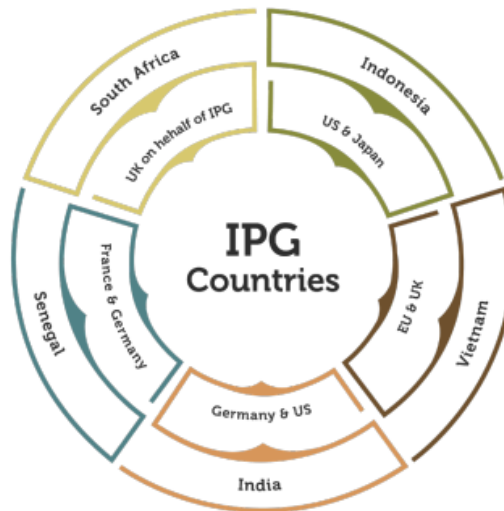
5. International Partner Group (IPG)

International Partners Group (IPG) dapat dilihat sebagai salah satu kemitraan antar negara-negara maju yang berada dalam koridor Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). PGII sendiri merupakan kemitraan bersama negara-negara G7 untuk memajukan investasi publik dan swasta dalam infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, tangguh dan berkualitas. Melalui kemitraan ini G7 akan memobilisasi pendanaan hingga USD 600 miliar pada tahun 2027 dengan tujuan untuk mempersempit kesenjangan investasi di negara-negara mitra.⁵¹ Pendanaan tersebut akan disalurkan melalui berbagai sektor yang mendesak seperti misalnya perubahan iklim dan krisis energi, ketahanan rantai pasokan, konektivitas melalui infrastruktur digital dan jaringan transportasi, kesehatan, serta kesetaraan dan keadilan Gender. Salah satu yang menjadi prioritas pelaksanaan program PGII yaitu mendorong pelaksanaan JETP.

⁵¹ "Factsheet on the G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment" (n.d.), 1, www.mofa.go.jp/file.

IPG dalam mekanisme JETP merupakan sekumpulan negara-negara maju yang memiliki komitmen untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan transisi menuju energi rendah karbon. Pembentukan IPG pertama kali menjadi pembahasan saat pelaksanaan COP 26 di Glasgow, Inggris. Pada forum tersebut, terdapat pembicaraan antara Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris Raya untuk bermitra dengan Afrika selatan melalui skema pendanaan JETP. Selain sebagai Inisiator pembahasan dan tuan rumah pelaksanaan COP26, Inggris kemudian menjadi pemimpin ketika rencana tersebut akhirnya disepakati.

Pasca disepakatinya JETP di Afrika Selatan, IPG menyepakati untuk memperluas jangkauan nya ke negara-negara berkembang lain nya. Antara lain Indonesia, Vietnam, India dan Sinegal. Keanggotaan IPG dapat digambarkan sebagaimana dalam diagram dibawah ini, dimana di lingkaran pertama menggambarkan negara-negara maju sebagai pemimpin JETP, dan di lingkaran kedua yang berada diluar menggambarkan negara-negara penerima JETP yang terdiri dari negara-negara berkembang. Misalnya nya, Mekanisme JETP di Afrika selatan dipimpin oleh Inggris, JETP Indonesia dipimpin oleh Amerika serikat dan jepang, dan di Vietnam dipimpin oleh Uni Eropa dan Inggris.



Gambar 2. 1 Struktur Negara-negara IPG

Sumber:

https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/about_g20/previous-summit-documents/2022-bali/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration,%2015%20November%202022.pdf

B. Argumentasi Utama

Argumentasi utama penelitian ini bahwa Indonesia dan IPG telah mengimplementasikan JETP sebagai sebuah kemitraan ditunjukkan dengan beberapa aktivitas di Indonesia diantaranya pembentukan Sekretariat JETP, mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat luas, dan penyusunan CIPP yang memuat serangkaian kebijakan dan investasi yang mendukung proses JETP termasuk didalamnya rencana pensiun dini PLTU.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis. Menurut Marshal yang dikutip oleh Sarwono, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai “suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.”⁵² Penelitian kualitatif dalam arti luas merujuk pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵³ Sedangkan Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian kualitatif dalam studi hubungan internasional adalah berkontribusi pada pemahaman umum tentang kondisi yang mendukung suatu peristiwa atau hasil, seperti konflik antar negara, bentuk kerjasama yang membatasi kedaulatan, demokratisasi, kebijakan publik redistributif atau progresifitas aktivisme peradilan.⁵⁴

Melalui metode kualitatif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena sosial melalui narasi tertulis. Pada penelitian ini peneliti

⁵² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

⁵³ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (John Wiley & Sons, 2015), https://books.google.co.id/books?id=pONoCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

⁵⁴ Luigi Curini and Robert Franzese, *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations* (1 Oliver's Yard, 55 City Road London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd, 2020), 105, <https://doi.org/10.4135/9781526486387>.

menggambarkan tentang bagaimana implementasi dari JETP yang telah disepakati oleh Indonesia dan IPG pada pelaksanaan G20 di Bali November 2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Seharusnya penelitian ini dilakukan di kementerian dan lembaga yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Sekretariat JETP, Kantor Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, dan PT PLN (Persero). Keempatnya bertempat di Jakarta. Pelaksanaan penelitian ini terhitung sejak tanggal 20 Mei – 20 Juli 2023, Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, peneliti melakukan pencarian secara daring melalui Platform Zoom Meeting. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Adapun untuk waktu pelaksanaan penelitian ini terhitung sejak 20 Mei – 20 Juli 2023.

C. Level Analisis dan Subyek Penelitian

Tingkat analisis dapat membantu penulis dalam memilih dan memilih faktor mana yang harus paling banyak ditekankan. Menurut Patrick Morgan dalam Mochtar Masoed menjelaskan bahwa dalam menganalisis fenomena hubungan internasional yang terjadi terdapat lima tingkatan analisis yang dapat diteliti. Lima tingkatan tersebut meliputi: ⁵⁵

⁵⁵ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 46–47.

1. Perilaku Individu

Fenomena hubungan internasional yang terjadi nyatanya tidak bisa dilepaskan dari perilaku Individu-individu yang saling berinteraksi di dalam nya. Proses interaksi tersebutlah yang mewarnai dinamika hubungan internasional. Sehingga dalam memahami hubungan internasional diperlukan telaah mendalam sikap dan perilaku para aktor pembuat kebijakan yang dapat diamati melalui Kepala pemerintahan, menteri luar negeri penasehat keamanan dan lain sebagainya.

2. Kelompok Individu

Hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat, birokrasi, departemen badan pemerintahan) ikut menentukan bagaimana peristiwa Internasional terjadi.

3. Negara Bangsa

Hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa. Perilaku individu, kelompok, organisasi dan proses perpolitikan suatu negara hanya dapat diperhitungkan sejauh perilaku mereka itu berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan.

4. Kelompok Negara

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Karena itulah unit analisis yang harus ditelaah adalah pengelompokan negara-negara baik regional, aliansi, persekutuan ekonomi, perdagangan, ideologi, pengelompokan dalam PBB dan sebagainya.

5. Sistem Global

Struktur sistem dan perubahan-perubahan yang dialami telah menentukan bagaimana aktor-aktor hubungan internasional bersikap dan berperilaku. Dalam hal ini sistem sebagai sebuah lingkungan telah menentukan perilaku negara bangsa, maka analisis terhadap sistem internasional perlu untuk dipelajari untuk memahami hubungan internasional.

Berdasarkan lima tingkatan analisis yang telah disebutkan diatas, penelitian ini dapat dikaji melalui dua tingkat analisis yaitu Negara dan Kelompok negara. Namun dalam hal ini peneliti menekankan pada analisa kelompok negara, hal ini didasarkan pada fokus penelitian yang peneliti ingin cari jawabannya yaitu implementasi JETP sebagai kemitraan antara pemerintah Indonesia dan IPG. Karena IPG merupakan kelompok negara-negara maju yang berfokus pada isu perubahan iklim maka level analisis nya adalah kelompok negara Adapun subyek penelitian nya adalah Indonesia dan International Partners Group.

D. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik sampling

1. Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif istilah situasi sosial digunakan untuk menggantikan istilah populasi, yang terdiri atas tiga elemen tempat (*Place*), pelaku (*Actor*), dan aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dapat dijelaskan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas dan orang-orang yang ada pada tempat tertentu.⁵⁶

Dalam penelitian ini tempat yang menjadi obyek penelitian adalah Kementerian ESDM dan Sekretariat JETP Indonesia yang keduanya berada di Jakarta. Karena keterbatasan waktu dan pendanaan peneliti hanya dapat melakukan penelitian secara online melalui platform Zoom meeting. Pemilihan kedua tempat tersebut dilakukan dengan pertimbangan kedua tempat tersebut yang merepresentasikan pihak pemerintah Indonesia dalam menjalankan mekanisme JETP. Informan dalam penelitian ini adalah Staf Direktorat EBTKE Kementerian ESDM dan Staf Sekretariat JETP Indonesia. Adapun untuk aktivitas yang ingin diteliti lebih mendalam sesuai dengan topik penelitian adalah Implementasi JETP.

⁵⁶ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Metode Dan Praktik*, 1st ed. (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 52, <http://library.fis.uny.ac.id/digital/fisbook/14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046/index.html#p=61>.

2. Sampel

Terdapat beberapa sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria peneliti yaitu Direktorat EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Maritim dan Investasi, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekretariat JETP dan PLN. Namun dari kelima sampel yang telah peneliti tentukan, peneliti hanya melakukan wawancara dan penggalan data kepada 2 sampel penelitian yaitu Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dan Sekretariat JETP. Hal tersebut dikarenakan terkendala oleh waktu dan pendanaan.

3. Teknik Sampling

Dalam menentukan informan wawancara, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan Purposive Sampling, dimana merupakan teknik sampling yang disengaja karena kualifikasi yang dimiliki oleh individu yang akan diwawancarai. Sederhananya, peneliti memutuskan informasi apa yang perlu diketahui dan menemukan orang-orang yang dapat dan mau menyediakan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.⁵⁷ Selain pengetahuan dan pengalaman dalam metode ini peneliti mempertimbangkan dari segi kemauan untuk berpartisipasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Dengan menggunakan metode tersebut peneliti membuat pertimbangan-pertimbangan logis yang berdasarkan pada tujuan

⁵⁷ Ilker Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.

penelitian tentang Kerjasama Indonesia dan IPG melalui JETP. Sample/Objek yang menjadi sumber data adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan JETP sebagai kemitraan antara Indonesia dan IPG diantaranya adalah: Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Sekretariat JETP dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Roby Kurniawan P.hd, selaku Analis Kebijakan di Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), dengan tujuan mendapatkan Informasi tentang Implementasi Kerjasama yang dilakukan Indonesia melalui Kementerian ESDM dan IPG. Kementerian ESDM juga merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan merumuskan Strategi dalam Transisi energi di Indonesia salah satunya melalui JETP.

Selain itu peneliti, melakukan wawancara dengan Ibu Adhityani Putri selaku Communication Specialist JETP Sekretariat. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Sekretariat JETP sebagai salah satu output kerjasama JETP antara Indonesia dan IPG. Dan di dalam sekretariat juga terdapat beberapa unit teknis yang bekerja dalam koridor JETP untuk menyukseskan implementasinya. Sehingga wawancara dengan pihak JETP akan membantu peneliti lebih jauh tentang Implementasi JETP di lapangan secara teknis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan setidaknya 3 jenis pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara menurut Deddy Mulyana adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lain nya dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan berdasarkan tertentu.⁵⁸ Wawancara dapat menghasilkan banyak informasi, bersifat fleksibel dan dapat diadaptasikan terhadap situasi-situasi individual serta sering kali digunakan manakala tidak ada metode lain yang dimungkinkan atau memadai.⁵⁹

Peneliti juga mencoba menghubungi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan wawancara. Hal tersebut dikarena PT PLN Merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Indonesia dalam realisasi percepatan energi baru terbarukan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya wawancara dengan PT. PLN tidak dapat dilakukan karena sulitnya proses komunikasi, peneliti sudah berusaha menghubungi namun tidak mendapatkan respon dari pihak PT. PLN.

⁵⁸ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lain Nya*, 4th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.), 180.

⁵⁹ Fred N. Kerlinger, *Asas Asas Penelitian Behavioral*, 3rd ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 782.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang didapatkan oleh peneliti berupa dokumen Rencana strategis Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia, Capaian Kinerja ESDM 2022 dan Target 2023, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (PERSERO). Dokumen Perundangan-undangan baik yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM maupun yang dikeluarkan langsung oleh Presiden melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 11 Tahun 2023, lebih lanjut peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa foto/gambar, dan video pemaparan baik dari Kementerian ESDM, maupun PT PLN (Persero).

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lain yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan temuan penelitian.⁶⁰ Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan dilakukan sejak awal peneliti terjun ke

⁶⁰ Robert Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th ed (Boston, Mass: Pearson A & B, 2007), 159.

lokasi penelitian, pengumpulan data, hingga pada akhir penelitian. Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan Model Interaktif Miles, Huberman dan Saljana dimana Proses Analisa data meliputi:⁶¹

1. Kondensasi data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kondensasi data kualitatif dapat dirubah dengan beberapa cara melalui seleksi, melalui ringkasan atau paraphrase, pola yang besar dll.

2. Display/Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Dalam Penyajian data mengharuskan adanya implikasi berupa kondensasi data yang Jelas. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan, bagan dan sebagainya. Di dalam pembahasan BAB IV tentang penyajian data. Penulis akan paparkan beberapa tema yang menurut pandangan penulis akan membantu pembaca dalam memahami urgensi dari isu yang menjadi pembahasan. Secara naratif penulis

⁶¹ Matthew B.Miles, A.Michel Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3 ed. (New Delhi, India: SAGE Publication, t.t.), 10–11.

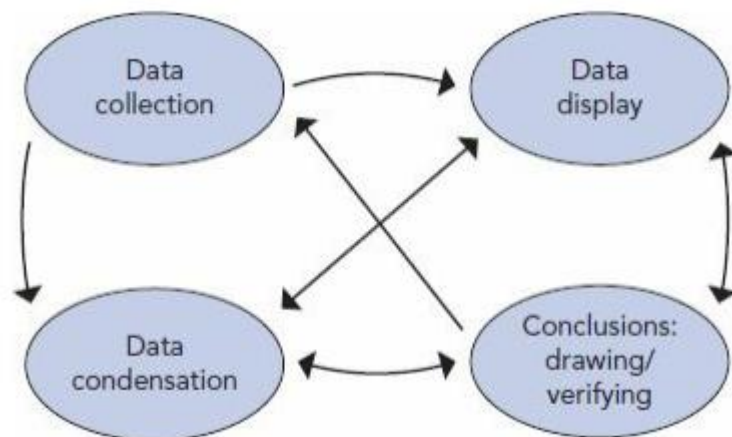
sampaikan gambaran mulai dari tema yang paling umum tentang realisasi transisi energi di Indonesia hingga intisari pembahasan yaitu Implementasi JETP sebagai Kemitraan antara Indonesia – IPG dalam Akselerasi Dekarbonisasi di Indonesia. Penjelasan tersebut akan dilengkapi dengan penyajian diagram maupun tabel.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini dilakukan peneliti dengan mulai melakukan pencarian arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan dimulai dari hal yang belum jelas meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kuat.

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan verifikasi data dengan melakukan pencarian data ke beberapa instansi pemerintahan dengan melakukan wawancara dan observasi data.

Wawancara sendiri peneliti lakukan dengan kepada Direktorat Konservasi Sumber Daya dan Energi Mineral Kementerian ESDM dan Sekretariat JETP. Adapun secara sederhana Analisis data model Miles, Huberman and Saljana dapat digambarkan sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif: Miles, Huberman & Saljana

Sumber: Matthew B.Miles, A.Michel Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3 ed. (New Delhi, India: SAGE Publication, t.t.), 10–11.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan langkah-langka teknis seperti memperpanjang durasi penelitian dan memastikan kecukupan data. Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena nya peneliti memperpanjang durasi penelitian. Penelitian ini pada mulanya dimulai pada bulan Juni 2023 dan diperkirakan akan selesai di bulan Juli 2023. Namun dalam proses nya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Robi Kurniawan pada tanggal 5 Juli 2023, dan kembali melakukan penelitian dengan Ibu Adhityani Pada 29 Agustus 2023. Tidak hanya itu peneliti juga berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan topik penelitian diantaranya adalah dokumen CIPP. Peneliti menunggu hingga dokumen tersebut diluncurkan pada 16 Agustus 2023. Namun, pada kenyataannya terdapat penundaan peresmian dokumen CIPP hingga akhir tahun 2023 dikarenakan masih banyaknya informasi yang harus dimasukkan. Selain memperpanjang durasi penelitian peneliti juga memastikan kecukupan referensi. Peneliti memperbanyak referensi yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan untuk membantu peneliti dalam menguji hasil dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi baik. Sedangkan untuk langkah untuk memastikan keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.

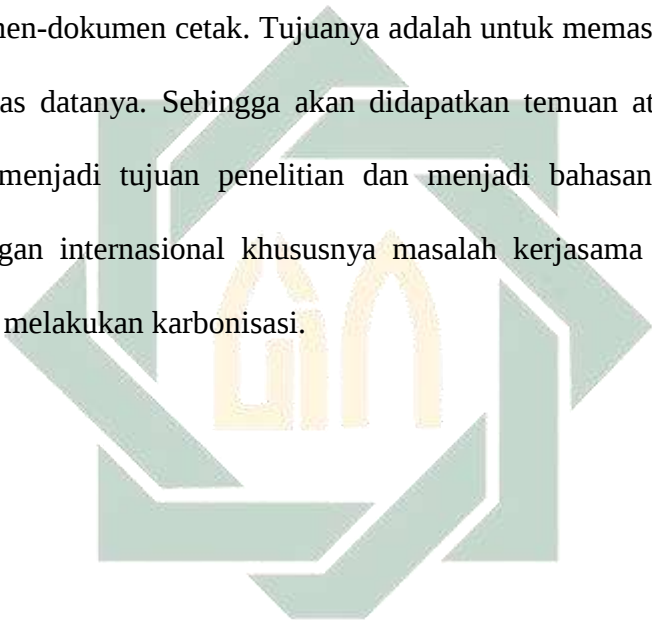
1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Menurut Olsen, Triangulasi diartikan sebagai pencampuran data atau metode sehingga beragam sudut pandang dapat menjelaskan suatu topik.⁶² Triangulasi berfungsi untuk memastikan kebenaran suatu data melalui berbagai instrument baik teori, dokumentasi maupun narasumber.

Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan peneliti dengan melakukan peninjauan kembali sumber-sumber data yang telah

⁶² Wendy Olsen, "Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed," *Developments in Sociology* 20 (January 1, 2004): 103–18.

didapatkan, data-data dan teknik pengumpulan data. Sumber Data yang telah dikumpulkan kemudian ditinjau kembali dengan membaca secara detail transkrip wawancara, melihat catatan-catatan penelitian, untuk mengetahui apakah masih ada atau tidak data yang diambil. Selanjutnya dalam rangka melakukan *cross-check* peneliti juga melihat data-data yang telah didapatkan dari beberapa dokumen dari website, maupun dokumen-dokumen cetak. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas validitas datanya. Sehingga akan didapatkan temuan atau poin-poin yang menjadi tujuan penelitian dan menjadi bahasan baru dalam hubungan internasional khususnya masalah kerjasama antar negara dalam melakukan karbonisasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. JETP sebagai Kemitraan antara Indonesia dan IPG

1. Latar Belakang Kemitraan JETP di Indonesia

Indonesia merupakan negara kedua yang menyepakati pendanaan transisi energi dengan mekanisme JETP, setelah sebelumnya Afrika Selatan. Kesepakatan tersebut dicapai setelah beberapa langkah negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui beberapa forum internasional diantaranya adalah COP UNFCCC 26 di Inggris dan presidensi G-20 Indonesia. Pada forum COP UNFCCC, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan berkontribusi lebih cepat dari target Net Zero Emission global, dengan serangkaian upaya yang telah dilakukan, kemudian presiden juga mempertanyakan komitmen negara maju untuk membantu Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam pidatonya: “Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya.”

Setelah pelaksanaan UNFCCC COP26, Negara-negara yang tergabung dalam G7, mengadakan KTT G7 di Jerman pada tanggal 27 Juni 2022. Salah Satu pembahasan dalam forum tersebut adalah meneruskan pelaksanaan JETP di Indonesia dan beberapa negara lain

nya. Indonesia kemudian menyepakati JETP ditengah-tengah pelaksanaan KTT G20 di Bali. Disepakati nya JETP oleh pemerintah Indonesia menandakan bahwa Indonesia berkomitmen dalam mencapai target net zero emission yang di targetkan terjadi pada 2060 atau lebih cepat. JETP bagi Indonesia merupakan *akselerator* dan *katalisator* bagi penurunan emisi global dalam mendukung SDGs dan visi Indonesia emas 2045. Kesuksesan dalam pelaksanaan JETP di Indonesia akan menunjukkan bahwa model JETP dapat dijalankan, untuk mendorong kemitraan serupa di negara berkembang lain nya, Sedangkan kegagalan akan merusak konsep JETP dan menghambat upaya negara berkembang lainnya.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi kemitraan Indonesia dan IPG melalui mekanisme JETP, diantaranya:

Pertama adalah Indonesia telah mengadopsi transisi energi sebagai salah satu strategi kunci untuk mencapai ekonomi hijau. Terdapat beberapa kebijakan dan rencana yang telah disusun untuk bertransisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan yang ditujukan untuk mencapai ekonomi hijau. Misalnya dengan keluarnya Perpres no.112 tahun 2022 tentang percepatan transisi energi. Komitmen menjadikan transisi energi sebagai langkah untuk mencapai ekonomi hijau juga ditegaskan oleh pemerintah Indonesia pada perhelatan COP UNFCCC ke 27 Mesir.

Kedua adalah adanya kebutuhan pendanaan yang besar untuk transisi energi di Indonesia. Pelaksanaan transisi energi di Indonesia mengalami hambatan terutama dari segi besarnya pendanaan. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, Indonesia membutuhkan investasi untuk transisi energi kurang lebih sebesar 1.108 miliar USD atau 28 miliar per tahun, dengan rincian USD 995 miliar dialokasikan untuk pengembangan pembangkit energi baru terbarukan dan USD 113 Miliar untuk melakukan transmisi.⁶³ Pembiayaan dengan jumlah besar tersebut mustahil untuk diperoleh tanpa bantuan dari negara-negara lain. Oleh karena nya membangun kemitraan dengan negara-negara maju menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. JETP akan membantu Indonesia dalam mencapai target NDC yang telah ditetapkan, melalui bantuan yang bersifat pendanaan maupun teknis. Pembiayaan sebesar USD 20 miliar yang dijanjikan akan membantu mempercepat proses transisi energi di Indonesia.

Ketiga adanya desakan kepada negara maju untuk membantu negara berkembang dalam upaya mengurangi emisi global, sebagai bagian dari pelaksanaan paris agreement. Desakan tersebut muncul pada saat pelaksanaan COP UNFCCC 26 di Inggris. Melalui forum tersebut mengamanatkan bahwa negara maju sebagai salah satu penyumbang emisi global terbesar untuk mengeluarkan pendanaan sebesar 100

⁶³ Dadan Kusdiana, "Enabling High Share Of Renewable Energy In Indonesia's Power System" (Jakarta, November 24, 2022), 6.

milyar pertahun untuk mengurangi emisi di negara berkembang. JETP merupakan bagian dari *social responsibility* negara maju atas dampak lingkungan yang telah terjadi akibat banyaknya sektor perindustrian.

Indonesia dipilih sebagai penerima JETP dengan alasan bahwa Indonesia telah banyak menunjukkan komitmen seriusnya untuk mengurangi jumlah emisi di negara nya. Hal tersebut dibuktikan dengan target ambisius yang ditetapkan pemerintah Indonesia melalui NDC terbaru nya. Indonesia juga mempunyai sumberdaya energi baru terbarukan yang melimpah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. JETP sebagai kemitraan akan memaksimalkan potensi tersebut untuk lingkungan yang berkelanjutan.

Keempat kebutuhan mendesak untuk menyegerakan aksi iklim di kancah internasional. Peningkatan jumlah emisi global yang berdampak pada perubahan iklim, semakin mendesak negara-negara dunia untuk mencari solusi yang efektif dalam hal ini salah satu strategi kuncinya adalah transisi energi. Penurunan gas rumah kaca yang terus berlangsung dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat jadi tahun 2030 disepakati beberapa milestone global. Dalam hal ini Indonesia ingin mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu dhitry⁶⁴

Nah dengan demikian di Indonesia ingin turut berpartisipasi dalam Global climates action dengan meningkatkan ambisi transisi energi nya secara signifikan. Nah itu jadikan ada

⁶⁴ Adhityani Putri, wawancara oleh peneliti 29 Agustus 2023.

kebutuhan adanya support untuk melakukan itu dengan lebih cepat daripada rencana nasional sebelumnya

2. Proses Penandatanganan Mekanisme JETP di Indonesia

Presidency G20 Indonesia yang mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*, telah menghasilkan mekanisme baru dalam transisi energi di Indonesia yaitu melalui JETP. Sebelumnya pembahasan transisi energi, menjadi salah satu dari tiga prioritas utama dalam presidensi G-20 bersama dengan dua isu lainnya yaitu ekonomi global dan tata kelola kesehatan global yang berkeadilan. Pemilihan isu transisi energi sebagai prioritas pembahasan dalam Forum G20 mengindikasikan bahwa Indonesia melihat pentingnya untuk mencapai kesepakatan dalam mempercepat transisi energi global. Pemilihan isu tersebut juga menunjukkan komitmen besar Indonesia kepada masyarakat global untuk segera melakukan transisi energi.

Pembahasan transisi energi pada Presidency G20 Indonesia, diawali dengan rangkaian agenda yang secara khusus membahas tentang transisi energi, yaitu Energi Transition Working Group (ETWG). Forum tersebut diadakan tiga kali selama presidensi. ETWG 1 digelar pada tanggal 24-25 Maret 2022 di Yogyakarta, selanjutnya ETWG ke 2 di Labuan Bajo pada tanggal 23-25 Juni 2022, dan terakhir diadakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2022. Menurut Hassan dkk., dalam Poppy S. Winanti dan Wawan Mas'udi, sebagai hasil dari pelaksanaan ETWG beberapa hal telah berfokus pada topik

terkait akses energi yang mencakup ketersediaan energi modern dan berkelanjutan serta transisi energi di negara kepulauan; *kedua*, peningkatan teknologi bersih dan yang mencakup efisiensi energi, sistem energi emisi rendah dan permintaan energi yang meningkat dan *ketiga* pendanaan transisi energi.⁶⁵ Forum ETWG ke-3 kemudian dilanjutkan dengan gelaran Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM), yaitu pertemuan level menteri terkait transisi energi yang berlangsung di tempat yang sama dengan ETWG pada tanggal 2 September 2022.⁶⁶

Selanjutnya ditengah-tengah berlangsung nya KTT G20 Indonesia, Beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo, Presiden Biden dan Komisi Uni Eropa, Ursula Van der Layen bersama-sama meluncurkan PGII, sebagai upaya pengembangan infrastruktur dan investasi. Selanjutnya, pertemuan PGII ini dilanjutkan bersama kedua pemimpin tersebut dipimpin oleh Menteri perekonomian Airlangga Hartanto, Presiden Joko Widodo saat itu memiliki agenda lain. Hasil dari pertemuan PGII, tersebut diumumkan adanya peluang kerja sama yang di dalamnya termasuk JETP atau kemitraan untuk transisi yang berkeadilan.⁶⁷

⁶⁵ Poppy S. Winanti and Wawan Mas'udi, *G20 DI TENGAH PERUBAHAN BESAR: MOMENTUM KEPEMIMPINAN GLOBAL INDONESIA?* (UGM PRESS, 2023), 128.

⁶⁶ "KESDM Percepat Transisi Energi dengan Menggelar Forum ETWG 3 di Bali," Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, accessed August 11, 2023, <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/kesdm-percepat-transisi-energi-dengan-menggelar-forum-etwg-3-di-bali>.

⁶⁷ "Indonesia Manfaatkan Program PGII Baru dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur, Koridor Ekonomi, dan Konektivitas - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Kemudian pada 15 November 2022, bertempat di Bali, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Para Pemimpin dunia dari Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris, mengumumkan peluncuran Kemitraan JETP di Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama JETP oleh negara-negara mitra IPG. Untuk selanjutnya pelaksanaan JETP di Indonesia akan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kedua nya dipilih karena memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia. Baik Amerika maupun Jepang sama-sama memiliki riwayat kerjasama yang erat baik dalam sektor transisi energi maupun lainnya.

Pada saat peresmian JETP, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam penggunaan transisi energi untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Indonesia akan melaksanakan JETP dengan maksimal untuk mencapai target yang telah dijanjikan. Presiden juga berharap kemitraan yang disepakati tersebut menjadi percontohan bagi komunitas global dan dapat diaplikasikan untuk membantu tujuan iklim yang baik melalui tindakan kolaboratif yang nyata.⁶⁸

Indonesia,” accessed August 9, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5147/indonesia-manfaatkan-program-pgii-baru-dalam-mendorong-pembangunan-infrastruktur-koridor-ekonomi-dan-konektivitas>.

⁶⁸ “JETP: UE Dan Mitra Internasional Meluncurkan Kemitraan Inovatif Dengan Indonesia – INSIGHT EU MONITORING,” accessed July 24, 2023, https://portal.ieu-monitoring.com/editorial/jetp-eu-and-international-partners-launch-ground-breaking-partnership-with-indonesia/393772?utm_source=ieu-portal.

Dokumen Joint Statement tersebut berisikan 3 pembahasan diantaranya pengantar, maksud dan tujuan serta lampiran yang berisikan rencana kerja kemitraan JETP dalam 3 – 6 bulan kedepan. Pernyataan yang ditandatangani bersama tersebut, dapat dilihat sebagai komitmen politik antara Indonesia dan IPG dan bukan merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat. Artinya kemitraan antara Indonesia dan IPG bersifat luwes secara yuridis, tidak ada aturan yang mengatur tentang sanksi bagi negara yang tidak menjalankan komitmennya. Hal tersebut juga lah menjadi ciri khas dari kemitraan ini.

Pembahasan awal dalam Joint Statement menjelaskan tentang latar belakang JETP di Indonesia. Pembahasan tersebut pada intinya adalah bahwa negara mitra IPG menyadari urgensi dekarbonisasi dan dalam upaya memitigasi perubahan iklim, diperlukan upaya kerjasama dan kemitraan jangka panjang. Hal tersebut untuk mendukung transisi yang teratur, adil dan terjangkau menuju emisi gas rumah kaca rendah. Oleh karena nya pentingnya untuk meningkatkan kerjasama, termasuk pendanaan dari berbagai sumber, bantuan teknis dan pengembangan sumberdaya manusia terutama di Indonesia. JETP dengan beberapa keunggulannya dapat membantu mempercepat dekarbonisasi di Indonesia.

Joint Statement tersebut juga menjelaskan tentang tujuan JETP sebagai kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan IPG diantaranya adalah:⁶⁹

1. Emisi sektor ketenagalistrikan memuncak pada tahun 2030 dengan nilai absolut 290 MT CO₂, dan segera menurun setelahnya pada lintasan yang ambisius dan mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050, termasuk dengan penghentian batubara, bergantung pada dukungan internasional
2. Mempercepat pemanfaatan energi terbarukan terdiri dari setidaknya 34% dari semua pembangkit listrik pada tahun 2030
3. Mempercepat pengembangan industri lokal yang dinamis dan kompetitif dalam energi terbarukan dan efisiensi energi, sebagaimana mestinya dan memungkinkan, dengan berinvestasi pada kapasitas dan pengetahuan teknologi lokal bekerja sama dengan IPG.
4. Mempercepat penyebaran alat, teknologi, dan reformasi efisiensi energi dan elektrifikasi energi secara luas, termasuk melalui standar untuk mengakses penghematan energi dan biaya yang dihasilkan dengan dukungan dari IPG.
5. Mempercepat dengan dukungan IPG, pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara sebagai prioritas dan diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam rencana investasi dan kebijakan JETP sebagai elemen yang diperlukan untuk mencapai target tersebut,
6. Memobilisasi USD 20 Miliar selama tiga sampai lima tahun kedepan melalui kemitraan, dimana USD 10 miliar akan dimobilisasi oleh anggota IPG. Bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan IPG, para anggota Kelompok Kerja GFANZ akan bekerja untuk memobilisasi dan memfasilitasi setidaknya US\$ 10 Miliar pendanaan swasta untuk mendukung jalur transisi dan rencana investasi yang ambisius.

Sebagai langkah dalam mengimplementasikan JETP, sebagaimana tujuan diatas, didalam lampiran Joint statement terdapat beberapa rencana aksi kemitraan. Rencana aksi tersebut terbagi dalam

⁶⁹ "Joint Statement of JETP Indonesia" (2023).

rencana kemitraan 3 bulan dan 6 bulan dari peresmian JETP, yang memuat beberapa hal seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Rencana aksi kemitraan JETP dalam 3 bulan

Rencana Aksi dalam 3 bulan				
No.				
1.	Bangunan Roadmap	Keputusan dan ruang lingkup tindakan dan tujuan		
2.	Stakeholder, Sumberdaya dan Pemetaan	Dialog politik terbuka tentang Just Energy Transition (dengan melibatkan masyarakat sosial, sektor swasta dll.)	Finalisasi sumber pembiayaan untuk proyek tertentu	Strategi yang jelas untuk identifikasi sektor swasta
3.	Struktur dan Review	Pembentukan Sekretariat	Platform koordinasi di tetapkan	Pembaruan tentang kemajuan kemitraan
4.	Kebijakan dan Perencanaan Keuangan	Rumuskan persyaratan Pembiayaan	Pengaturan dukungan finansial dan teknis yang berkelanjutan untuk mendukung transisi energi yang lebih menuju Net Zero Emission	Mengembangkan strategi reformasi kebijakan untuk mengkatalisasi kebijakan

S U R A B A Y A
Sumber: www.germanwatch.org ⁷⁰

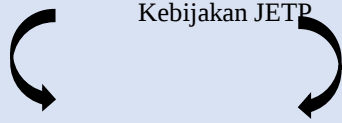
Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa, terdapat beberapa rencana kerja kemitraan yang harus dijalankan mulai dari tiga bulan setelah pengumuman JETP, meliputi: *pertama*, dialog terbuka tentang

⁷⁰ German Watch, "The Implementation of JETP in Indonesia from the Perspective of Civil Society Organisations," accessed September 11, 2023, <https://www.germanwatch.org/en/88125>.

Just Energi Transition (transisi yang adil) dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta, kedua pembentukan sekretariat JETP. Adapun untuk kerangka kerja kemitraan lainnya seperti mengembangkan strategi reformasi kebijakan untuk mengkatalisasi investasi, pengaturan dukungan finansial dan teknis yang berkelanjutan untuk mendukung transisi energi yang lebih menuju Net Zero Emission akan menjadi salah satu pembahasan dalam dokumen CIPP. Sedangkan rencana 6 Bulan pasca di umumkan nya JETP merupakan pengembangan dari rencana kemitraan yang telah dijalankan sebelumnya. Output yang akan dihasilkan adalah dokumen CIPP, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 4. 2 Rencana Aksi Kemitraan JETP dalam 6 Bulan

No.	Rencana Aksi dalam 6 Bulan		
1.	Bangunan Roadmap	Pengembangan peta jalan untuk kemampuan manufaktur terbarukan dalam negeri yang membahas prasyarat konten lokal	Pembentukan peta jalan sektor ketenagalistrikan untuk tahun 2030 yang sejalan dengan target Net Zero Emission
2.	Stakeholder, Sumberdaya dan Pemetaan	Mengembangkan strategi untuk meningkatkan sumberdaya keuangan lebih lanjut	Identifikasi potensi instrumen pembiayaan dan kebijakan untuk PLN dan anak perusahaan terkait
3.	Struktur dan Review	Mengembangkan proses tinjauan 2 tahun untuk menilai target pernyataan bersama dan komitmen batubara	

4.	Kebijakan dan Perencanaan Keuangan	Pembentukan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP 	
5.	Implementasi	Pengembangan program kerja penuh berdasarkan investasi JETP dan Rencana kebijakan	Penetapan rencana untuk mempercepat pensiun dini atau menghindari pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara on dan off grid sebelum tahun 2030.

Sumber: www.germanwatch.org ⁷¹

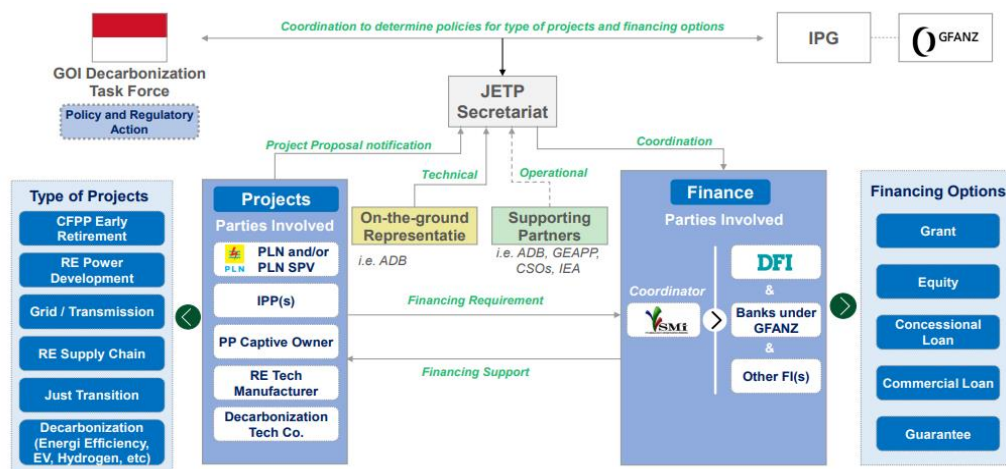
Untuk lebih memudahkan proses koordinasi dalam pengimplementasian JETP, terdapat 3 tingkatan dalam struktur tata kelola JETP, yaitu *lapisan kebijakan Indonesia decarbonization task force* dan *IPG task force*, sekretariat JETP dan pelaksanaan proyek.⁷² Di lapisan paling atas, *Indonesia decarbonization task force* dan *IPG task force* akan bekerjasama dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai penyusun dan pelaksana regulasi terkait transisi energi. *Indonesia decarbonization task force* dalam hal ini meliputi beberapa kementerian yang dipimpin oleh kementerian ESDM. Lapisan ini memiliki kewenangan yang paling tinggi dalam pelaksanaan JETP.

⁷¹ German Watch, "The Implementation of JETP in Indonesia from the Perspective of Civil Society Organisations," accessed September 11, 2023, <https://www.germanwatch.org/en/88125>.

⁷² ESDM, "Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi," ESDM, accessed May 29, 2023, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>.

Selanjutnya, di lapisan kedua terdapat sekretariat JETP yang nanti nya akan membantu mengkoordinasikan arah dan tim gugus dan teknis pelaksanaan JETP termasuk didalamnya proyek-proyek yang akan dijalankan. Sekretariat JETP akan membantu proses koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan. Di dalam sekretariat ini kemudian di bentuk beberapa working group (kelompok kerja) utama yang akan bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya.

Kemudian di lapisan terakhir, yaitu pelaksanaan proyek, akan dipimpin oleh PLN dibantu dengan Perusahaan listrik dunia lainnya seperti IPPs, PP Captive Owner, Re Tech Manufacture, dan Decarbonization Tech. Co. Proyek yang akan dijalankan dibawah mekanisme JETP meliputi pensiun dini PLTU, pengembangan PLT energi terbarukan, jaringan/transmisi, rantai suplai energi terbarukan, efisiensi energi dan transisi yang adil. Pelaksanaan proyek tersebut akan berkoordinasi PT SMI, dengan PT. SMI sebagai *country platform* untuk mendapatkan suntikan pembiayaan. PT SMI juga akan bermitra dengan GFANZ, yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquire, MUFG dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lain nya. Untuk lebih jelas terkait alur kerja JETP, dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 4. 1 Alur Kerja JETP
Sumber: Kementerian ESDM 2023⁷³

3. Manfaat Mekanisme JETP

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Bagi pemerintah Indonesia kemitraan dengan IPG melalui pelaksanaan JETP memberikan berbagai manfaat diantaranya :

Pertama, mempercepat target dekarbonisasi. Sebagaimana tujuan utama kemitraan ini, akan membantu mengakselerasi dekarbonisasi di Indonesia. JETP memungkinkan target Net Zero Emission di Indonesia dapat dipercepat dari target semula di tahun 2060 menjadi 2050. Begitu pun juga dengan penggunaan energi terbarukan akan semakin meningkat seiring dengan penghentian beberapa PLTU yang masih menggunakan sumber energi fosil.

⁷³ Utomo, "Energy Transition Financing Through JETP & ETM."

Kedua, bagi Indonesia, JETP tidak hanya membuka peluang untuk sekedar beralih dari energi batu bara yang kotor namun lebih jauh akan meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.⁷⁴ Kemitraan JETP akan membuka ruang bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor energi. Tentunya untuk menarik perhatian para investor yang akan mendanai proses transisi energi yang berkeadilan, Indonesia perlu menyiapkan regulasi yang ramah untuk investor. Regulasi tersebut memberikan keunggulan-keunggulan melakukan investasi di Indonesia.

Ketiga JETP, dapat membantu mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin yang rentan terhadap potensi gangguan dari transisi energi. Mekanisme JETP telah membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat luas, misalnya teknisi panel surya, teknisi di perusahaan pembangkit listrik EBT dan menjadi bagian dari pekerja di sektor EBT baik administratif, maupun non administratif. Konsep transisi yang adil juga menjadi jaminan bagi masyarakat miskin khususnya dari dampak transisi energi.

Keempat meningkatkan ekonomi hijau. Dipercepatnya transisi energi berarti akan lebih cepat bagi Indonesia untuk menuju

⁷⁴ © Universitas Stanford, Stanford, and California 94305, "The High Stakes of Indonesia's \$20 Billion Just Energy Transition," August 4, 2023, <https://aparc.fsi.stanford.edu/news/high-stakes-indonesias-20-billion-just-energy-transition-partnership>.

ekonomi hijau. Dengan bantuan internasional diharapkan Indonesia dapat mengakses permodalan dengan bunga rendah dan dapat mengkatalisasi investasi hijau yang jauh lebih besar. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan pendanaan untuk seluruh climate changes di Indonesia sangat besar, sudah mencapai kebutuhan *hundred billion USD*, hingga tahun 2030 dan akan lebih besar setelahnya.⁷⁵

b. Bagi Negara Mitra IPG

Selain memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia, hubungan kemitraan melalui JETP juga memberikan manfaat bagi negara-negara mitra IPG, selaku pihak yang memberikan sumbangan pendanaan maupun teknis. Adapun manfaat yang didapatkan bagi negara mitra IPG yaitu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, negara-negara mitra tersebut mendapatkan keuntungan dari pendanaan yang dialokasikan melalui program JETP. Hal tersebut dikarenakan, jika melihat dari struktur pendanaan yang ada sebagian besar diberikan dalam bentuk loan (pinjaman), dan hanya 1,4% dari pembiayaan tersebut yang berbentuk hibah untuk Indonesia. Artinya 1,4 % dari 20 Miliar USD berbentuk hibah dan sisanya dalam bentuk loan, guarantee dll. Jadi negara-negara mitra tidak secara cuma-cuma mendanai program JETP untuk

⁷⁵ Adhityani Putri, Wawancara oleh peneliti, 29 Agustus 2023.

Indonesia. Hal tersebut seperti yang ditegaskan melalui wawancara dengan bapak Robi,⁷⁶

Bukan sebatas itu justru mereka dapatnya dari situ kan, karena skemanya yang berupa grand berupa hibah cuma 1,4%, Jadi dari 20 Miliar USD 1,4% nya yang hibah yang lain sisanya itu dalam bentuk loan, guarantee dan segala macam.

Kedua, turut berkontribusi terhadap penegakan keadilan iklim Global. Hal tersebut karena negara-negara IPG itu memiliki kewajiban untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di negara berkembang dalam konteks keadilan iklim. JETP merupakan kesempatan besar bagi negara-negara maju untuk mengembalikan kepercayaan dimata dunia akan komitmen nya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Citra negara maju dalam hal ini akan menjadi baik seiring dengan kontribusinya dalam perubahan iklim global.

Ketiga, Indonesia membuka peluang bisnis bagi negara mitra IPG. Besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia dan adanya kebutuhan akan permintaan energi yang meningkat di negara maju menjadikan Indonesia sebagai peluang bisnis yang cukup menguntungkan. Jadi bagi negara-negara IPG Indonesia itu merepresentasikan peluang bisnis bagi para pelaku energi terbarukan dari negara ini Baik investor maupun pelaku usaha lainnya gitu

⁷⁶ Robi Kurniawan, wawancara dengan peneliti, 5 juli 2023.

B. Implementasi JETP sebagai kemitraan Indonesia dan IPG

Dalam melaksanakan mekanisme JETP terdapat beberapa pihak yang akan dilibatkan baik pihak internal maupun eksternal. Pihak internal melibatkan beberapa kementerian dan BUMN, diantaranya yaitu: Kementerian ESDM, Kementerian Ekonomi Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Keuangan, BUMN itu dan termasuk didalamnya PLN karena sebagian besar PLTU yang akan di pensiun dinikan dalam pengawasan PLN. Sedangkan pihak eksternal yaitu negara-negara mitra IPG dan beberapa mitra pembangunan misalnya EAI dan IDB. Hal tersebut sebagaimana di yang dikatakan oleh Bapak Robi⁷⁷

Kalau dari pihak terkait, Pemerintah misalnya yah Kementerian ESDM, Kementerian Kemenko Marves, Kementerian Keuangan, BUMN itu termasuk disitu kemudian PLN ya karena sebagian besar PLTU yang akan di pensiun dinikan kan milik PLN kemudian kalau dari eksternal dari negara lain ya negara-negara yang tergabung dalam IPG tentu saja ada beberapa Mitra Pembangunan seperti EAI dan ADB

Mekanisme JETP akan diselaraskan bersama dengan pendanaan transisi energi lainnya seperti ETM melalui Satuan tugas (Satgas) Transisi Energi yang akan segera diumumkan. Satgas ini terdiri atas eselon 1 di lintas kementerian dan dipimpin oleh Deputi 3 Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Bapak Rachmat Kaimuddin.⁷⁸

⁷⁷ Robi Kurniawan, wawancara oleh peneliti, 20 maret 2023.

⁷⁸ Adhityani Putri, wawancara oleh peneliti, 29 Agustus 2023

Dalam perkembangannya, sejak komitmen bersama disepakati antara Indonesia dan IPG, terdapat beberapa pelaksanaan JETP di Indonesia diantaranya;

1. Implementasi dalam 3 bulan

a. Dialog Politik Terbuka

Dialog yang melibatkan masyarakat luas menjadi prasyarat dalam pelaksanaan JETP sebagaimana tercantum dalam komitmen bersama JETP, yang berbunyi “Menyelesaikan dialog politik inklusif tentang percepatan dan transisi energi yang adil (termasuk aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan sektor swasta).”⁷⁹ Masyarakat menurut pernyataan tersebut harus dilibatkan dalam sosialisasi dan pengambilan kebijakan terkait transisi energi yang adil. Untuk melaksanakan prasyarat tersebut Pemerintah Indonesia telah mengadakan beberapa kali dialog membahas tentang Just Energi Transition, baik yang diadakan oleh Sekretariat JETP, PLN, maupun yang diadakan oleh beberapa kementerian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Robi⁸⁰

“Untuk dialog sebenarnya kita lakukan secara paralel dengan berbagai pihak mungkin kalau mas Ibnu nyimak yang dilakukan bulan lalu belum lama ini PLN yang mengadakan PLN sebagai posed, Nah itu mengundang berbagai pihak berbagai macam topik di diskusikan termasuk misalnya JETP”

⁷⁹ Joint Statement of JETP Indonesia.

⁸⁰ Robi Kurniawan wawancara oleh peneliti, 5 Juli 2023

Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat JETP telah mengadakan dialog dengan masyarakat sipil di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2023. Pertemuan tersebut mengundang elemen masyarakat sipil, lembaga antar pemerintah dan/atau internasional serta perwakilan IPG. Selain sebagai sarana untuk mendiskusikan tentang transisi energi yang ada di Indonesia, forum tersebut juga sebagai edukasi bagi masyarakat tentang JETP. Terdapat 40 organisasi masyarakat sipil yang memberikan masukan dalam konteks percepatan transisi energi melalui mekanisme JETP.⁸¹ Sebagaimana terlihat di dalam gambar dibawah ini.



Gambar 4. 2 Diskusi Publik Sekretariat JETP

Sumber: Katadata.co.id⁸²

⁸¹ Suara.com, "Keadilan Terancam Dimarginalkan Dalam Rencana Percepatan Transisi Energi Indonesia," diakses June 24, 2023, <https://www.suara.com/bisnis/2023/06/24/174010/keadilan-terancam-dimarginalkan-dalam-rencana-percepatan-transisi-energi-indonesia>.

⁸² Katadata.Co.Id, "Sekretariat JETP: Rencana Investasi CIPP Akan Melibatkan Masyarakat - Investasi Hijau accessed September 11, 2023, <https://katadata.co.id/rezzaaji/ekonomi-hijau/6488539fd0014/sekretariat-jetp-rencana-investasi-cipp-akan-melibatkan-masyarakat>.

Pertemuan tersebut dimulai dengan sosialisasi dari pihak pemerintah dan sekretariat JETP. Kemudian untuk lebih memberikan pemahaman dilakukan diskusi terarah yang dipimpin oleh Sekretariat JETP dan dibagi kedalam lima kelompok fokus investasi JETP, yaitu: Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, pemensiunan dini PLTU Batubara, percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe variabel dan pembangunan rantai pasok energi terbarukan.

Melalui pelaksanaan dialog tersebut terdapat banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat sipil dalam melakukan transisi energi diantara:

- a. Perlu perubahan paradigma dalam melakukan transisi energi yaitu agar energi dapat berpusat pada rakyat dan lingkungan (People and planet centered energy)
- b. Perlu nya pendekatan kehati-hatian dan pencegahan
- c. Perlunya keterbukaan informasi terkait penyusunan pendanaan JETP yang akan dirumuskan dalam CIPP

Diskusi terbuka juga dilakukan oleh PT PLN, salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia tersebut mengadakan Forum Group Discussion (FGD) *JETP Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) bertempat di Jakarta pada 15-16 Juni 2023. Forum tersebut diikuti oleh perwakilan sekretariat JETP, Kementerian ESDM dan Kemenkomarves. Forum tersebut dibuka

oleh Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Forum tersebut membahas tentang kesiapan beberapa pihak yang terlibat dalam menjalankan skema JETP. Misalnya PLN dalam hal ini telah menyiapkan lebih dari 522 proyek yang potensial dibiayai oleh JETP. Sekretariat JETP dalam hal ini siap untuk menjadi penengah dalam pelaksanaan JETP, dalam artian siap memfasilitasi terlaksananya JETP.

Selain Sekretariat JETP dan PLN, dialog yang melibatkan masyarakat sipil dilakukan juga oleh Institut for Essential Service Reform (IESR). IESR merupakan lembaga penelitian dan advokasi kebijakan energi dan lingkungan hidup. IESR telah mengadakan beberapa webinar yang bertemakan transisi energi, baik dari segi manfaat, proses dan pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan. Acara yang diadakan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat Indonesia dalam aspek keadilan transisi energi di Indonesia. Salah satu acara yang dilaksanakan misalnya bertajuk “*Solar Energy Talks: Technology, Policy and Challenges of Solar Energy in Support Just Energy Transition Partnership (JETP) and Net Zero Emissions (NZE)*” yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2023, melalui platform Zoom meeting. Webinar tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi antara lain Wakil Presiden Transisi Energi dan Keberlanjutan PLN, Salah Satu dosen dari Universitas College London, dan Koordinator Pelayanan

dan Pengawasan Usaha Aneka EBT Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Pelaksanaan Dialog dengan masyarakat sipil merupakan implementasi dari kesepakatan bersama JETP antara pemerintah Indonesia dan IPG, seperti yang tertera pada pasal satu dan kesepakatan tersebut menyelesaikan dialog politik inklusif tentang percepatan dan transisi energi yang adil. Dialog politik melibatkan aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan sektor swasta. Dialog publik memungkinkan untuk mewadahi berbagai kepentingan dari masyarakat luas yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian pelaksanaan Dialog masyarakat sipil sebagai prasyarat dari JETP telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia maupun institusi swasta. Namun peneliti melihat bahwa dalam melakukan dialog terbuka dengan masyarakat sipil, Intensitas dialog yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia masih sangat terbatas. Hal tersebut bisa dilihat dengan perbandingan dengan Lembaga swasta seperti IESR yang hampir mengadakan dialog melalui forum webinar yang rutin dilakukan selama hampir 2 kali dalam satu bulan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik melalui Kementerian ESDM maupun Sekretariat JETP yang hanya mengadakan beberapa kali selama 6 bulan sejak disepakatinya JETP.

Dalam hal ini sekretariat JETP telah mengkonfirmasi bahwa intensitas diskusi akan diperbanyak pada saat dokumen CIPP telah direview oleh pemerintah dan IPG. Pemerintah akan menyediakan masa konsultasi publik selama 12 hari, yang dimana dalam rentang waktu tersebut juga akan diadakan dialog publik baik virtual maupun offline.⁸³ Walaupun singkat waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setidaknya untuk menyampaikan saran atau aspirasi nya terkait pelaksanaan JETP, khususnya bagaimana memastikan keadilan JETP baik bagi masyarakat di akar rumput maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dialog dengan masyarakat sipil perlu ditingkatkan intensitas nya di lingkup pemerintahan, dengan begitu masyarakat akan semakin melek akan transisi energi yang akan dilakukan oleh pemerintah karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang JETP. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh CELIOS (Center of Economic and Law Studies), dengan melibatkan 1.245 responden yang tersebar secara nasional ditemukan bahwa 76% dari responden tersebut mengatakan tidak mengetahui adanya JETP. Pengetahuan tentang JETP hanya terkonsentrasi di wilayah Bali yang merupakan tempat penyelenggaraan G-20.

⁸³ Adhityani Putri, wawancara oleh peneliti, 29 agustus 2023.

Direktur Eksekutif dan Ekonomi CELIOS, Bima Yudhistira menjelaskan “Pengetahuan tentang JETP masih sangat rendah dan terpusat pada masyarakat kalangan ekonomi tertentu”.⁸⁴ Pemahaman masyarakat tentang JETP yang masih minim tersebut menjadi tantangan yang serius dalam pelaksanaan JETP. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan masyarakat akan transisi energi. Sebagaimana yang diketahui bahwa transisi energi akan berdampak kepada masyarakat luas. Transisi energi akan menghilangkan beberapa pekerjaan dan menghadirkan pekerjaan baru. Di Indonesia, menurut analisa IESR, transisi energi diperkirakan akan menghilangkan hingga 252.000 pekerjaan di industri batu bara.⁸⁵ Tanpa edukasi yang mendalam maka akan merugikan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak mengherankan transisi akan menimbulkan ketegangan sosial.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan intensitas dialog terbuka sesering mungkin, untuk membahas dan mensosialisasikan tentang penerapan JETP kedepan. Dialog tersebut juga perlu menyasar ke Institusi pendidikan terutama di Tingkat Perguruan Tinggi. PT dapat menjadi mitra bagi pemerintah Indonesia untuk mengawal,

⁸⁴ Celios, “Survei Opini Publik Terkait JETP (Just Energy Transition Partnership),” CELIOS, July 5, 2023, <https://celios.co.id/2023/survei-opini-publik-terkait-jetp-just-energy-transition-partnership/>.

⁸⁵ “Mendefinisikan Ulang Pekerjaan Masa Depan – IESR,” accessed July 20, 2023, <https://iesr.or.id/en/pustaka/redefining-future-jobs>.

mengawasi, dan mensosialisasikan pelaksanaan transisi energi di Indonesia melalui mekanisme JETP. Dengan langkah tersebut prinsip keadilan yang melekat dalam JETP dapat diwujudkan.

b. Pembentukan Sekretariat JETP

Seperti dalam kemitraan global lainnya, terdapat sebuah platform yang akan menjadi tempat untuk melakukan koordinasi dengan mitra lainnya dalam menjalankan kemitraan, padahal di dalam platform tersebut kemudian disusun kerangka kerja, biasanya dalam bentuk dukungan institusional (informasi, jaringan, kontak) dan seringkali berbentuk pendanaan untuk memungkinkan keterlibatan berbagai aktor pada tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁶ Begitupula dengan mekanisme JETP, untuk membantu proses terlaksananya mekanisme tersebut dibentuklah Sekretariat JETP. Selain itu, pembentukan sekretariat JETP juga merupakan pelaksanaan dari joint statement yang berbunyi “...Mengidentifikasi entitas yang ada untuk bertindak sebagai sekretariat, dan memberikan pembaruan tingkat pemimpin tentang kemajuan kemitraan.”⁸⁷

Pada tanggal 16 Februari 2023 yang lalu, Pemerintah Indonesia dan IPG secara resmi telah membentuk Sekretariat JETP, yang berkantor di Kementerian ESDM, di Jalan Medan Merdeka

⁸⁶ Priscilla McCelvey, “International Partnerships: What Global Development Needs,” BORGEM, January 19, 2016, <https://www.borgenmagazine.com/international-partnerships/>.

⁸⁷ Joint Statement of JETP Indonesia.

Sel. No.18, Gambir, Kecamatan Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diresmikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing negara IPG, seperti yang terlihat di dalam gambar dibawah ini.



Gambar 4. 3 Peresmian *Sekretariat JETP*

Sumber: <https://web.pln.co.id>⁸⁸

Turut hadir dalam pembukaan ruangan yang menjadi Sekretariat JETP antara lain, yakni Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Dadan Kusdiana; Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti; perwakilan IPG Alexia Latortue (yang juga Asisten Menteri Keuangan AS untuk

⁸⁸ web.pln.co.id_ "sekretariat-jetp-diresmikan-bantu-akselerasi-pln wujudkan-transisi-energi-di-indonesia" diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Perdagangan dan Pembangunan Internasional); Rick Duke (Deputi Utusan Khusus untuk Iklim Departemen Luar Negeri AS); serta Tomoyoshi Yahagi (Wakil Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Jepang.⁸⁹

Sekretariat JETP berfungsi sebagai lapisan yang mengkoordinasikan arah dan tim gugus dan teknis pelaksanaannya termasuk proyek-proyek JETP dan pembiayaan nya.⁹⁰ Sekretariat dalam hal ini bukan merupakan lembaga yang dapat memberikan keputusan final terhadap pelaksanaan JETP, namun hanya sebatas mewadahi berbagai stakeholder dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan JETP baik dalam aspek pembiayaan, kebijakan maupun pelaksanaan nya. Adapun hasil final dari perencanaan tersebut tetap berada di dalam kewenangan pemerintah Indonesia bersama dengan IPG.

Melalui Sekretariat JETP ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan utama diantaranya pengembangan energi bersih, secara khusus yaitu pengembangan energi terbarukan. Yang kedua percepatan pensiun PLTU Batu bara, yang ketiga adalah program-program untuk membantu meningkatkan efisiensi energi, termasuk

⁸⁹ Kompas Cyber Media, "Sekretariat JETP Diresmikan untuk Dorong Transformasi Energi Indonesia Halaman all," KOMPAS.com, February 17, 2023, <https://www.kompas.com/global/read/2023/02/17/170000170/sekretariat-jetp-diresmikan-untuk-dorong-transformasi-energi-indonesia>.

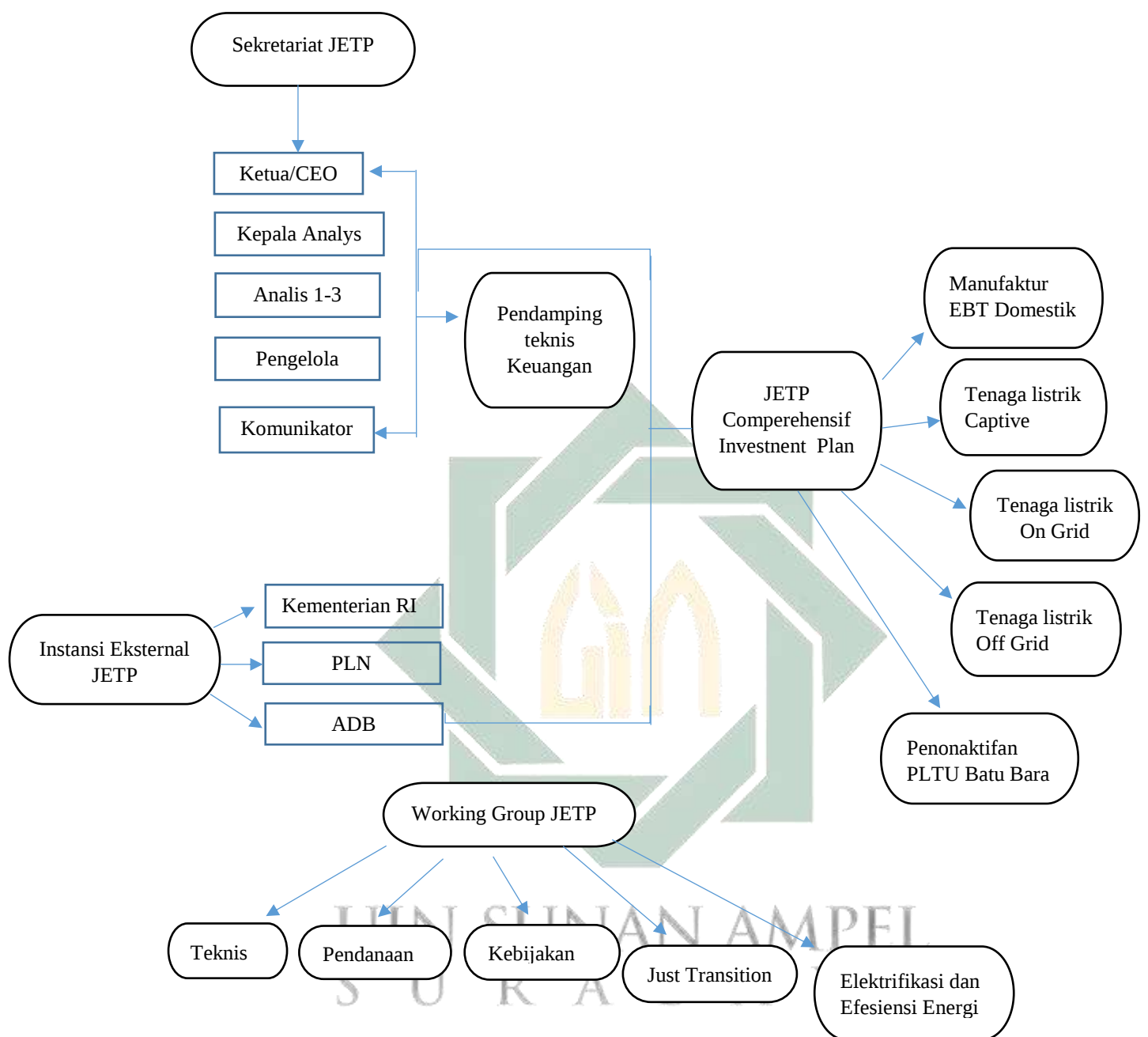
⁹⁰ ESDM, "Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi," ESDM, accessed July 14, 2023, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>.

pengembangan pendukung Industri Energi Terbarukan di Indonesia.⁹¹

Sekretariat JETP dipimpin oleh seorang warga negara Indonesia, saat ini Dr. Edo Mahendar memegang kepemimpinan di Sekretariat. Terdapat sekelompok kepala/CEO Sekretariat, termasuk analisis utama, analisis pendukung, administrator dan komunikator. Pengoperasian sekretariat akan didukung secara teknis dan finansial oleh Asian Development Bank (ADB) dengan satu posisi penasihat teknis dari ADB. Selain itu, entitas kedua yang bekerja di luar sekretariat adalah Kementerian dalam pemerintah Indonesia, PLN dan BUMN lainnya, ADB serta mitra donor lainnya. Struktur organisasi/operasional sekretariat JETP dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹¹ *Ibid*



Gambar 4. 4 Bagan Rancangan Struktur Organisasi Sekretariat JETP

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI⁹²

⁹² Kemenkomarves RI, "JETP Indonesia Framework."

Berdasarkan wawancara dengan bapak Robi diketahui bahwa didalam JETP sekretariat terdapat lima working group utama, yang akan bekerja dibawah payung sekretariat JETP, yaitu: technical, police, financing, Just Transition, electrification and energy efisiensi. Pada dokumen CIPP dibahas scope masing-masing working group.

Adapun tugas masing-masing working group adalah sebagai berikut:

1. Technical (Teknis)

Bertanggung jawab dalam menyusun roadmap untuk program dekarbonisasi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki target Net Zero Emission di tahun 2060 dan dengan mekanisme JETP ini dapat dipercepat di tahun 2050. Namun roadmap menuju program NZE masih belum tersusun secara komprehensif. Roadmap yang disusun di beberapa kementerian masih belum selaras dengan mekanisme JETP. Oleh karena nya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Robi, working group ini akan menyelaraskan Roadmap yang ada agar sesuai dengan target JETP. Kelompok kerja teknis ini akan dipimpin oleh IEA.

2. Policy (Kebijakan)

Working group ini bertanggung jawab dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk dekarbonisasi. Kebijakan yang mendukung dekarbonisasi akan membantu

mensukseskan program dekarbonisasi yang tengah dilakukan oleh suatu negara. Dengan adanya kebijakan yang efektif berdasarkan pertimbangan berbagai pihak, maka prinsip keadilan yang menjadi kunci dalam mekanisme JETP dapat diwujudkan. Kelompok kerja dipimpin oleh World Bank.

Diantara kebijakan yang akan dikembangkan melalui working group ini diantaranya adalah:

a. Kebijakan terkait local content,

Konteks potensi lokal mencakup semua faktor spesifik lokasi dan kawasan yang memengaruhi proses energi kawasan. Sebagai contoh kondisi ekonomi dan keadaan geografis yang berbeda antar wilayah, akan mempengaruhi adanya pilihan energi yang berbeda untuk transisi energi. Keadaan geografis yang dekat dengan pantai dan lokasi pegunungan dapat memaksimalkan penggunaan angin sebagai sumber energi terbarukan.

b. Kebijakan untuk mendorong mata rantai dari peluang energi terbarukan.

Dalam kebijakan ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya melakukan impor barang dalam bentuk jadi namun bagaimana JETP dapat menstimulus bagi berkembang nya mata rantai Industri pendukung energi terbarukan di Indonesia.

c. Kebijakan tentang Purchasing power agreement (Perjanjian pembelian tenaga listrik) yang ideal. misalnya dalam hal ini yang berkepentingan adalah PLN dengan CIPP.

3. Finance (Pendanaan)

Working group ini bertanggung jawab dalam membantu dan memfasilitasi mekanisme pembiayaan. Working group akan bekerja untuk memastikan pendanaan JETP senilai USD 20 Miliar dapat dimobilisasi dengan efektif sesuai dengan kebutuhan dekarbonisasi Indonesia. Working group inilah yang juga merupakan tulang punggung pendanaan melalui mekanisme JETP di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menentukan kebutuhan dekarbonisasi Indonesia yang kemudian diselesaikan dengan pendanaan yang terkumpul baik dari sektor privat maupun swasta. Dalam menjalankan tanggung jawabnya Kelompok kerja pendanaan akan dipimpin oleh Asian Development Bank (ADB).

4. Just Transition (Keadilan)

Menetapkan prinsip-prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan. Prinsip-prinsip tersebut mengatur agar para investor dan pengusaha dapat terlibat secara aktif dalam keterlibatan pemangku kepentingan regional, untuk mengidentifikasi berbagai cara mendukung program transisi

berkeadilan di tingkat subnasional.⁹³ Penetapan prinsip-prinsip sebagai salah satu wujud dalam menjamin keadilan dalam transisi energi seperti yang diharapkan oleh mekanisme JETP. Dimana dalam proses transisi melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali baik pihak pelaksana kepentingan maupun pihak terdampak. Lembaga yang akan memimpin kelompok kerja ini adalah United Nations Development Programme (UNDP).

5. Electrification and Energy efisiensi (Kelistrikan dan efisiensi energi)

Working group ini bertanggung jawab dalam memastikan dekarbonisasi dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia dan efisiensi energi.

Sekretariat JETP sebagai salah satu platform dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme JETP sangat berguna dalam menangani kendala komunikasi. JETP seperti yang diketahui melibatkan banyak pihak baik Instansi pemerintahan dalam maupun luar negeri, negara-negara mitra IPG, bank-bank nasional maupun internasional maupun masyarakat sipil. Oleh karena nya Sekretariat sangat dibutuhkan dalam mengkoordinasikan seluruh pihak agar tetap selaras dengan arah tujuan JETP.

⁹³ Timon Wehnert, "Toolbox Transisi Berkeadilan untuk kawasan batu bara," March 7, 2022, 16.

Pembentukan Sekretariat ini merupakan salah satu Implementasi dari rencana 3 bulan pelaksanaan JETP. Dalam rencana aksi JETP 3 bulan kedepan Poin H disebutkan: Mengidentifikasi entitas yang ada untuk bertindak sebagai sekretariat, dan memberikan pembaruan tingkat pemimpin tentang kemajuan kemitraan;

c. Membantu Indonesia dengan penataan dukungan keuangan dan teknis

Dalam rencana aksi kemitraan disebutkan bahwa aksi kemitraan yang akan dilakukan dalam 3 bulan adalah “Assist Indonesia with structuring sustainable financial and technical support within the broader energy transition to a net-zero economy”.

⁹⁴ Menurut poin tersebut IPG akan mendampingi Indonesia dalam penataan dukungan keuangan dan teknis yang berkelanjutan, yang dalam hal ini diarahkan untuk melakukan transisi energi yang lebih luas ke ekonomi net zero. Dukungan pendanaan dan teknis merupakan tujuan dilaksanakannya kemitraan JETP hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Joint statement bagian maksud dan tujuan.

Lebih lanjut dalam hal ini pendampingan dimaksudkan agar pendanaan yang berasal dari mekanisme JETP dapat dialokasikan secara maksimal untuk kebutuhan transisi energi di Indonesia.

⁹⁴ Joint Statement of JETP Indonesia, 2022

Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh IPG maka target kemitraan juga akan tercapai karena maksimal nya penggunaan pendanaan.

Adapun dalam hal dukungan secara teknis, Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang besar, namun kurang nya pengetahuan dalam pengelolaan dan hal teknis lain nya menjadikan pemanfaatan nya belum optimal. Disisi lain negara-negara mitra IPG memiliki pengetahuan teknis yang lebih baik, hal tersebut dilihat dari penggunaan teknologi yang cukup maju dalam energi terbarukan. Dukungan teknis akan sangat membantu Indonesia dalam memaksimalkan potensi nya. Melalui dukungan tersebut juga dimungkinkan akan dilakukan *transfer knowledge* dari negara mitra IPG dengan tetap memperhatikan potensi lokal indonesia.

Dalam realisasinya penataan dukungan teknis dan pendanaan sudah dilakukan oleh IPG melalui partisipasi nya di Sekretariat JETP. Menurut Bapak robi kedua nya merupakan *intersection* antara working group yaitu financing dan just transition.⁹⁵ Sehingga dapat diketahui bahwa bentuk pendampingan keuangan adalah kerja dari working group financing, dimana dalam hal pendanaan dengan memastikan adanya keselarasan antara kebutuhan pendanaan

⁹⁵ Robi Kurniawan, wawancara oleh peneliti 5 Juli 2023

transisi energi di Indonesia dan pendanaan yang telah dijanjikan sebesar USD 20 Miliar. Adapun dukungan teknis adalah kerja dari working group Just transition, yang tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa transisi energi yang dilakukan di Indonesia dapat mencapai aspek keadilan terutama bagi masyarakat rentan dan terdampak transisi energi.

Meskipun sudah dilakukan pendampingan terhadap dukungan pendanaan dan teknis, namun nyata nya hingga penelitian ini selesai bentuk pendanaan dari negara mitra IPG yang telah dijanjikan belum keluar sedikitpun. Tentunya ini akan menghambat proses berjalan nya transisi energi di Indonesia sesuai yang telah di rencanakan dalam JETP. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Adhityani bahwa aspek pendanaan menjadi aspek kunci dari keterlibatan IPG. Pendanaan tersebut akan disalurkan dalam berbagai bentuk untuk mendukung kelancaran proyek transisi energi yang telah direncanakan. Terdapat proyek-proyek transisi energi yang membutuhkan studi awal (feasibility study) dan technical assistance lain nya dan ini dapat didanai oleh negara IPG. Sehingga keterlibatan nya tidak hanya sekedar penyumbang pendanaan bagi Indonesia dan mengikutsertakan aspek mendukung teknis pelaksanaan proyek transisi energi.⁹⁶

⁹⁶ Adhityani putri, wawancara oleh peneliti 29 Agustus 2023

2. Implementasi dalam 6 Bulan

a. Penyusunan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP)

Dokumen CIPP merupakan dokumen yang memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2030. Dokumen tersebut akan melandasi pelaksanaan kemitraan senilai US\$ 20 Miliar JETP Indonesia.⁹⁷ CIPP merupakan salah satu output yang dihasilkan dari kerja sekretariat JETP yang akan menjelaskan tentang rencana Implementasi JETP di Indonesia kedepan, baik dari segi pendanaan, kebijakan maupun pelaksanaannya. Penyusunan CIPP merupakan implementasi dari Join statement dalam 6 bulan yang berbunyi “Develop a JETP Investment and Policy Plan to identify the investment requirements and opportunities to deliver on the just energy transition...”⁹⁸

Melalui point tersebut JETP mengamanatkan untuk mengembangkan rencana investasi dan kebijakan sebagai salah satu upaya mencapai transisi yang adil. Lebih lanjut penyusunan tersebut akan dipimpin oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan

⁹⁷ Martha Warta Silaban, “Pemerintah Targetkan Keputusan Investasi JETP Pada 16 Agustus 2023,” Tempo, May 20, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1727944/pemerintah-targetkan-keputusan-investasi-jetp-pada-16-agustus-2023>.

⁹⁸ Joint Statement of JETP Indonesia.

administratif dan teknis yang diberikan oleh Sekretariat dan dengan kolaborasi PT SMI. Rencana tersebut akan memuat kebijakan yang nantinya akan memudahkan hambatan di pasar energi sehingga investasi dari sektor swasta akan lebih mudah masuk.

CIPP merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pelaksanaan JETP. Melalui dokumen ini proses dekarbonisasi di Indonesia yang menjadi tujuan akhir dari JETP akan tergambar dengan jelas. Dokumen ini juga menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam langkah-langkah dekarbonisasi selanjutnya menuju target Net Zero Emission. Sifat CIPP adalah *living document*, artinya dapat terus disesuaikan sesuai kebutuhan yang ada.

Penyusunan CIPP tidak hanya berhubungan tentang investasi dan pendanaan namun juga instrumen kebijakan oleh karenanya penamaan dokumen tersebut berubah, dari semula hanya CIP (Comprehensive Investment Plan) berubah menjadi CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan). Hal tersebut seperti yang disampaikan melalui wawancara dengan Bapak Robi⁹⁹

“Kita perlu menyusun namanya CIP dulu namanya CIP Comprehensive Investment Plan lalu dirubah lagi namanya menjadi Comprehensive Investment Police Plan Nah itu kan isinya Proyek apa saja yang akan dibiayai berdasarkan JETP tadi. Jadi rincian pilot project-nya ada itu komitmen kita Nah untuk Penyaluran dana itu komitmen dari mereka gitu jadi kayak apa ya nanti di matchingkan gitu”

⁹⁹ Robi Kurniawan, wawancara oleh peneliti, 5 juli 2023.

Penyusunan CIPP akan dikoordinasikan oleh Sekretariat JETP Indonesia dan akan dimotori empat kelompok kerja yaitu Pemerintah Indonesia, lembaga nasional dan internasional serta unsur masyarakat sipil. Sebagai upaya kolaboratif antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara IPG maka dalam penyusunan nya akan disepakati bersama-sama. CIPP juga akan memastikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, memperkuat ketahanan energi dan keterjangkauan, dan meningkatkan stabilitas jaringan.

Penyusunan CIPP ini jadwalkan selesai pada tanggal 16 Agustus 2023. Pemilihan tanggal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Namun dalam proses penyusunan dokumen tersebut, mengalami penundaan hingga akhir tahun 2023. Penundaan tersebut terjadi karena dalam penyusunan dokumen CIPP, terdapat data baru yang ditambahkan oleh sekretariat JETP kedalam analisis teknis sehingga membutuhkan waktu tambahan sebelum dokumen tersebut diresmikan.¹⁰⁰ Pada tanggal tersebut hanya dilakukan penyerahan dokumen kepada pemerintah Indonesia dan mitra nya untuk direview, selanjutnya pemerintah Indonesia akan memberikan masukan terhadap dokumen CIPP. Tenggat waktu yang baru

¹⁰⁰ "Perlu Direview, Rencana Investasi JETP Ditunda Sampai Akhir 2023 - Investasi Hijau Katadata.Co.Id," accessed August 16, 2023, <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/64dc7bd4be7c3/perlu-direview-rencana-investasi-jetp-ditunda-sampai-akhir-2023>.

tersebut juga memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi publik yang baik sebelum dilakukan finalisasi dan peluncuran dokumen tersebut.

Pembahasan tentang penyusunan CIPP baru dimulai bulan Februari 2023, kurang lebih empat bulan setelah di resmikan nya JETP oleh pemerintah Indonesia. Meskipun penyusunan dokumen tersebut lebih cepat jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Namun jika melihat dari Joint statement sebagai kerangka acuan penyusunan dokumen tersebut relatif mengalami keterlambatan.

Terdapat beberapa rencana komprehensif yang akan dimuat dalam dokumen CIPP ini , diantaranya:

1. Rencana Pendanaan Transisi Energi
2. Roadmap Penghentian PLTU
3. Proyek Transisi Energi
4. Kebijakan Transisi Energi
5. Just Energy Transition

Adapun lima area investasi yang sudah disepakati dalam CIPP terdiri dari:¹⁰¹

1. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi,

¹⁰¹ “Ada 5 Rencana Investasi yang Disepakati di JETP, Dari Mana Pendanaannya?,” kumparan, accessed August 16, 2023, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ada-5-rencana-investasi-yang-disepakati-di-jetp-dari-mana-pendanaannya-20RPPVpMmYJ>.

Jaringan transmisi merujuk pada sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama (main substation). Sedangkan distribusi berfungsi untuk menyalurkan listrik ke konsumen akhir/pelanggan setelah melalui transmisi dari gardu utama.¹⁰²

2. Pemensiunan dini PLTU batu bara,
3. Percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe baseload,

Sumber energi terbarukan seperti bioenergi, air dan tenaga panas bumi diketahui dapat menggantikan profil pembangkit listrik tenaga batubara atau nuklir tradisional sebagai base load dan dapat diintegrasikan tanpa cadangan tambahan. Tipe baseload sendiri adalah jumlah daya minimum yang harus dihasilkan oleh utilitas atau perusahaan distribusi untuk pelanggan, atau jumlah daya yang diperlukan untuk memenuhi permintaan minimum berdasarkan ekspektasi kebutuhan pelanggan yang wajar.¹⁰³ Adanya penonaktifan PLTU sebagai pemasok listrik tipe baseload akan mengganggu kebutuhan akan tenaga listrik, oleh karenanya memerlukan pengganti yang tepat. Investasi akan ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sebagai tipe baseload.

¹⁰² "Pengertian Sistem Transmisi dan Distribusi Listrik," Indonesia Re, accessed August 20, 2023, <https://indonesiare.co.id/id/article/pengertian-sistem-transmisi-dan-distribusi-listrik>.

¹⁰³ Benjamin Matek and Karl Gawell, "The Benefits of Baseload Renewables: A Misunderstood Energy Technology," *The Electricity Journal* 28, no. 2 (March 2015): 105–6, <https://doi.org/10.1016/j.tej.2015.02.001>.

4. Percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe variable, dan

Tipe variabel merujuk kepada sumber energi terbarukan yang memiliki pasokan energi yang bervariasi seperti angin dan matahari. Pembangkit listrik dengan tipe ini hanya dapat menghasilkan listrik ketika kondisi cuaca yang tepat, misalnya ketika angin bertiup atau matahari bersinar. Investasi akan ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu).

5. Membangun rantai pasok energi terbarukan

Investasi dalam hal ini bertujuan untuk menstimulus bagi berkembangnya mata rantai industri untuk mendukung energi terbarukan di Indonesia. Pemanfaatan rantai pasokan energi terbarukan secara langsung memberikan dampak positif antara lain; terwujudnya PDB nasional melalui: manfaat pajak, subsidi modal investasi, biaya tenaga yang lebih kompetitif dan lokus transportasi yang nyaman serta dekat dengan pasar, sehingga bisa dilakukan pengukuran terhadap biaya produksi dan operasi yang lebih rendah terukur.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Agus Puji Prasetyono, "Rantai Pasok EBT Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional," Dewan Energi Nasional, accessed August 20, 2023, <https://www.den.go.id>.

CIPP yang telah disepakati nanti nya akan menjadi nilai tawar (Bergaining) bagi Indonesia untuk menagih komitmen negara-negara IPG dalam hal pendanaan. Selesai nya penyusunan JETP menandakan komitmen Indonesia dalam melaksanakan mekanisme JETP kedepan dengan matang. Suatu keharusan bagi negara-negara JETP itu melaksanakan komitmen nya, melunasi pendanaan JETP sebesar yang telah mereka janjikan yaitu US\$ 20 Miliar.

b. Mengembangkan proses peninjauan dua tahunan

Sesuai dengan rencana aksi yang berbunyi “Develop a biannual review process to assess adherence to the top-line targets included in the joint statement and to the commitment to limiting additional coal capacity in instances where timely, zero-emissions, affordable and reliable alternatives are available.”¹⁰⁵ Maka dalam hal ini akan dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan JETP di Indonesia. Proses peninjauan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 2 tahunan, yang bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap target yang telah ditetapkan melalui mekanisme JETP, termasuk diantaranya adalah membatasi kapasitas batubara tambahan jika tersedia alternatif yang lebih baik. Alternatif tersebut harus berdasarkan pertimbangan tepat waktu, nol emisi, terjangkau dan andal.

¹⁰⁵ Join statement of JETP, 2022

Secara teknis pelaksanaan peninjauan belum dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun IPG hal tersebut dikarenakan program tersebut baru akan dilaksanakan setelah dua tahun JETP berjalan. Namun, untuk menuju proses peninjauan, Sekretariat JETP dengan beberapa working groupnya telah menyusun beberapa indikator keberhasilan dari kemitraan JETP. Indikator tersebut hingga saat ini masih belum final, dan akan disahkan oleh satgas transisi energi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Adhityani selaku Communication Spesialis Sekretariat JETP, indikator tersebut meliputi:¹⁰⁶

a. Terserapnya pendanaan sebesar USD 20 Miliar

Pemerintah Indonesia dan IPG mensyaratkan bahwa pendanaan JETP yang dijanjikan sebesar USD 20 miliar, harus dihabiskan untuk menjalankan proyek-proyek transisi energi yang telah disepakati. Terserapnya pendanaan dengan efektif mengindikasikan terlaksananya kemitraan dengan baik. Hal tersebut juga berarti bahwa pendanaan dari negara-negara maju secara efektif dimanfaatkan untuk pembiayaan transisi energi di Indonesia.

b. Terlaksananya aksi kemitraan yang telah disepakati bersama dalam Joint statement.

¹⁰⁶ Adhityani Putri, wawancara oleh peneliti, 29 Agustus 2023.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa terdapat beberapa aksi kemitraan yang disyaratkan dalam Join statement seperti, pembentukan sekretariat, mengadakan dialog publik dan penyusunan CIPP. Pelaksanaan JETP di tahap awal dianggap berhasil jika aksi kemitraan tersebut telah dilaksanakan, dan sejauh ini beberapa aksi kemitraan telah berhasil dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

c. Tercapainya target pengurangan Emisi dan pemanfaatan EBT di Indonesia

Indikator dari berhasilnya kemitraan JETP dapat dilihat melalui pencapaian target emisi dan pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan. Indonesia menargetkan dalam dokumen NDC nya, penurunan emisi sebesar 290 Juta ton CO₂ di tahun 2030. Target Net Zero Emission juga ditetapkan oleh pemerintah di 2050 lebih cepat dari proyeksi sebelumnya yaitu 2060. Apabila angka tersebut berhasil dicapai oleh pemerintah Indonesia maka dapat dipastikan bahwa mekanisme JETP telah berhasil. Selain pencapaian target emisi, adanya peningkatan pemanfaatan EBT sebesar 34% pada tahun 2030 juga menjadi indikator berhasilnya kemitraan ini, seiring dengan pengurangan jumlah emisi di Indonesia, yang berarti mengurangi jumlah pembangkit listrik bertenaga batu bara ke sumber Energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

c. Menyusun Peta Jalan Sektor Ketenagalistrikan 2030

Dalam poin ke 5 rencana aksi dalam 6 bulan yang berbunyi “Develop a roadmap for 2030 in the power sector in line with the net zero target to support a clear pathway to green development.”¹⁰⁷ Poin tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dan IPG akan mengembangkan Roadmap (peta jalan) di sektor ketenagalistrikan untuk 2030. Peta jalan tersebut akan menjadi panduan dalam penyediaan kelistrikan nasional yang akan disesuaikan dengan target pengurangan emisi nasional.

Penyusunan peta jalan disektor ketenagalistrikan saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh Sekretariat JETP khususnya melalui working group Electrification and Energy efficiency. Penyusunan peta jalan tersebut akan dipimpin oleh PLN selaku instansi yang diberikan kewenangan penuh dalam penyediaan sektor kelistrikan di Indonesia. Peta jalan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen CIPP yang telah disusun. Peta jalan yang dimaksud adalah untuk JETP alias untuk dapat mencapai atau mendekatkan diri pada target JETP yang jauh lebih ambisius daripada target nasional

Sebelumnya terdapat peta jalan ketenagalistrikan yang telah dikembangkan oleh beberapa kementerian di Indonesia, misalnya

¹⁰⁷ Joint Statement of JETP Indonesia, 2022

Kementerian ESDM mengembangkan RUKN (Rencana Usaha Kelistrikan Nasional), dan Kementerian PPN/BAPPENAS dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) juga menyertakan rencana penyediaan ketenagalistrikan. Oleh karena nya dalam pelaksanaan JETP rencana tersebut akan diselaraskan satu sama lain agar tidak terjadi deviasi. Sehingga penyediaan rencana ketenagalistrikan tersebut akan sesuai dengan target pembangunan jangka panjang Indonesia dan target iklim global 1,5⁰ C. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Robi.¹⁰⁸

“Misalnya sekarang ini kan kita sedang menyusun RUKN (rencana usaha ketenagalistrikan nasional), BAPPENAS juga sedang menyusun RPJPN Nah itu satu sama lain disamakan dulu asumsinya ke depannya tidak ada deviasi gitu untuk masing-masing sektor yang termasuk ketenagalistrikan jadi satu arah itu”.

d. Mengidentifikasi Rencana Penonaktifan PLTU Batu Bara

Pensiun dini PLTU adalah salah satu bagian terpenting dari mekanisme JETP. Penonaktifan PLTU yang menggunakan energi fosil sebagai sumber nya akan mempercepat proses dekarbonisasi dan mengurangi jumlah emisi karbon. Dalam aksi kemitraan 6 bulan poin ke 6 disebutkan “Identify a plan to accelerate the early retirement or avoid construction of on and off-grid coal-fired power plants both before and after 2030 in a manner that substantially decreases emissions while maintaining stable and affordable power

¹⁰⁸ Robi Kurniawan, wawancara oleh peneliti, 5 Juli 2023

for the Indonesian people”.¹⁰⁹ Melalui poin tersebut pemerintah Indonesia dan IPG akan menyusun rencana untuk menonaktifkan PLTU batu bara baik On grid maupun off grid. Penonaktifan PLTU Batu bara tersebut dilakukan baik sebelum maupun sesudah 2030.

Pelaksanaan aksi kemitraan pada poin ini dalam prosesnya sedang dijalankan oleh sekretariat JETP melalui working groupnya, yaitu dengan mengidentifikasi PLTU-PLTU mana saja yang akan dinonaktifkan. Hasil dari proses identifikasi akan dimuat di dalam dokumen CIPP. Hal tersebut dikarenakan penonaktifan PLTU Batu bara menjadi fokus investasi JETP. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Robi “Untuk unretailment itu kita juga masukkan ke dalam perencanaan juga untuk kemudian nanti disodorkan dokumen itu cuma memang di situ akan banyak pembahasan...”¹¹⁰ Investasi nantinya juga akan digunakan untuk pembiayaan penonaktifan PLTU yang sudah direncanakan

Pada proses pengidentifikasian penonaktifan PLTU mempertimbangkan beberapa persyaratan diantaranya adalah melihat dari jenis teknologi yang digunakan, umur pengoperasian dan kesiapan untuk dinonaktifkan. PLTU yang masih menggunakan teknologi *subcritical* akan masuk dalam daftar pertimbangan, begitu juga dengan PLTU yang sudah memiliki ketersediaan suplai

¹⁰⁹ Joint Statement of JETP Indonesia

¹¹⁰ Robi Kurniawan, wawancara oleh peneliti 5 Juli 2023

pengganti nya. Penonaktifan PLTU juga masih akan berfokus di pulau Jawa, hal tersebut dikarenakan PLTU yang berada di luar pulau Jawa masih membutuhkan pengembangan untuk mendukung kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

Selain pertimbangan teknis penonaktifan PLTU juga akan dilakukan secara bertahap sebagaimana yang diamanatkan dalam poin Joint statement JETP. Penonaktifan dalam hal ini akan melihat kebutuhan kelistrikan masyarakat Indonesia sehingga akan tetap stabil dan tidak mengganggu pasokan listrik. Oleh karenanya penonaktifan PLTU akan diselaraskan dengan peta jalan ketenagalistrikan nasional yang juga menjadi bagian dari kerja sekretariat JETP. Terdapat beberapa PLTU yang secepatnya direncanakan akan dipensiunkan, diantaranya :¹¹¹

- a. PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 MW
- b. PLTU Pelabuhan ratu berkapasitas 1,080 MW
- c. PLTU Ciralaya berkapasitas 1.600 MW

C. Hambatan Selama Pelaksanaan Kerjasama JETP

Seperti halnya dalam pelaksanaan program kerja, pelaksanaan JETP di Indonesia dalam kenyataannya mengalami beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya:

¹¹¹ Robi Kurniawan, wawancara oleh peneliti, 5 Juli 2023

1. Pendanaan untuk JETP dari negara mitra IPG yang belum keluar

Pendanaan merupakan hal yang sangat krusial dalam mekanisme kemitraan transisi energi. Keberhasilan proses JETP sebagai salah satu upaya dalam mendekarbonisasi sektor energi di Indonesia, ditentukan dari bagaimana negara-negara mitra IPG mau menepati janjinya untuk mengeluarkan sejumlah pembiayaan yang disepakati yaitu USD 20 Miliar. Hal tersebut disebabkan karena hampir keseluruhan proyek yang akan dijalankan membutuhkan pendanaan dengan segera. Just transition yang diusung dalam JETP misalnya, membutuhkan kapasitas teknis tambahan dan penerapan program yang terwujud dari hasil assessment masing-masing proyek yang juga akan membutuhkan dana, yaitu dana hibah.

Namun, sejak kesepakatan KTT G20 di Bali November 2022, hingga selesainya penelitian ini pendanaan untuk Indonesia belum mendapatkan kejelasan dari negara mitra IPG. Beberapa negara mitra telah menyatakan komitmen nya untuk memberikan pendanaan melalui JETP secara langsung, namun mayoritas belum memberikan kepastian tentang jumlah yang diberikan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta negara mitra JETP untuk menepati janji pendanaan nya sebesar US\$20 Miliar. Luhut dalam hal ini menegaskan bahwa Indonesia telah dalam posisi yang siap dengan serangkaian program JETP, tinggal bagaimana pendanaan nya.

Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y.Kim, dalam salah satu konferensi pers di sela-sela peringatan hari kemerdekaan ke -247 AS mengonfirmasi bahwa , alasan pembiayaan JETP belum keluar karena hingga saat ini masih dalam proses negosiasi dengan negara mitra yang lain. Dubes Kim menegaskan bahwa JETP memiliki proses, langkah-langkah yang harus diikuti agar dana nya dapat dicairkan, dan saat ini sudah *on the track*, seperti misalnya pendirian sekretariat, dan penyusunan rencana investasi. Pendanaan tersebut baru akan dicairkan setelah semua langkah tersebut sudah memasuki tahapan final dan sudah dilakukan proses *review* oleh mitra internasional. Hal tersebut diungkapkan melalui pernyataan nya.¹¹²

Langkah-langkahnya sudah dilakukan, sekretariat sudah ditetapkan, sudah didirikan, rencana investasi juga akan ditetapkan, akan dilanjutkan pada bulan Agustus. Setelah proses-proses tersebut memasuki tahap final dan partner internasional sudah *review*, maka dana baru bisa dicairkan.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu untuk terus menegosiasikan pendanaan yang telah disepakati. Karena pendanaan adalah masalah yang krusial namun *risikan* jika perlu pendekatan bilateral dalam upaya menagihnya. Pemerintah Indonesia baik presiden maupun menteri nya yang terlibat dalam JETP, dapat memanfaatkan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai salah satu upaya dalam menagih komitmen pendanaan tersebut. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh

¹¹² Liputan6.com, "Jawaban Dubes AS soal Dana JETP USD 20 Miliar untuk Indonesia yang Tak Kunjung Cair," liputan6.com, June 28, 2023, <https://www.liputan6.com/global/read/5331320/jawaban-dubes-as-soal-dana-jetp-usd-20-miliar-untuk-indonesia-yang-tak-kunjung-cair>.

menteri keuangan RI, pada saat kunjungan kenegaraan ke Jepang dalam salah satu forum pembahasan transisi energi.

2. Sulitnya memobilisasi resource dalam waktu yang sangat singkat

Pelaksanaan rencana kemitraan yang di targetkan selesai dalam waktu 6 bulan ternyata menjadi hambatan tersendiri bagi tim yang bekerja dalam mekanisme JETP. Implementasi kemitraan melibatkan banyak stakeholder dari tingkat kementerian, negara mitra, dan sektor swasta. Butuh waktu yang cukup lama untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan semua pihak yang berkepentingan . Misalnya dalam menyusun kebijakan tentang Pembangkit listrik maka akan berbicara dengan PLN dll.

Untuk menangani hal tersebut menurut Bapak Roby, dibentuklah sekretariat tetap sebagai tempat untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa Sekretariat kemudian secara reguler mengadakan pertemuan dengan berbagi pihak gitu ya Misalnya dengan PLN dengan tim perencanaan mereka modeling mereka ke depan seperti apa kemudian dipertemukan dengan ESDM, ESDM modelling ke depan untuk secure energi.

Pembentukan sekretariat JETP yang berkantor di Kementerian ESDM, sangat memudahkan dalam proses koordinasi. Pertemuan-pertemuan intens yang diadakan oleh sekretariat menjadikan program kerja JETP terlaksana dengan baik, walaupun dalam jangka waktu yang

singkat. Miss komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dapat diminimalisir dengan adanya sekretariat JETP.

3. Keterlambatan Penyusunan CIPP JETP

Sesuai dengan rencana aksi kemitraan yang terdapat dalam joint statement, penyusunan CIPP akan selesai dalam 6 bulan setelah disepakatinya JETP. Namun dalam prosesnya lebih dari 8 bulan dokumen tersebut belum diselesaikan. Keterlambatan penyelesaian dokumen ini akan menghambat pelaksanaan kemitraan JETP. Seperti yang diketahui bahwa CIPP adalah dokumen kunci untuk terlaksananya JETP, dengan keterlambatan tersebut juga berdampak pada proyek-proyek yang akan dijalankan melalui mekanisme JETP. Termasuk juga didalamnya adalah pembiayaan dari negara-negara mitra. Keterlambatan penyusunan CIPP menjadi satu alasan bagi negara mitra IPG untuk mencairkan pendanaan sesuai dengan komitmen mereka.

D. Tantangan Implementasi JETP di Masa Depan

Setelah berhasil menjalankan rencana aksi yang disyaratkan dalam Joint statement, Pemerintah Indonesia dan IPG akan bersama-sama menjalankan proses yang menjadi tujuan dasar dari mekanisme JETP yaitu dekarbonisasi sektor energi listrik di Indonesia. CIPP sebagai dokumen komprehensif kemitraan akan menjadi panduan bagi pihak pemangku kebijakan dalam melaksanakan mekanisme tersebut. Proyek-proyek dekarbonisasi dan pengembangan teknologi energi terbarukan akan

dijalankan melalui mekanisme ini. Beberapa PLTU juga akan di nonaktifkan untuk mendukung pelaksanaan JETP.

Pelaksanaan kemitraan pemerintah Indonesia dan IPG melalui mekanisme JETP dimasa yang akan datang, akan mengalami tantangan diantaranya yaitu:

1. Keterbukaan Informasi terkait Pendanaan JETP

Aspek keterbukaan informasi adalah hal yang penting dalam mekanisme JETP, hal ini dikarenakan kemitraan lebih banyak bersifat pendanaan dengan jumlah yang besar. Untuk memobilisasi dan mengelola dana jumbo tersebut diperlukan transparansi dan akuntabilitas sehingga terhindar dari praktek korupsi. Akuntabilitas juga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, juga sebagai langkah untuk menarik investor berinvestasi di sektor energi di Indonesia. Akuntabilitas JETP akan menghilangkan keraguan para investor untuk melakukan investasi di sektor transisi energi.

Namun pada kenyataanya aspek keterbukaan informasi tentang perkembangan mekanisme JETP di Indonesia termasuk pembiayaan dan penyalurannya masih minim diketahui oleh publik. Hal tersebut terindikasi dengan sedikit nya informasi di media massa. Indikasi lainnya yaitu belum adanya website yang secara khusus untuk menginformasikan perkembangan JETP baik yang dibuat oleh Sekretariat JETP maupun kementerian yang terlibat. Belajar dari pengalaman JETP di Afrika Selatan, minimnya informasi tentang JETP

menjadikan salah satu dari bentuk kegagalan penerapan mekanisme JETP, terutama di sektor energi yang memiliki jejak panjang korupsi di negara tersebut. Oleh karenanya Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut agar proses pelaksanaan JETP lebih terbuka sehingga mekanisme tersebut akan berjalan dengan efektif untuk mencapai serangkaian target yang telah ditetapkan berkaitan dengan dekarbonisasi.

2. Ketergantungan terhadap batubara

Pelaksanaan JETP di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan terutama karena ketergantungan nya terhadap batubara. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar bagi dunia. Akan sangat sulit bagi Indonesia untuk beralih dari batubara ke energi terbarukan. Industri batubara telah menjadi pekerjaan utama bagi kurang lebih 250.000 masyarakat Indonesia, artinya banyak pekerjaan yang akan terdampak transisi.¹¹³ Indonesia juga memiliki surplus kapasitas listrik di wilayah-wilayah utama dan armada pembangkit batubara yang relatif baru, menjadikan pensiun dini menjadi mahal. Permasalahan lain nya adalah belum adanya keselarasan regulasi dengan tujuan JETP. Regulasi yang mengatur tentang percepatan transisi energi melalui Perpres No. 112 tahun 2022, masih memperbolehkan adanya pendirian PLTU baru yang menjadi program pemerintah. Hal tersebut semakin mempersulit

¹¹³ Stanford, Stanford, and California 94305, "The High Stakes of Indonesia's \$20 Billion Just Energy Transition."

realisasi untuk menoaktifkan PLTU. Untuk itu perlu pemerintah perlu membuat regulasi baru yang secara tegas melarang pendirian PLTU batu bara.

3. Mempersiapkan SDM yang berkompeten

Penghentian beberapa PLTU, sebagai salah satu proyek dalam kemitraan JETP, seperti yang telah disebutkan akan menggantikan beberapa pekerjaan dengan pekerjaan baru. Menurut analisa IESR, transisi energi diperkirakan akan menghilangkan hingga 252.000 pekerjaan di industri batu bara.¹¹⁴ Namun terdapat peningkatan kesempatan pekerjaan baru dalam sektor energi terbarukan. Laporan terbaru IRENA 2023 dalam IESR menyebutkan terdapat peningkatan kesempatan kerja selama masa transisi dari 0,63 juta saat ini menjadi 0,74 juta pada tahun 2030 dan 1,07 juta pada tahun 2050.¹¹⁵

Peluang tersebut belum diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Belum terdapat strategi yang jelas dari pemerintah bahkan dalam mekanisme JETP, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam transisi energi terlebih lagi mempersiapkan tenaga kerja yang ada untuk beralih dari pembangkit energi fosil ke yang terbarukan. Sebuah langkah maju dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam mempersiapkan tenaga kerja di sektor energi terbarukan, yaitu dengan Program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga

¹¹⁴ "Mendefinisikan Ulang Pekerjaan Masa Depan – IESR."

¹¹⁵ "Kesiapan Ketenagakerjaan untuk Energi Terbarukan di Indonesia – IESR," accessed August 17, 2023, <https://iesr.or.id/kesiapan-ketenagakerjaan-untuk-energi-terbarukan-di-indonesia>.

Surya (GERILYA). Melalui program tersebut membuka ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang profesional dan menciptakan tenaga kerja yang profesional khususnya di bidang industri energi terbarukan.¹¹⁶

Kedepan dalam menjalankan mekanisme JETP pemerintah perlu untuk menyiapkan strategi yang efektif dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam sektor energi terbarukan. sehingga JETP menjadi katalis dalam menciptakan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Strategi tersebut dapat berupa program magang, pelatihan, workshop dll. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan institusi pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi.

4. Memastikan Aspek Keadilan bagi Masyarakat terdampak

Aspek keadilan menjadi prasyarat bagi pelaksanaan transisi energi dalam JETP. Aspek Just yang menjadi satu kesatuan dalam JETP, mengindikasikan perlunya memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat terdampak, lebih jauh transisi energi yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Untuk memastikan aspek keadilan dalam pelaksanaan nya JETP telah mengusulkan adanya pendekatan terhadap dampak negatif dari transisi energi hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Ibu dhitri.¹¹⁷

¹¹⁶ "Kementerian ESDM RI - Page - Gerilya," accessed August 17, 2023, <https://www.esdm.go.id/id/page/gerilya>.

¹¹⁷ Adhityani Putri, wawancara dengan peneliti 29 Agustus 2023.

CIPP JETP mengusulkan suatu pendekatan dan kerangka untuk memastikan mitigasi dampak negatif dari suatu proyek transisi energi dan memaksimalkan manfaat yang dapat diraih khususnya dalam ranah regenerasi dan diversifikasi perekonomian lokal.

Keadilan dalam hal ini dapat bermakna sangat luas, namun ILO telah memberikan beberapa panduan terhadap pelaksanaan keadilan dalam transisi energi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dialog sosial dan konsensus sosial yang kuat.

Dialog sosial penting dilakukan agar transisi yang ada didasarkan pada penerimaan semua pihak, oleh karena itu dialog perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat juga dapat meminimalisir dari adanya konflik. Pada proses pelaksanaan JETP di Indonesia dialog yang melibatkan publik dilakukan oleh Sekretariat JETP dan PLN. Namun peneliti melihat bahwa intensitas dialog yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia masih sangat minim, hal tersebut terindikasi dari jumlah dialog yang diadakan. Hal tersebut berbeda halnya dialog yang dilakukan oleh entitas non pemerintah misalnya IESR yang rutin mengadakan diskusi terbuka tentang transisi energi kurang lebih 2 kali dalam sebulan. Diharapkan dengan ditundanya peluncuran CIPP JETP, dapat memberikan keluasaan bagi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakannya melalui saran dan masukan yang diberikan.

b. Mempertimbangkan inklusi gender yang kuat dalam kebijakan lingkungan. Inklusi gender diperlukan agar tidak terjadinya bias

gender yang menjadikan perempuan hanya sebatas obyek transisi energi.

Menurut data yang disampaikan oleh The International Renewable Energy Agency (IRENA) pada tahun 2019 yang dikutip oleh harian Kompas, keterlibatan perempuan dalam sektor energi hanya 32 persen dibandingkan dengan laki-laki. Adapun 32 persen perempuan tersebut lebih banyak ditempatkan pada bagian Administratif, seperti sekretaris bukan dalam posisi yang strategis.¹¹⁸ Fakta tersebut diperkuat dengan temuan dari CELIOS bahwa 48% perempuan tidak tertarik bekerja di sektor transisi energi seperti energi terbarukan.¹¹⁹ Mekanisme baru JETP dalam hal ini harus menjadi pendorong bagi peningkatan peran perempuan dalam transisi energi.

- c. Perlu menyediakan kerangka kerja yang adil bagi semua pihak untuk mempromosikan penciptaan pekerjaan yang lebih layak.
- d. Kebijakan yang koheren di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan/pelatihan dan ketenagakerjaan yang menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat, pekerja, investor dan konsumen untuk merangkul dan mendorong transisi menuju masyarakat yang ramah dan inklusif.

¹¹⁸ "Peran Perempuan Di Sektor Energi Masih Dipandang Sebelah Mata - Kompas.Id," accessed August 24, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/02/peran-perempuan-di-sektor-energi-masih-dipandang-sebelah-mata>.

¹¹⁹ Sapariah Saturi, "Kajian Sebut Partisipasi Publik Terbatas Soal JETP Di Indonesia, Berikut Masukannya," Mongabay.co.id, July 17, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/07/17/kajian-sebut-partisipasi-publik-terbatas-soal-jetp-di-indonesia-berikut-masukannya/>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang Implementasi JETP sebagai Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan IPG menunjukkan bahwa terdapat beberapa implementasi dari kerjasama diantaranya adalah:

1. Dalam 3 bulan Pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana dalam rencana aksi kemitraan diantaranya adalah mengadakan dialog politik terbuka yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, Pembentukan sekretariat JETP yang berfungsi sebagai badan yang mengkoordinasikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan JETP, dan Membantu Indonesia dengan penataan dukungan pendanaan dan teknis. Terdapat beberapa garis besar dalam pelaksanaan JETP di 3 bulan kemitraan, diantaranya pelaksanaan dialog diinisiasi oleh Sekretariat JETP dan PLN. Akan tetapi intensitas pelaksanaan dialog oleh pemerintah Indonesia masih minim dibandingkan dengan beberapa lembaga non pemerintah seperti IESR. Adapun pembentukan sekretariat nantinya bertanggung jawab kepada Pemerintah Indonesia dan IPG. Sekretariat terbagi menjadi 5 working group utama yang akan bekerja sesuai dengan wilayah

kerjanya meliputi teknis, kebijakan, pendanaan, just transition, serta elektrifikasi dan efisiensi energi.

2. Dalam 6 Bulan sebagaimana yang telah disepakati dalam aksi kemitraan JETP, Pemerintah Indonesia dan IPG telah berhasil melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah *Pertama* menyusun Dokumen Perencanaan Kebijakan Investasi yang menyeluruh yang diistilahkan dengan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen tersebut akan memuat serangkaian kebijakan investasi dan teknis pelaksanaan JETP, yang merupakan output yang dihasilkan oleh sekretariat JETP. Pada proses penyusunan nya CIPP mengalami keterlambatan karena beberapa pertimbangan. Salah satunya masih banyaknya masukan yang perlu untuk dicantumkan. Setelah penyusunannya selesai CIPP akan menjadi dokumen yang berperan sebagai *bargaining* untuk menagih komitmen pendanaan dari negara maju yang hingga saat ini belum juga dicairkan. *Kedua* Mengembangkan proses peninjauan dua tahunan. Secara teknis pelaksanaan proses Peninjauan belum dapat dilakukan karena baru bisa dilakukan setelah JETP berjalan selama 2 tahun, Namun telah disusun beberapa indikator keberhasilan yang akan menjadi acuan untuk melakukan peninjauan. *Ketiga* menyusun peta jalan ketenagalistrikan 2030, dalam hal ini akan disinkronkan berbagai rencana ketenagalistrikan yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih. *Keempat* mengidentifikasi rencana penonaktifan PLTU Batubara,

terdapat beberapa PLTU yang akan segera dinonaktifkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 MW, PLTU Pelabuhan ratu berkapasitas 1,080 MW, PLTU Tanjung jati B's 1-4 berkapasitas 2,640.

3. Pelaksanaan JETP di Indonesia mengalami beberapa hambatan yang diantaranya adalah pendanaan untuk JETP yang telah dijanjikan belum juga dikeluarkan oleh mitra IPG, sulitnya memobilisasi *resource* dalam waktu yang singkat untuk menangani nya pemerintah Indonesia membentuk sekretariat JETP dan hambatan terakhir yaitu terlambatnya penyusunan CIPP yang akan menjadi dokumen kunci dalam pelaksanaan JETP di Indonesia.
4. Adapun tantangan implementasi JETP di masa yang akan datang diantaranya adalah keterbukaan informasi terkait pendanaan JETP yang masih eksklusif, ketergantungan akan penggunaan batu bara yang masih belum selaras dengan target JETP, mempersiapkan SDM yang kompeten untuk menghadapi peluang dunia kerja baru akibat transisi energi dan memastikan aspek keadilan bagi semua kalangan termasuk diantaranya adalah masyarakat rentan dan terdampak

B. Saran

Dari Penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Pada Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia perlu untuk membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas berkaitan dengan proses transisi energi. Keterlambatan penyusunan CIPP dapat dimanfaatkan untuk mengintensifkan dialog terbuka dengan masyarakat luas. Regulasi tentang transisi energi juga perlu dibuat agar selaras dengan JETP, karena regulasi yang ada melalui Perpres 112 tahun 2022 masih membolehkan pembangunan PLTU Batubara. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mempersiapkan pekerjaan baru dalam sektor energi terbarukan pemerintah perlu bekerjasama dengan Institusi pendidikan maupun balai pelatihan untuk mengadakan pelatihan, kegiatan magang, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mempersiapkan kepada dunia kerja. Berkaitan dengan pendanaan pemerintah perlu untuk terus menegosiasikan kepada mitra IPG. Bagaimana mendorong agar mereka dapat melaksanakan komitmennya Hal itu dapat dilakukan pada pertemuan bilateral maupun multilateral.

2. Bagi mitra IPG

Keberhasilan program JETP bergantung bagaimana negara-negara mitra menepati komitmen pendanaannya sebesar 20 Miliar USD. JETP Indonesia sebagai sebuah mekanisme kemitraan baru akan menjadi percontohan bagi mekanisme serupa oleh karenanya komitmen penuh pendanaan akan selalu dipertanyakan. Kedepan IPG dapat segera melunasi komitmennya, dan tidak mengambil keuntungan secara sepihak dari program kemitraan ini.

3. Bagi Masyarakat

Di luar kelebihan dan kekurangannya, JETP sebagai sebuah kemitraan global telah dijalankan oleh pemerintah dan akan memiliki dampak kepada masyarakat Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Untuk itu masyarakat perlu untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaat dari mekanisme tersebut dan mempersiapkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang ada dalam mendorong transisi energi di Indonesia.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan celah yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lainnya. Kekurangan-kekurangan tersebut tidak terlepas dari adanya keterbatasan waktu dan kendala teknis lain nya terutama sulitnya pencarian data yang mendukung penelitian khususnya mengontak dan mewawancarai *key person* yang relevan dari berbagai instansi terkait. Untuk penelitian selanjutnya misalnya, peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji tidak hanya sebatas pelaksanaan namun juga efektifitas kemitraan JETP setelah dokumen CIPP diumumkan sebagai langkah untuk akselerasi dekarbonisasi di Indonesia.

5. Bagi Pembaca

Untuk pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang transisi energi, pembaca dapat lebih *aware* terhadap isu lingkungan seperti isu perubahan iklim, emisi global

dan program dekarbonisasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan pembaca dapat melakukan langkah-langkah sederhana yang dapat berkontribusi pada perubahan lingkungan yang lebih baik misalnya dengan menghemat penggunaan energi, melakukan penanaman pohon, dan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Bapak Robi Kurniawan Ph. D Staf Analis Kebijakan Direktorat Jenderal EBTKE
Kementerian ESDM RI

Ibu Adhityani Putri, Communication Specialist Sekretariat JETP Indonesia

Sumber-sumber lain

———. “International Partnerships: What Global Development Needs.”

BORGEN, January 19, 2016.

<https://www.borgenmagazine.com/international-partnerships/>.

“Glasgow Climate Pact,” n.d.

“Incorporating Just Transition Strategies in Developing Country NDCs and Post
COVID Responses: Indonesia on JSTOR.” Accessed June 14, 2023.

<https://www.jstor.org/stable/resrep35553>.

“Indonesia Manfaatkan Program PGII Baru dalam Mendorong Pembangunan
Infrastruktur, Koridor Ekonomi, dan Konektivitas - Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Accessed August
9, 2023. [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5147/indonesia-
manfaatkan-program-pgii-baru-dalam-mendorong-pembangunan-
infrastruktur-koridor-ekonomi-dan-konektivitas](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5147/indonesia-manfaatkan-program-pgii-baru-dalam-mendorong-pembangunan-infrastruktur-koridor-ekonomi-dan-konektivitas).

“JETP Experience in South Africa and Indonesia, and Lessons Learnt for
Vietnam.” Nhquang & Association, March 2023.

“JETP: UE Dan Mitra Internasional Meluncurkan Kemitraan Inovatif Dengan
Indonesia – INSIGHT EU MONITORING.” Accessed July 24, 2023.

[https://portal.ieu-monitoring.com/editorial/jetp-eu-and-international-
partners-launch-ground-breaking-partnership-with-
indonesia/393772?utm_source=ieu-portal](https://portal.ieu-monitoring.com/editorial/jetp-eu-and-international-partners-launch-ground-breaking-partnership-with-indonesia/393772?utm_source=ieu-portal).

“Kementerian ESDM RI - Page - Gerilya.” Accessed August 17, 2023.

<https://www.esdm.go.id/id/page/gerilya>.

- “Kesiapan Ketenagakerjaan untuk Energi Terbarukan di Indonesia – IESR.”
Accessed August 17, 2023. <https://iesr.or.id/kesiapan-ketenagakerjaan-untuk-energi-terbarukan-di-indonesia>.
- “Mendefinisikan Ulang Pekerjaan Masa Depan – IESR.” Accessed July 20, 2023.
<https://iesr.or.id/en/pustaka/redefining-future-jobs>.
- “Pemerintah Terus Mendorong Percepatan Transisi Energi di Dalam Negeri Guna Mencapai Target Net Zero Emission pada 2060 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Accessed July 3, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4996/pemerintah-terus-mendorong-percepatan-transisi-energi-di-dalam-negeri-guna-mencapai-target-net-zero-emission-pada-2060>.
- “Peran Perempuan Di Sektor Energi Masih Dipandang Sebelah Mata - Kompas.Id.” Accessed August 24, 2023.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/02/peran-perempuan-di-sektor-energi-masih-dipandang-sebelah-mata>.
- “Perlu Direview, Rencana Investasi JETP Ditunda Sampai Akhir 2023 - Investasi Hijau Katadata.Co.Id.” Accessed August 16, 2023.
<https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/64dc7bd4be7c3/perlu-direview-rencana-investasi-jetp-ditunda-sampai-akhir-2023>.
- “Sekretariat JETP: Rencana Investasi CIPP Akan Melibatkan Masyarakat - Investasi Hijau Katadata.Co.Id.” Accessed September 11, 2023.
<https://katadata.co.id/rezzaaji/ekonomi-hijau/6488539fd0014/sekretariat-jetp-rencana-investasi-cipp-akan-melibatkan-masyarakat>.
- “The Implementation of JETP in Indonesia from the Perspective of Civil Society Organisations | Germanwatch e.V.” Accessed September 11, 2023.
<https://www.germanwatch.org/en/88125>.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Metode Dan Praktik*. 1st ed. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
<http://library.fis.uny.ac.id/digital/fisbook/14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046/index.html#p=61>.

- Allen & Gledhill. "Just Energy Transition Partnership established to aid Indonesia in achieving its decarbonisation goals." Accessed June 7, 2023.
<https://www.allenandgledhill.com/publication/articles/22793/just-energy-transition-partnership-established-to-aid-indonesia-in-achieving-its-decarbonisation-goals>.
- Andonova, Liliana B. *Governance Entrepreneurs: International Organizations and the Rise of Global Public-Private Partnerships*. 1st ed. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316694015>.
- ASEAN Business News. "Indonesia's Just Energy Transition Partnership," January 2, 2023. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-just-energy-transition-partnership/>.
- Behera, Puspanjali, Anasuya Haldar, and Narayan Sethi. "Achieving Carbon Neutrality Target in the Emerging Economies: Role of Renewable Energy and Green Technology." *Gondwana Research* 121 (September 1, 2023): 16–32. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.03.028>.
- Bogdan, Robert, and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. 5th ed. Boston, Mass: Pearson A & B, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lain Nya*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2007.
- Celios. "Survei Opini Publik Terkait JETP (Just Energy Transition Partnership)." CELIOS, July 5, 2023. <https://celios.co.id/2023/survei-opini-publik-terkait-jetp-just-energy-transition-partnership/>.
- Chotimah, Hidayat Chusnul, Puguh Toko Arisanto, and Tiffany Setyo Pratiwi. "Bilateral Agreement of Indonesia - Japan for Low Carbon Growth Cooperation: An Analysis of the Effectiveness and the Compliance Level." *Nation State Journal of International Studies* 3, no. 2 (December 31, 2020): 98–112. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.228>.
- Christensen, Lasse Toft, and Anissa Suharsono. "Achieving a Just Energy Transition in Indonesia," n.d.

- Creswell, John W., and J. David Cresell. *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles, USA: SAGE Publication, 2018.
- Curini, Luigi, and Robert Franzese. *The SAGE Handbook of Research Methods in Political Science and International Relations*. 1 Oliver's Yard, 55 City Road London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd, 2020.
<https://doi.org/10.4135/9781526486387>.
- Dadan Kusdiana. "Enabling High Share Of Renewable Energy In Indonesia's Power System." Jakarta, November 24, 2022.
- Damuri, Yose Rizal, Novia Xu, M. Habib Abiyan Dzakwan, Nadya A. Daulay, Jeremy Samuel Ngadiman, and Gracia Paramitha. "Arah Kebijakan & Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia: Sektor Ekonomi Strategis Perdagangan, Industri, Dan Investasi." Centre for Strategic and International Studies, 2023.
<https://www.jstor.org/stable/resrep48562>.
- EpaperMI. "Dana Transisi Energi Masih Minim | Media Indonesia," March 31, 2023. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/dana-transisi-energi-masih-minim>.
- ESDM. "Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi." Accessed May 29, 2023.
<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>.
- ESDM. "Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi." Accessed July 14, 2023.
<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>.
- Etikan, Ilker. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.
- Evans, Simon. "Analysis: Which countries are historically responsible for climate change?" Carbon Brief, October 5, 2021.

<https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/>.

Factsheet on the G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment (n.d.).
www.mofa.go.jp ›file.

Holloway, Christine Daymon, Immy. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Bentang Pustaka, 2007.

IEA. “Global CO2 emissions rose less than initially feared in 2022 as clean energy growth offset much of the impact of greater coal and oil use - News.” Accessed June 22, 2023. <https://www.iea.org/news/global-co2-emissions-rose-less-than-initially-feared-in-2022-as-clean-energy-growth-offset-much-of-the-impact-of-greater-coal-and-oil-use>.

ILO. Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all (2015).

Indonesia Re. “Pengenalan Sistem Transmisi dan Distribusi Listrik.” Accessed August 20, 2023. <https://indonesiare.co.id/id/article/pengenalan-sistem-transmisi-dan-distribusi-listrik>.

Institute, Asia Society Policy. “Introduction.” Getting Indonesia to Net Zero. Asia Society, 2023. <https://www.jstor.org/stable/resrep48545.9>.

Jansen, Louisa J.M., and Patrick P. Kalas. “Improving Governance of Tenure in Policy and Practice: A Conceptual Basis to Analyze Multi-Stakeholder Partnerships for Multi-Stakeholder Transformative Governance Illustrated with an Example from South Africa.” *Sustainability* 12, no. 23 (November 26, 2020): 9901. <https://doi.org/10.3390/su12239901>.

Joint Statetement of JETP Indonesia (2023).

Kemenkomarves RI. “JETP Indonesia Framework.” March 2023.

Kerlinger, Fred N. *Asas Asas Penelitian Behavioral*. 3rd ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

Könneke, Jule, Jennifer Tollmann, Iskander Erzini Vernoit, and Julian Havers. “Financing Climate Partnerships: G7 Solidarity and Infrastructure Investment.” E3G, 2022. <https://www.jstor.org/stable/resrep40234>.

- kumparan. “Ada 5 Rencana Investasi yang Disepakati di JETP, Dari Mana Pendanaannya?” Accessed August 16, 2023.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/ada-5-rencana-investasi-yang-disepakati-di-jetp-dari-mana-pendanaannya-20RPPVpMmYJ>.
- Kurniawan, Robi. Implementasi JETP sebagai Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan IPG, July 5, 2023.
- Leal Filho, Walter, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, and Tony Wall, eds. *Partnerships for the Goals*. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Cham: Springer International Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4>.
- Liputan6.com. “Jawaban Dubes AS soal Dana JETP USD 20 Miliar untuk Indonesia yang Tak Kunjung Cair.” liputan6.com, June 28, 2023.
<https://www.liputan6.com/global/read/5331320/jawaban-dubes-as-soal-dana-jetp-usd-20-miliar-untuk-indonesia-yang-tak-kunjung-cair>.
- Lüpke, Heiner Von, Charlotte Aebischer, and Martha Bolanos. “International Partnerships for a Just Energy Transition: Findings from South Africa.” *DIW Weekly Report*, 2023. https://doi.org/10.18723/DIW_DWR:2023-5-1.
- M.Si, Dr Drs ISMAIL NURDIN. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Makuwira, Jonathan. *NGOs and Post-Conflict Recovery*. Australian: ANU Press, 2006. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbk89.11>.
- Masoed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 46–47.
- Matek, Benjamin, and Karl Gawell. “The Benefits of Baseload Renewables: A Misunderstood Energy Technology.” *The Electricity Journal* 28, no. 2 (March 2015): 101–12. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2015.02.001>.
- May, Carl. “Towards a General Theory of Implementation.” *Implementation Science* 8, no. 1 (February 13, 2013): 18. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-18>.

- McCelvey, Priscilla. "International Partnerships: What Global Development Needs." BORGEM, January 19, 2016.
<https://www.borgenmagazine.com/international-partnerships/>.
- Media, Kompas Cyber. "Sekretariat JETP Diresmikan untuk Dorong Transformasi Energi Indonesia Halaman all." KOMPAS.com, February 17, 2023.
<https://www.kompas.com/global/read/2023/02/17/170000170/sekretariat-jetp-diresmikan-untuk-dorong-transformasi-energi-indonesia>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed.Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lain Nya*. 4th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.
- Olsen, Wendy. "Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed." *Developments in Sociology* 20 (January 1, 2004): 103–18.
- Peter Seok Jin Han, and 김태균. "Global Partnerships for Development and Risk Tendencies of Partners: A Theoretical Approach with the Gavi Case." *Asian International Studies Review* 19, no. 1 (June 2018): 1–26.
<https://doi.org/10.16934/ISR.19.1.201806.1>.
- Prasetyono, Agus Puji. "Rantai Pasok EBT Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional." Dewan Energi Nasional. Accessed August 20, 2023.
<https://www.den.go.id>.
- PT PLN (Persero). "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik." Accessed August 2, 2023. <https://web.pln.co.id/pln-jetp/jetp-home>.
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. "KESDM Percepat Transisi Energi dengan Menggelar Forum ETWG 3 di Bali." Accessed August 11, 2023. <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/kesdm-percepat-transisi-energi-dengan-menggelar-forum-etwg-3-di-bali>.
- Putri, Adityani, Agustus 2023.

- Putri, Maria. "Just Energy Transition Partnership (JETP) Afrika Selatan - irid.or.id," April 13, 2023. <https://irid.or.id/publication/just-energy-transition-partnership-jetp-afrika-selatan/>.
- Raihan, Asif, Monirul Islam Pavel, Dewan Ahmed Muhtasim, Sadia Farhana, Omar Faruk, and Arindrajit Paul. "The Role of Renewable Energy Use, Technological Innovation, and Forest Cover toward Green Development: Evidence from Indonesia." *Innovation and Green Development* 2, no. 1 (March 2023): 100035. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100035>.
- Rosenbaum, Dennis P., and Amie M. Schuck. *Comprehensive Community Partnerships for Preventing Crime*. Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195398823.013.0012>.
- Rudd, Kevin, Muhamad Chatib Basri, Ban Ki-Moon, Laurence Tubiana, and Asia Society Policy Institute. "Getting Indonesia to Net Zero: Foreword." *Getting Indonesia to Net Zero*. Asia Society, 2023. <https://www.jstor.org/stable/resrep48545.5>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Saturi, Sapariah. "Kajian Sebut Partisipasi Publik Terbatas Soal JETP Di Indonesia, Berikut Masukannya." *Mongabay.co.id*, July 17, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/07/17/kajian-sebut-partisipasi-publik-terbatas-soal-jetp-di-indonesia-berikut-masukannya/>.
- Sekaringtias, Annisa, Brunilde Verrier, and Jennifer Cronin. "Untangling the Socio-Political Knots: A Systems View on Indonesia's Inclusive Energy Transitions." *Energy Research & Social Science* 95 (January 1, 2023): 102911. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102911>.
- Silaban, Martha Warta. "Pemerintah Targetkan Keputusan Investasi JETP Pada 16 Agustus 2023." *Tempo*, May 20, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1727944/pemerintah-targetkan-keputusan-investasi-jetp-pada-16-agustus-2023>.
- Song, Yuegang, Umer Shahzad, and Sudharshan Reddy Paramati. "Impact of Energy Infrastructure Investments on Renewable Electricity Generation in

- Major Asian Developing Economies.” *Australian Economic Papers* 62, no. 1 (March 2023): 1–23. <https://doi.org/10.1111/1467-8454.12282>.
- Stanford, © Universitas, Stanford, and California 94305. “The High Stakes of Indonesia’s \$20 Billion Just Energy Transition,” August 4, 2023. <https://aparc.fsi.stanford.edu/news/high-stakes-indonesias-20-billion-just-energy-transition-partnership>.
- suara.com. “Keadilan Terancam Dimajinakan Dalam Rencana Percepatan Transisi Energi Indonesia,” June 24, 2023. <https://www.suara.com/bisnis/2023/06/24/174010/keadilan-terancam-dimajinakan-dalam-rencana-percepatan-transisi-energi-indonesia>.
- Suroso, Djoko Santoso Abi, Budhi Setiawan, P. Pradono, Zahara Sitta Iskandar, and Mulia Asri Hastari. “Revisiting the Role of International Climate Finance (ICF) towards Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) Target: A Case Study of the Indonesian Energy Sector.” *Environmental Science & Policy* 131 (May 1, 2022): 188–95. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.022>.
- Suroso, Djoko Santoso Abi, Budi Setiawan, P. Pradono, Zahara Sitta Iskandar, and Mulia Asri Hastari. “Revisiting the Role of International Climate Finance (ICF) towards Achieving the Nationally Determined Contribution (NDC) Target: A Case Study of the Indonesian Energy Sector.” *Environmental Science and Policy* 131 (2022).
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie DeVault. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. John Wiley & Sons, 2015. https://books.google.co.id/books?id=pONoCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Tyler, Emily, and Lonwabo Mgoduso. “Just Energy Transitions and Partnerships in Africa: A South African Case Study,” n.d.
- Tzeremes, Panayiotis, Eyup Dogan, and Nooshin Karimi Alavijeh. “Analyzing the Nexus between Energy Transition, Environment and ICT: A Step towards

- COP26 Targets.” *Journal of Environmental Management* 326 (January 15, 2023): 116598. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116598>.
- U.S. Department of Defense. “Alliances vs. Partnerships.” Accessed August 3, 2023. <https://www.defense.gov/News/Feature-Stories/story/Article/1684641/alliances-vs-partnerships/https%3A%2F%2Fwww.defense.gov%2FNews%2FFeature-Stories%2FStory%2FArticle%2F1684641%2Falliances-vs-partnerships%2F>.
- U.S. Department of the Treasury. “U.S. Departments of the Treasury and State, and South African President Cyril Ramaphosa Announce Endorsement of the South Africa Just Energy Transition Partnership Investment Plan,” June 9, 2023. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1085>.
- Utomo, Gigih Udi. “Energy Transition Financing Through JETP & ETM.” Presented at the 3rd Japan RE Investment Indonesia 2023, New Otani Hotel Tokyo, March 3, 2023.
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society* 6, no. 4 (February 1975): 445–88. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- W. Mansbach, Richard, and Kristen L. Rafferty. *Introduction to Global Politics*. 2nd ed. London and New York: Routledge, 2008.
- Wehnert, Timon. “Toolbox Transisi Berkeadilan untuk kawasan batu bara,” March 7, 2022.
- Weiler, Florian, Carola Klöck, and Matthew Dornan. “Vulnerability, Good Governance, or Donor Interests? The Allocation of Aid for Climate Change Adaptation.” *World Development* 104 (April 1, 2018): 65–77. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.001>.
- Winanti, Poppy S., and Wawan Mas’udi. *G20 DI TENGAH PERUBAHAN BESAR: MOMENTUM KEPEMIMPINAN GLOBAL INDONESIA?* UGM PRESS, 2023.